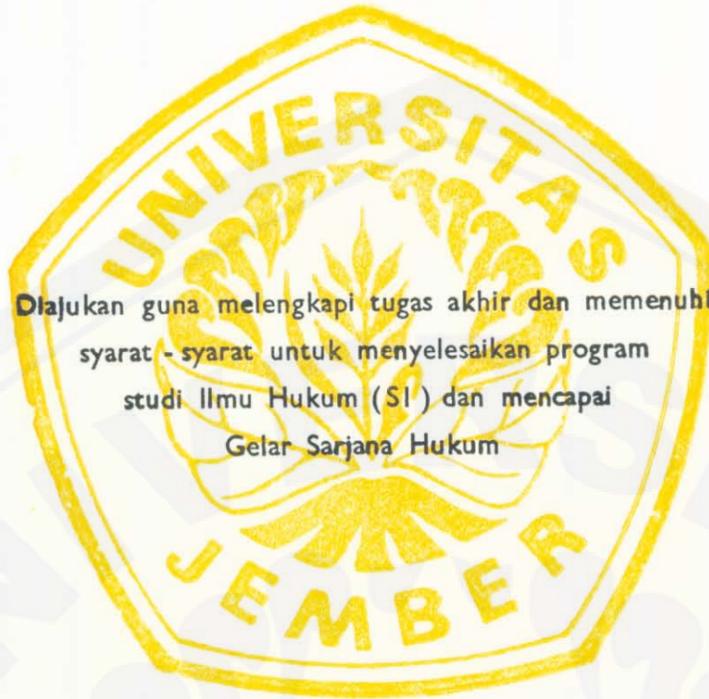




**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM DIKAWASAN CAGAR ALAM PULAU
NUSA BARONG**

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Agus Setiawan

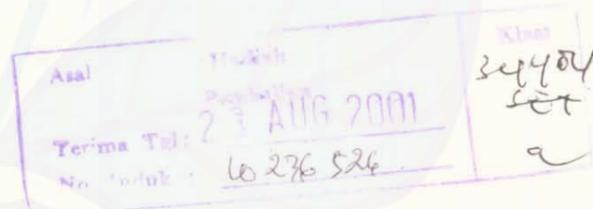
NIM : 9207100151

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DIKAWASAN CAGAR ALAM PULAU NUSA BARONG**

OLEH :

AGUS SETIAWAN
NIM. 9207100151

PEMBIMBING :

Prof. H. ABDUL CHALIM MOCH, S.H.
NIP. 130 445 413

PEMBANTU PEMBIMBING :

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 130 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2000**

Motto :

“.....Janganlah kamu membuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

(Terjemah Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Surat Al-Qhasash : 77)*

* Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an, 1998





**REPOSISI DAN REORGANISASI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai
Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR



Oleh :

Firman Syah Ali
NIM. 9407100103

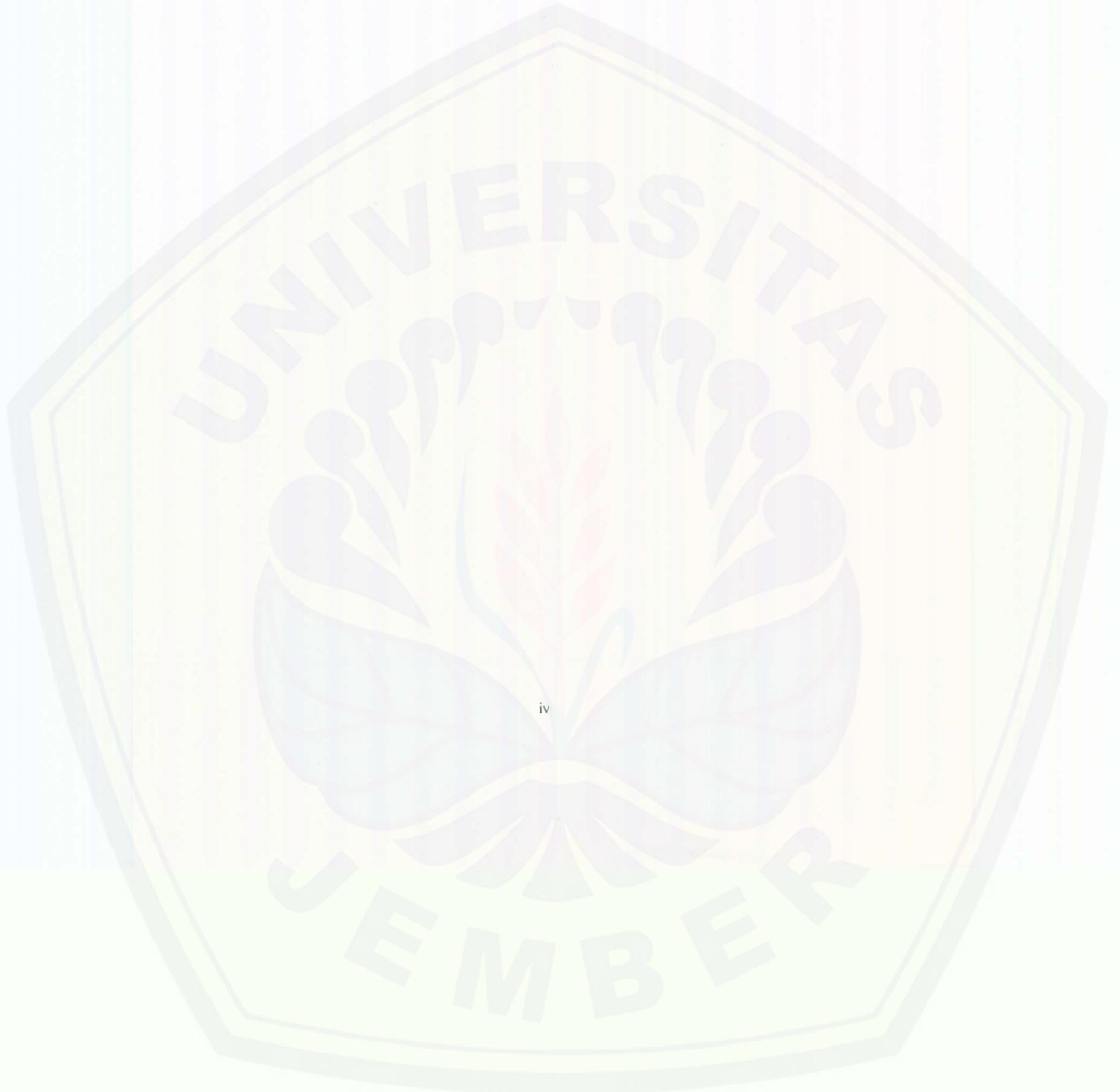
Asal	: Hadiah
Pembelian	
Terima Tgl:	: 19 DEC 1999
No. Induk :	: Pti '99 - 9. 209

S
Klass
355.033
ALI
R
lexp

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1999

PERSEMBAHAN :

1. Almamater Yang Kubanggakan
2. Ibunda dan Ayahanda Tercinta yang telah memberikan segala kasih sayangnya dan senantiasa berdo'a untuk kebahagiaan putra-putranya ;
3. Nusa dan Bangsa.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Haribaan Ayahanda Drs. Alimuddin dan Ibunda Zahratun.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Keluarga Besar (Kakek) H. Emmo Prawiro Truno yang sangat kubanggakan, terutama Dr. H. Moch. Mahfud, MD. SH. SU (Om Mahfud), Zaizatun Nihayati, SH. (Mbak Yati), Ir. Moch. Subki (Om Uki) beserta isteri, Siti Marwiyah, SH. (Tante Yat), Suripan, SH. (Mas Ivan), Syaiful Rahman, SH. SE. (Mas Ipung), Syaiful Arifin, SE. (Mas Arif), dr. Syaiful Hidayat (Mas Yayak), Ir. Yusuf Efendi (Mas Fendi), Ir. Nurul Fajar (Mas Nurul), Nurul Hakimah, Spd. (Mbak Oyong) dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
4. Keluarga Besar (Almarhum Kakek) Mayor TNI (purn.) Nawawi, Bintang Gerilya yang kau tolak, bersinar cemerlang di dada anak dan cucu-cucumu.
5. Om Arief Ismail dan Mas Yudi, pendorong belajarku dan pengganti orang tuaku selama di Jember.
6. Kawah Candra dimukaku, Pimpinan Daerah pelajar Islam Indonesia (PD-PII) Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Jember, terutama Korps Brigade.
7. Pengurus Cabang IPNU/ IPPNU Pamekasan, kenangan pergerakanku pada penghujung tahun 1993.
8. Pergerakanku tercinta PMII Cabang Jember dan Rayon Hukum Universitas Jember.
9. LSM-ku tercinta, yang menggores selaksa kepedihan dan kebanggaan, LSM Fordeka.....!
10. Yenni Wulandari, SE. , yang selalu mendukung idealisme dan perjuanganku.
11. Legenda hidupku di kampus ini, di mana darah dan air mata pernah kuteteskan, gerakan mahasiswa pecinta rakyat (GEMPAR)..... penegak reformasi, penumbang orde baru.

PENGESAHAN

Disahkan:

SKRIPSI INI DENGAN JUDUL : REPOSISI DAN REORGANISASI
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK
INDONESIA (ABRI) DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS

Oleh :

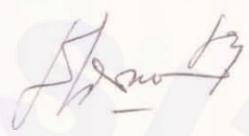
FIRMAN SYAH ALI
NIM. 9407100103

PEMBIMBING



Prof. DR. TJUK WIRAWAN, SH
NIP. 130 287 095

PEMBANTU PEMBIMBING



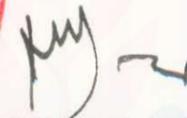
A.B. DYAH DHARMA SUTJI, SH
NIP. 130 808 987

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, SH
NIP. 130 261 653

PERSETUJUAN

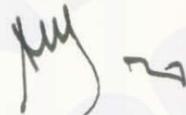
DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 1999

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Panitia Penguji,

Ketua



SAMSI KUSAIRI, SH
NIP. 130 261 653

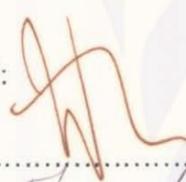
Sekretaris



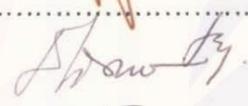
TOTOK SUDARYANTO, SH, MS.
NIP. 131 120 332

Anggota Penguji:

PROF. DR. TJUK WIRAWAN, SH.
NIP. 130 287 095


:

A.B. DYAH DHARMA SUTJI, SH.
NIP. 130 808 987


:

KATA PENGANTAR

Upaya Reformasi Internal ABRI yang dicanangkan sejak 5 Oktober 1998 memang memberikan nafas segar bagi masyarakat terutama kalangan LSM, Pers dan mahasiswa. Tetapi ada suatu permasalahan yang cukup Substansial dan Fundamental di balik Reformasi Internal tersebut, yaitu terjadinya beberapa langkah dan keputusan pemerintah yang Inkonstitusional.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji persoalan yang muncul di tubuh Angkatan Perang Negara kita itu, yang selanjutnya penulis tuangkan dalam judul: "REPOSISI DAN REORGANISASI ABRI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS".

Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya yang telah memberikan kekuatan pada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ini.

Penulis juga sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus atas segala bantuannya baik secara moral maupun materiil, kepada yang terhormat:

1. Bapak Sanisi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ini.
2. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH selaku Pembimbing dalam menyusun Skripsi ini.
3. Ibu Asmara Budhi Dyah Dharma Suci, SH selaku dosen Pembantu Pembimbing.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Jember, sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi ini.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, tempat penulis pertama kali mengkonsultasikan persiapan kelulusan.
6. Segenap dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Pihak Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah membantu proses pencarian data skripsi ini.
8. Adik-adikku tersayang, yang telah memberi dorongan lahir dan batin untuk menggapai sukses, Iin, Adang, Nunung, Erwan, dan Irma.

8. Adik-adikku tersayang, yang telah memberi dorongan lahir dan batin untuk menggapai sukses, Iin, Adang, Nunung, Erwan, dan Irma.
9. Teman-temanku Angkatan '94 yang telah mengukir sejuta kenangan dihatiku : Dodik Prihatin AN, Nurul Agustina, Ima Maulidha, Yulianto, dan Agus Muttaqin. Sahabat-sahabat PMII Se-antero Jember, yang selalu memberikan inspirasi baru terhadap pemikiran penulis.
10. Saudara-saudaraku tercinta, Ismail Fahmi Abu Nawas (PT. Kyondong Indonesia), Imam Al-Farizi Abu Nawas, Munaji Leghak, Edi (ITB), Ajang (ITS),
11. Penasehat-penasehat spritualku, Bang Haji Suwargo (PP Al-Jauhar Jember), KH. Abdul Ghafur, LML. (Direktur PP Reparasi Moral, Konang, Pamekasan), KH. M. Faruq Hanafi (Sumber Anyar, Maesan, Bondowoso), Pak Sutik (Sumber Anyar, Maesan, Bondowoso), Pak Roberts Zulkifli Alkraksan (Kraksaan, Probolinggo), Mbah Suro (Puger, Jember), dan Anom Tohed (Plakpak Pamekasan)
12. Teman-temanku senasib seperjuangan, secangkrukan, terutama Hanafi, Gafur, Anam, Edo banderas, Supedi, faesol bahar, majid, Farid, Rizal, Retno, dll.

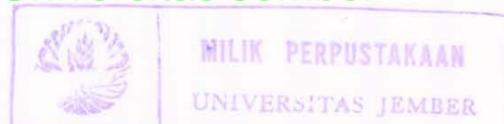
Tiada yang dapat penulis ungkapkan kecuali harapan agar karya tulis ini bermanfaat bagi pengembangan wacana dan keilmuan di Almamater tercinta, Universitas Jember. Amien Ya Robbal Alamien.

Jember, 25 September 1999

Firman Syah Ali

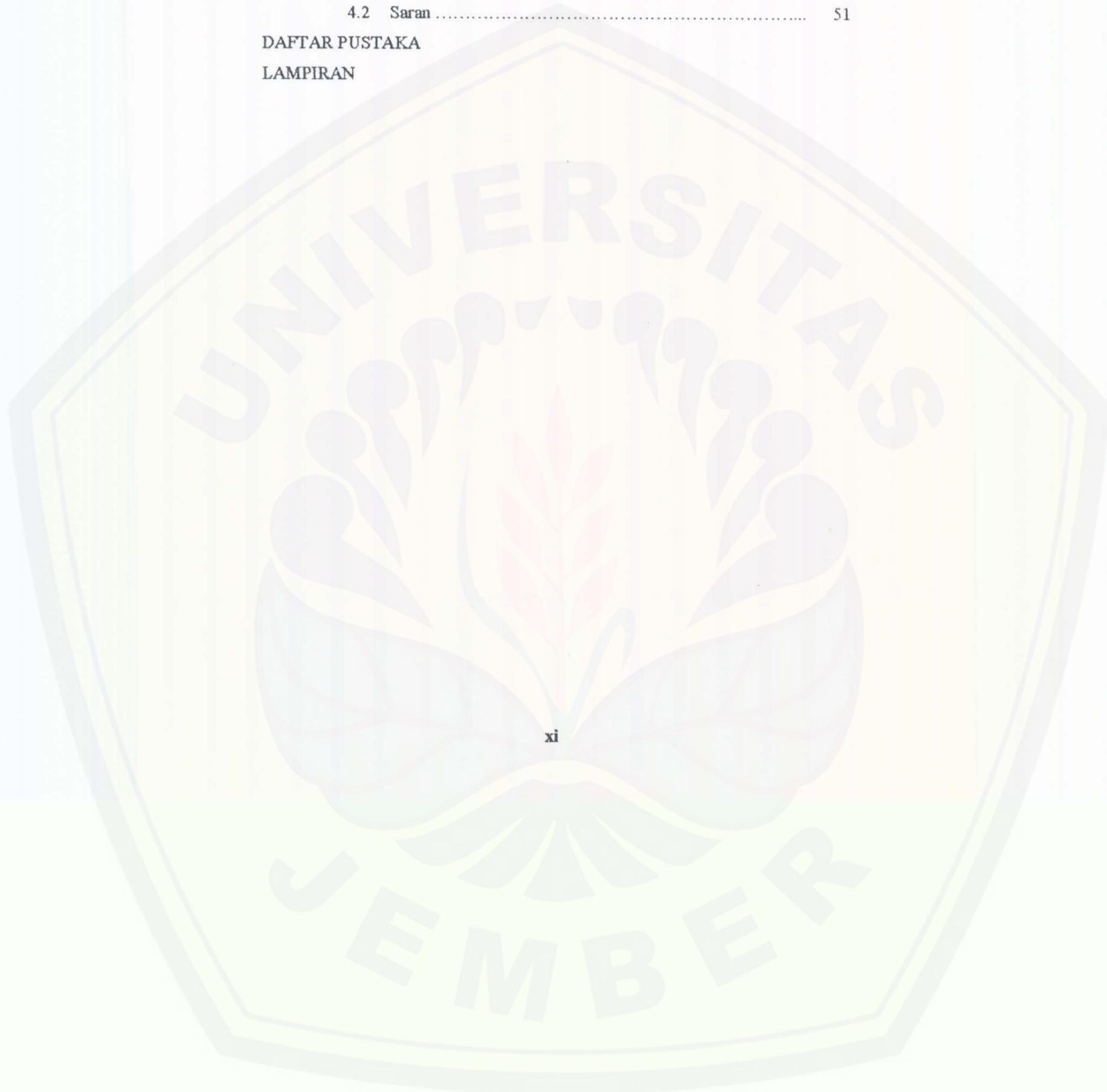
DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Umum.....	11
1.3.2 Tujuan Khusus.....	11
1.4 Metodologi Penelitian.....	11
1.4.1 Pendekatan Masalah	11
1.4.2 Sumber Data	12
1.4.3 Prosedur Pengambilan dan Pengolahan Data	12
1.4.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	13
1.4.5 Analisa Data.....	15
BAB II FAKTA YURIDIS DAN LANDASAN TEORITIK	16
2.1 Fakta Yuridis	16
2.1.1 Pengumuman Rencana Pemisahan POLRI-ABRI, 5 Oktober 1998	17



2.1.2	Pengumuman Pemisahan POLRI-ABRI, 1 April 1999	17
2.1.3	Komentar Karni Ilyas tentang Pemisahan POLRI-ABRI, 18 April 1999	17
2.1.4	Penggunaan Istilah TNI Oleh Kaster dan Asrenum Panglima TNI, 25-26 Mei 1999	18
2.1.5	Materi UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok HANKAM Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi dan Reorganisasi ABRI	18
2.1.6	Materi UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi dan Reorganisasi ABRI Tahun 1998/1999	20
2.1.7	Materi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi dan Reorganisasi ABRI 1998/1999	20
2.2	Landasan Teoritik	20
2.2.1	Cyclus Polybios	21
2.2.2	Konsepsi Dasar Kemiliteran dan Kepolisian	22
2.2.3	Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	25
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Evaluasi Terhadap Eksistensi, Posisi dan Organisasi ABRI	29
3.2	Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI	38
3.2.1	Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI Pada Masa-Masa Terakhir Pemerintahan Orde Baru	38

3.2.2	Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI Pada Era Reformasi	40
3.3	Legitimasi Terhadap Reposisi dan Reorganisasi ABRI	46
3.4	Penerapan Hukum Yang Benar Dalam Menghadapi Reposisi dan Reorganisasi ABRI	47
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



RINGKASAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan-keamanan. Penyelenggaraan Hankam Negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). ABRI sebagai inti dari kekuatan Hankamnas melaksanakan peran gandanya di atas dasar Doktrin Dwifungsi ABRI. Perkembangan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya ABRI dalam perjuangan bangsa Indonesia.

ABRI bukanlah organisasi militer, karena di dalam tubuh ABRI juga ada kepolisian. POLRI juga bukan organisasi kepolisian, karena di dalam tubuh POLRI tertanam kuat doktrin dan tatanan militer. ABRI memang Organisasi Politik yang paling solid, tetapi dalam menjalankan perannya banyak terjadi penyimpangan dan kekerasan. Akhirnya masyarakat melancarkan hujatan dan kritik agar Dwifungsi ABRI segera dihapuskan, Organisasi ABRI dirombak, dan Perbelanjaan ABRI dikurangi.

Seiring dengan tuntutan Reformasi, para elit ABRI telah melakukan proses Reformasi Internal berupa Reposisi dan Reorganisasi, sejak satu dasa warsa terakhir pemerintahan Jenderal Soeharto hingga saat ini. Tetapi langkah-langkah reformasi Internal ABRI tidak pernah berjalan tuntas, karena selalu diikuti dengan langkah-langkah lain yang berlawanan dengan arus reformasi. Langkah Politik ABRI memang masih gamang.

Langkah yang paling kontroversial adalah ketika Pimpinan ABRI mengeluarkan keputusan pemisahan ABRI dengan POLRI dan perubahan istilah

ABRI menjadi TNI, karena keputusan tersebut jelas dan gamblang berlawanan dengan ketentuan UU Pokok Hankam, UU Prajurit ABRI, UU Bela Negara, UU Peradilan Militer, dan UU Kepolisian RI.

Belum selesai polemik sekitar perombakan Organisasi ABRI menjadi TNI, para Petinggi ABRI kembali membuat langkah pengajuan RUU KKN kepada DPR-RI. Ketika RUU tersebut ditolak oleh masyarakat, Petinggi ABRI mengubahnya menjadi RUU PKB yang diajukan satu paket dengan RUU Ratih.

Bagaimana sebetulnya perjalanan Reformasi Internal di tubuh ABRI, Quo Vadis ABRI, Quo Vadis Politik Tentara ? Bagaimana mekanisme Yuridisnya?

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional, selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.

Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan-keamanan. Ketahanan Hankam adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara Stabilitas Pertahanan dan Keamanan (Hankam) negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Penyelenggaraan Hankam Negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang bersifat kesemestaan, kerakyatan, dan kewilayahan serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan mendayagunakannya secara optimal dan terpadu.

Pembangunan Hankam Negara diarahkan pada pembangunan setiap komponen Hankam Negara yang terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan IPTEK untuk mewujudkan SISHANKAMRATA dengan daya tangkal yang tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadaikan perkembangan lingkungan strategis.

Pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankam yang meliputi

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, sarana dan prasarana nasional, termasuk industri strategis, terus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pembinaan wilayah negara dan yurisdiksi nasional yang bertumpu pada kondisi geografis Indonesia yang sarwanusantara ditujukan pada pengembangan kemampuan aparat keamanan, penyediaan sarana dan prasarana penegak hukum terutama di laut, serta penataan penyelenggaraan penegak kedaulatan nasional yang lebih terpadu.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai inti dari kekuatan Hankamnas melaksanakan peran gandanya di atas dasar Doktrin Dwifungsi ABRI. Konsep Dwifungsi ABRI dipahami sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang Hankam Negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (L.B. Moerdany : 1991). Dari pengertian tersebut, ABRI merasa harus senantiasa memiliki jiwa, mempunyai tekad dan semangat pengabdian di dalam dua bidang yakni Hankam dan Non-Hankam.

Hassan Shadily et al dalam Ensiklopedi Indonesia 2, mendefinisikan dwifungsi ABRI sebagai fungsi rangkap yang dimiliki ABRI sejak kelahirannya, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial. Sebagai kekuatan Hankam, ABRI merupakan aparatur negara/ pemerintah yang menjalankan fungsi hankamnas, sedangkan sebagai kekuatan sosial, ABRI merupakan salah satu Golongan Karya yang berkewajiban ikut serta secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat.

Jadi, perkembangan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya ABRI dalam perjuangan bangsa Indonesia. ABRI lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi rakyat, ia lahir dari anak-anak rakyat sendiri, tetapi secara institusional ABRI merupakan penyatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian RI

dalam satu wadah yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 225/PLT.1962 (Hassan Shadily : 1980). Pada tahun 1964, Angkatan Kepolisian RI (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tetapi tetap ditempatkan di bawah naungan ABRI.

ABRI bukanlah organisasi militer, karena di dalam tubuh ABRI juga ada kepolisian. POLRI juga bukan organisasi kepolisian, karena di dalam tubuh POLRI tertanam kuat doktrin dan tatanan militer. Susunan organisasi tersebut menempati posisi yang dominan dan superior dalam konfigurasi politik Indonesia, sehingga pada akhirnya lahir aspirasi masyarakat agar ABRI segera melakukan reformasi internal, berupa reposisi dan reorganisasi. Walaupun pihak elit strategis ABRI sendiri mengaku bahwa ABRI sudah melaksanakan proses reformasi internal sejak tahun 1990.

ABRI lahir dari suatu proses sejarah yang panjang, sepanjang usia Republik Indonesia. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) II tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ketiga ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) saja, sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BKR sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah, sehingga BKR ikut memecahkan masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena disamping BKR tumbuh juga milisi-milisi yang tidak puas dengan BKR, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penyatuan laskar-laskar perjuangan (milisi) dengan BKR, dalam wadah tentara keamanan rakyat (TKR). TKR juga terlibat dalam politik, karena perang untuk merebut kemerdekaan adalah suatu perjuangan politik di mana pimpinan politik dan pimpinan perang merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan.

Sejak 14 Nopember 1945, Indonesia memasuki era demokrasi liberal dengan paham supremasi sipil dan dua bulan kemudian TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) dan Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi

Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin, pada tanggal 25 Januari 1946 mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di bawah Kementerian Pertahanan, dibentuk staff pendidik politik yang berwenang mendidik opsir-opsir politik untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi dan berkedudukan disamping panglima. Menteri Pertahanan juga membentuk biro perjuangan yang menandingi eksistensi TRI. Maka terjadilah dualisme antara panglima besar TRI Soedirman dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu tentara. Dekrit tersebut disusun dengan penetapan presiden tanggal 7 Juni 1947 tentang Peresmian Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi, Amir Syarifuddin kembali mengumpulkan bekas anggota biro perjuangan dalam organisasi "TNI bagian masyarakat" dan membentuk perwira politik tentara (Pepolit) untuk mengendalikan TNI. Pada tahun 1948 Amir Syarifuddin diturunkan dari jabatan perdana menteri/ Menteri pertahanan dan digantikan oleh Mohammad Hatta. Perdana Menteri Hatta segera mengeluarkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi (Re-Ra) TNI, yang ditentang keras oleh mantan perdana menteri Amir Syarifuddin. Kemudian Amir Syarifuddin memimpin pemberontakan PKI Madiun, dan segera ditumpas oleh TNI.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden RI, maka jenderal Soedirman mengumumkan perang gerilya dan Kolonel Nasution mengeluarkan instruksi markas besar komando Djawa (MBKD) No. 1/ MBKD/ 1948 tentang berlakunya pemerintahan militer se-antero Djawa. Pemerintahan militer tersebut berakhir pada waktu pengembalian kedaulatan RI dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 desember 1949.

Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebabkan Indonesia menganut Konstitusi RIS (KRIS), tetapi pada tahun 1950 diubah dengan UUD Sementara (UUDS) 1950. Baik KRIS maupun UUDS 1950 sama-sama berhaluan liberal dan berprinsip supremasi sipil, sehingga tidak disukai oleh TNI. TNI merasa dikhianati

Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin, pada tanggal 25 Januari 1946 mengubah TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Di bawah Kementerian Pertahanan, dibentuk staff pendidik politik yang berwenang mendidik opsir-opsir politik untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi dan berkedudukan disamping panglima. Menteri Pertahanan juga membentuk biro perjuangan yang menandingi eksistensi TRI. Maka terjadilah dualisme antara panglima besar TRI Soedirman dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin.

Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu tentara. Dekrit tersebut disusul dengan penetapan presiden tanggal 7 Juni 1947 tentang Peresmian Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi, Amir Syarifuddin kembali mengumpulkan bekas anggota biro perjuangan dalam organisasi "TNI bagian masyarakat" dan membentuk perwira politik tentara (Pepolit) untuk mengendalikan TNI. Pada tahun 1948 Amir Syarifuddin diturunkan dari jabatan perdana menteri/ Menteri pertahanan dan digantikan oleh Mohammad Hatta. Perdana Menteri Hatta segera mengeluarkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi (Re-Ra) TNI, yang ditentang keras oleh mantan perdana menteri Amir Syarifuddin. Kemudian Amir Syarifuddin memimpin pemberontakan PKI Madiun, dan segera ditumpas oleh TNI.

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presiden RI, maka jenderal Soedirman mengumumkan perang gerilya dan Kolonel Nasution mengeluarkan instruksi markas besar komando Djawa (MBKD) No. 1/ MBKD/ 1948 tentang berlakunya pemerintahan militer se-antero Djawa. Pemerintahan militer tersebut berakhir pada waktu pengembalian kedaulatan RI dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 desember 1949.

Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebabkan Indonesia menganut Konstitusi RIS (KRIS), tetapi pada tahun 1950 diubah dengan UUD Sementara (UUDS) 1950. Baik KRIS maupun UUDS 1950 sama-sama berhaluan liberal dan berprinsip supremasi sipil, sehingga tidak disukai oleh TNI. TNI merasa dikhianati

oleh para pemimpin sipil, karena KRIS dan UUDS 1950 sama sekali tidak memberi tempat pada TNI dalam lapangan sosial-politik.

Dalam suasana kekecewaan yang mendalam, TNI mengeluarkan Doktrin Sapta Marga tanggal 5 Oktober 1951. Sementara itu, parlemen mulai membahas permasalahan internal Angkatan Darat, sehingga para pimpinan Angkatan Darat, merasa tersinggung, A. H. Nasution pemimpin demonstrasi angkatan darat, ke istana Presiden Soekarno pada tanggal 17 Oktober 1952. TNI AD menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari tangan perdana menteri Wilopo. Di samping itu, TNI AD menuduh pemimpin sipil *selfish*, korup, tidak efektif, dan tidak bertanggung jawab. Tuntutan dan tuduhan tersebut ditolak dengan tegas oleh Presiden Soekarno. Para intelektual barat menyebut peristiwa tersebut sebagai *politico military symptom* (Yahya Muhaimin : 1990)

Peristiwa 17 Oktober tersebut memperuncing perselisihan internal angkatan darat. Para perwira pro Soekarno mengambil alih pimpinan militer di beberapa daerah. Akhirnya kepala staff angkatan darat (KSAD) A.H. Nasution dipecat dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Tetapi permasalahan tetap berlarut-larut, sehingga KSAD Bambang Sugeng juga diberhentikan. Pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Bambang Sugeng, tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada TNI AD. Pemerintah diprotes, dan pelantikan Bambang Utoyo diboikot oleh TNI AD. Akibatnya, kabinet Ali Sastro Amidjoyo mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, kemudian digantikan oleh Burhanuddin Harahap. pada tanggal 7 November 1955, kabinet Burhanuddin Harahap mengangkat kembali A. H. Nasution sebagai KSAD dengan pangkat Jenderal Mayor.

Daniel S. Lev dalam *cornell papers* menyatakan bahwa KSAD A. H. Nasution mendalangi panglima-panglima lokal untuk membuat kekacauan di luar Jawa untuk menekan Presiden Soekarno agar mengeluarkan undang-undang negara

dalam keadaan bahaya perang sebagai alat dari TNI untuk menguasai politik sipil. kerusuhan-kerusuhan tersebut dimanfaatkan oleh partai sosialis indonesia (PSI) dan masyumi untuk melakukan tekanan politik terhadap Presiden Soekarno.

Kerusuhan mencapai puncaknya pada bulan maret 1957, sehingga pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat bahaya perang atau *staat van oorlog on van beleg* (SOB). SOB ini oleh Daniel S. Lev disebut sebagai *The Army's Political charter*.

SOB mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah politik berupa penjatuhan kabinet Ali Sastro Amidjoyo, penumpasan pemberontaka-pemberontakan separatis (terutama PRRI/Permesta), pembentukan dewan nasional dan golongan fungsional sebagai bagian dari dewan nasional, pengambilalihan jabatan-jabatan sipil di semua lini, perampasan perusahaan –perusahaan bekas belanda di seluruh Indonesia, dan penerapan organisasi territorial militer dengan format organisasi pemerintahan sipil. SOB menjadi landasan yuridis TNI untuk melakukan fungsi-fungsi non militer, terutama menduduki jabatan-jabatan elit politik.

Melalui Dewan Nasional, TNI AD mendesak konstituante dan Presiden Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945, karena KRIS dan UUDS 1950 terlalu menganut paham supremasi sipil. Desakan yang disertai ancaman kudeta tersebut, menyebabkan pertentangan pendapat antara Presiden dengan konstituante, sehingga akhirnya persidangan konstituante macet total. Kemacetan konstituante semakin memperkuat desakan TNI agar Presiden Soekarno segera kembali kepada UUD 1945. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tentang pembubaran konstituante, pembentukan MPR sementara, DPR sementara, DPA sementara, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Sejak dekrit Presiden 5 juli, TNI mulai menduduki posisi-posisi penting pemerintahan sipil. partai-partai politik mengkritik demokrasi terpimpin yang militeristik tersebut, tetapi TNI segera menghancurkan parpol-parpol sipil satu-

persatu, mulai dari masyumi, PSI, dan giliran berikutnya adalah PKI. Tetapi TNI tidak berhasil menghancurkan PKI, karena PKI dilindungi oleh Presiden Soekarno. Pada tahun itu juga Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dengan DPR gotong royong yang didalamnya duduk 35 orang perwakilan dari TNI. Udara politik tanah air waktu itu dikuasai oleh tiga kekuatan utama, yaitu Presiden Soekarno, TNI dan PKI. Pertarungan politik tersebut membawa Presiden Soekarno pada posisi berhadap-hadapan dengan TNI, karena Presiden tidak mau membubarkan PKI.

Senjata utama TNI dalam menyerang PKI adalah SOB, dan senjata utama PKI untuk melawan TNI adalah kewibawaan bung karno. Maka KSAD A. H. Nasution mulai menangkap tokoh-tokoh PKI tanpa seijin Soekarno. Operasi –operasi liar itu dilaporkan kepada Presiden Soekarno, sehingga pada tahun 1962 Presiden Soekarno segera mengambil langkah-langkah penting sebagai berikut:

1. Memberhentikan KSAD A.H. Nasution dari jabatannya.
2. Membentuk lembaga staff angkatan bersenjata untuk mengkoordinasi angkata darat, laut, dan udara.
3. Menyerahkan jabatan KSAD kepada Jenderal Ahmad Yani dan jabatan kepala staff angkatan bersenjata (KSAB) kepada Jenderal A.H. Nasution.
4. Memberikan jabatan menteri kepada para kepala staff angkatan dan kepala kepolisian sehingga berada langsung di bawah komando Presiden Soekarno, dan terlepas dari pengaruh dan komando A.H. Nasution .
5. Mengeluarkan keputusan presiden no. 225/plt. 1962 tentang penyatuan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian RI dalam wadah ABRI, dimana presiden Soekarno menjabat sebagai Panglima tertinggi ABRI.

Setelah mengadakan reorganisasi TNI 1962, presiden Soekarno menghapuskan undang-undang darurat no. 7 tahun 1957 tentang negara dalam keadaan darurat bahaya perang (SOB) pada tanggal 1 Mei 1963.

Pencabutan SOB menyebabkan beberapa perwira angkatan darat semakin agresif menyerang PKI dan bung karno, sementara itu KSAD A. Yani tetap setia kepada presiden Soekarno. Hal ini menimbulkan perselisihan antara kelompok Nasution dengan kelompok A. Yani. A. H. Nasution dan kelompoknya hendak menjatuhkan presiden, sedangkan A. Yani dan kelompoknya berusaha membela dan melindungi presiden, walaupun kedua jenderal tersebut sama-sama anti PKI.

Pada tahun 1964, ABRI membantu sekretariat bersama golongan karya (Sekber Golkar) untuk menandingi front nasional yang dikuasai oleh PKI, kemudian menerbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha untuk mengimbangi surat kabar Harian Rakyat milik PKI, mendirikan pusat pemberitaan angkatan bersenjata (PPAB) untuk mengimbangi kantor berita nasional "ANTARA" yang dikuasai oleh PKI, mendirikan resimen Mahasiswa (Menwa) untuk menandingi central gerakan mahasiswa indonesia (CGMI) milik PKI, ABRI juga memback-up organisasi fungsional SOKSI, MKGR dan Kosgoro untuk mengimbangi organisasi fungsional PKI.

Sementara itu, dengan dihapusnya SOB, PKI melancarkan aksi sepihak dengan mengerahkan Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat untuk melawan ABRI, tetapi PKI kalah di bidang persenjataan, sehingga akhirnya PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima disamping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri.

Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1965 Presiden Soekarno merestui pembentukan Angkatan Kelima namun ditolak oleh Angkatan Darat, sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara sangat mendukung pidato Presiden Soekarno

tersebut. Beberapa jenderal Angkatan Darat segera membentuk Dewan Jenderal untuk meng kudeta Presiden Soekarno, namun pembentukan Dewan tersebut bocor dan segera diimbangi dengan pembentukan Dewan Revolusi oleh PKI untuk menjaga segala kemungkinan apabila Dewan Jenderal melakukan kudeta. Sementara ditubuh Angkatan Darat sendiri, KSAD A. Yani tetap setia melindungi presiden Soekarno.

Akhirnya pada tanggal 30 September 1965, beberapa perwira tinggi yang terkenal setia pada Presiden Soekarno, termasuk KSAD A. Yani diculik dan dibunuh oleh sekelompok "pasukan tidak dikenal". Anehnya, beberapa pejabat penting Angkatan Darat seperti A. H. Nasution, Soeharto, Amir Machmud, M. Yusuf, Basuki Rakhmad dan M. Panggabean lolos dari pembantaian tersebut.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Soeharto menuduh bahwa PKI telah melakukan upaya kudeta dengan membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat, kemudian memerintahkan operasi pembantaian terhadap kader-kader PKI dan tokoh-tokoh masyarakat yang anti terhadap peran politik ABRI. Maejen Soeharto mengeluarkan perintah "tembak di tempat" terhadap tokoh PKI, Letkol. Untung dan D.N. Aidit. Padahal menurut *Cornell Papers*, sebulan sebelum bencana 30 September 1965 itu Maejen Soeharto menjadi wali dalam pernikahan putri Letkol. Untung di pedalaman Jawa Tengah kemudian terungkap bahwa Letkol. Untung merupakan bekas anak buah Soeharto yang paling setia sewaktu Soeharto menjabat sebagai Pangdam Diponegoro.

Tuduhan bahwa PKI merancang suatu kudeta tidak masuk akal, karena untuk menguasai Indonesia harus menguasai pulau Jawa, untuk menguasai pulau Jawa harus menguasai Jakarta, dan untuk menguasai Jakarta harus membobol pertahanan Bandung terlebih dahulu, sedangkan Bandung dikuasai dengan ketat dan kuat oleh Kodam Siliwangi, jadi CC-PKI tidak mungkin berani merancang kudeta, kecuali mendapat dukungan dan bantuan secara diam-diam dari kalangan pejabat tinggi strategis Angkatan Darat sendiri.

Demonstrasi mahasiswa angkatan 66 meledak , mereka berteriak-teriak menghujat Presiden Soekarno dan PKI dari atas *tank-tank* milik Kostrad . Angkatan Darat mendukung sepenuhnya aksi-aksi mahasiswa yang dipelopori oleh Akbar Tanjung, Abdul Gafur dan lain-lainya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Rapat kabinet tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara dikepung oleh ribuan mahasiswa dan tiga kompi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) tanpa seragam . Melihat gerombolan mahasiswa dan pasukan liar tersebut, Presiden Soekarno lari ke Istana Bogor ditemani oleh Soebandrio dari PKI. Presiden Soekarno dikejar oleh tiga Jenderal Angkatan Darat dan didesak menyerahkan kekuasaan kepada Menteri/Panglima angkatan darat Letjen Soeharto. Maka presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah sebelas maret (Supersemar) untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif tertinggi kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Supersemar merupakan tonggak awal kelahiran Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ABRI berada pada posisi praetorian, yaitu pemegang kekuasaan negara, mulai dari MPR, DPR, Presiden, Wapres, Menteri-menteri strategis, pejabat tinggi negara, pimpinan BUMN, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Walikota, Kepala Desa, bahkan Satpam-pun dikuasai oleh Angkatan Darat dan purnawirawannya.

Posisi dan organisasi ABRI selama Orde Baru banyak mendapatkan hujatan dari kalangan masyarakat maupun pihak internal ABRI sendiri. Rakyat menuntut agar Dwifungsi ABRI dihapuskan, maka seiring dengan perjalanan reformasi, sejak 5 Oktober 1998 pimpinan ABRI mulai melakukan reformasi internal berupa reposisi dan reorganisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana reposisi dan reorganisasi ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?
2. Bagaimana legitimasi proses reposisi dan reorganisasi ABRI menurut tata hukum Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Mengkaji Reposisi dan Reorganisasi ABRI dalam perspektif yuridis

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji bagaimana Reposisi dan Reorganisasi ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Mengkaji legitimasi proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI menurut Tata Hukum Indonesia

1.4 Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok disamping juga untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (Soerjono Soekanto, 1986:96). Maksudnya adalah menggambarkan secara rinci mengenai reposisi dan reorganisasi ABRI yang diakibatkan oleh sikap politik ABRI selama ini, sehingga pembahasan masalahnya dapat dikemukakan secara jelas

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku atau data-data internet yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana,

peraturan perundang-undangan, dan pernyataan pejabat yang disiarkan atau diterbitkan oleh media massa, mengenai keputusan inkonstitusional kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok penulisan, yaitu reposisi dan reorganisasi ABRI sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan inkonstitusional tersebut. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada keputusan inkonstitusional.

1.4.2 Sumber Data

Pada penulisan ini, data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder, karena penulis selain mempelajari pemberitaan media massa tentang keputusan inkonstitusional pemerintah di bidang Hankam dan dari bacaan literatur serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keputusan inkonstitusional yang berakibat adanya reposisi dan reorganisasi ABRI, juga mengadakan penelitian langsung (wawancara/interviu) kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, antara lain beberapa perwira Kodam V Brawijaya dan perwira Polda Jatim pada waktu acara Semiloka Hubungan Sipil-Militer di Banyuwangi. Selain itu penulis sering melakukan kontak person dengan pejabat-pejabat teras Kodim dan Polres Jember, terutama bagian Intelijen, yang tugasnya berkaitan erat dengan fungsi Sosial Politik ABRI.

1.4.3 Prosedur Pengambilan dan Pengolahan Data.

1. Studi Pustaka.

Yaitu pengambilan data dari buku-buku literatur Hankam, Hukum, dan sosial politik. Bahan pustaka selain buku literatur yang penulis gunakan ialah Artikel-artikel (Tulisan Lepas), Karya Tulis, Kliping Koran dan Majalah, dan Makalah-makalah seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang penulis pernah terlibat langsung di dalamnya.

2. Wawancara.

Yaitu pengumpulan data secara kontak person dengan pejabat serta instansi terkait yang dalam hal ini penulis lakukan terhadap delegasi Kodam V

Brawijaya dan Polda Jatim di Banyuwangi serta pejabat Kodim dan Polres di Jember.

3. Pernyataan Pejabat.

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari media massa yang menyiarkan pernyataan pejabat tinggi ABRI terkait dengan reposisi dan reorganisasi ABRI. Penulis menggunakan media massa cetak dan media massa elektronik.

4. Data Internet.

Penulis juga memanfaatkan teknologi canggih internet untuk berkonsultasi dan berkomunikasi melalui email dengan beberapa tokoh intelektual dan tokoh LSM yang intens mengamati perkembangan Militer di Indonesia. Misalnya: YLBHI, AJI, ELSAM, ISAI, ICHDRE, Yayasan Madani Jombang, dan lain-lainnya.

1.4.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Reposisi dan Reorganisasi ABRI yang dimaksudkan adalah langkah reformasi internal yang dilakukan oleh pimpinan ABRI sejak dikeluarkannya rumusan Paradigma Baru ABRI pada Hari Ulang Tahun ABRI ke- 53, di Markas Besar ABRI Cilangkap, Jakarta, tanggal 5 Oktober 1998

Reposisi ABRI adalah pengembalian ABRI pada posisi semula yaitu posisi pada awal-awal dibentuknya tentara reguler Indonesia. Tentara reguler yang pertama kali di bentuk di Indonesia dengan menggunakan standard militer Internasional adalah Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI dibentuk sebagai satu-satunya organisasi militer Indonesia dengan Maklumat Pemerintah 25 Januari 1946 yang mengubah Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) menjadi TRI. Panglima Besar TRI Jenderal Soedirman dalam pidato pelantikannya, pada tanggal 25 Mei 1946 menandakan posisi TRI sebagai alat pertahanan negara semata, yang tunduk pada pemerintahan sipil. Jenderal Soedirman berkata :

“ Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara memegang teguh kewajibannya ini, lagi pula, sebagai tentara, disiplin harus

dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan ikhlas mengerjakan segala yang diwajibkan. Harus diingat pula, oleh karena negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga, tunduk kepada perintah pimpinannya, inilah yang merupakan kekuatan suatu tentara” .

Tentang hakekat tentara, Jenderal Soedirman menyatakan:

“ Tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri diatas masyarakat, Tentara tidak lain dan tidak lebih dari suatu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti bagian-bagian lain, yakni tani, buruh, dan lain-lain” .

Reorganisasi ABRI adalah perombakan organisasi ABRI dan penyusunan kembali sesuai dengan awal pembentukannya sebagai tentara reguler dengan standart militer internasional, yaitu TRI.

TRI adalah organisasi militer yang terpisah dengan organisasi kepolisian, sebab kepolisian merupakan jawatan yang berada di luar struktur kementerian pertahanan. Organisasi markas tertinggi TRI dibagi menjadi dua yaitu :

1. Markas besar umum (MBU) TRI
2. Bagian militer kementerian pertahanan.

MBU TRI membawahi divisi-divisi dan dipimpin oleh Panglima Besar TRI, sedangkan Bagian Militer Kementerian Pertahanan Membawahi Brigade-brigade kelaskaran yang dikordinier oleh Biro Perjuangan. Di Kementerian Pertahanan dibentuk Staff Pendidik Politik Tentara (Pepolit) yang mendidik opsir-opsir politik untuk kemudian ditempatkan di divisi-divisi yang berkedudukan disamping panglima.

Apapun variasi dan *style* dari posisi dan organisasi tentara reguler dikemudian hari, pada intinya TRI di format dalam karangka supremasi sipil. Kajian atas reposisi dan reorganisasi ABRI ini dilakukan melalui perspektif yudiris. Sudut pandangan

hukum ini akan melihat reposisi dan reorganisasi ABRI dari kacamata hukum secara umum, baik hukum sosiologis, hukum normatif, hukum antropologis, hukum filosofis, dan sebagainya.

1.4.5. Analisa Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisa (Bambang Waluyo, 1991 : 72).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yang menguraikan data dengan jalan menuturkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul (Winarno Surachmad, 1982 : 139).

Data yang terkumpul melalui Wawancara (konsultasi) dan mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan/keputusan inkonstitusional oleh pemerintah, dianalisa sehingga lebih jelas permasalahannya, yang akhirnya dapat ditemukan jalan penyelesaiannya, kemudian dapat disimpulkan dan diberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada (Masri Singarimbun, 1989 : 64).

Maksud penentuan Metode di atas adalah agar memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah keputusan inkonstitusional yang dapat mengacaukan sistem perundang-undangan dan sistem Hankam Negara, sehingga dapat ditemukan bahasanya dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif dan diberikan saran-saran.

BAB II

FAKTA YURIDIS DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Yuridis

Secara yuridis, pokok-pokok Pertahanan Keamanan (Hankam), organisasi ABRI dan Dwi Fungsi ABRI diatur dalam beberapa ketentuan Perundang-undangan. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara mengatur hal tersebut dalam pasal (10), pasal (11), pasal (12), dan pasal (30). Pasal-pasal organik tersebut kemudian diatur dengan UU No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Di atasnya Undang-Undang tersebut, sudah ada beberapa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang mengukuhkan posisi ABRI sebagai alat penguasa dan organisasi ABRI sebagai organisasi sosial politik, sejak dari ketetapan-ketetapan MPRS Pimpinan A.H. Nasution hingga ketetapan-ketetapan MPR Era Orde Baru, dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)-nya.

Tetapi Sidang Umum MPR-RI 1998 telah menghasilkan beberapa ketetapan yang berorientasi pada tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ABRI dituntut secara moril untuk segera melakukan Reformasi internal.

Gejala-gejala Reformasi internal sudah nampak ketika pada tanggal 29 Juni 1998, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, di Gedung Dephankam/Markas Besar (MABES) ABRI Jl. Merdeka Barat Jakarta, secara sportif mengakui bahwa beberapa oknum personel ABRI patut diduga terlibat dalam kasus orang hilang. Pernyataan tersebut merupakan ekspresi lontaran hati nurani pimpinan ABRI yang merasa sudah saatnya “ Mereformasi diri “ sebelum” direformasi secara paksa oleh masyarakat. Itulah mengapa kemudian proses reformasi di tubuh ABRI lebih dikenal dengan nama “Reformasi Internal”.

Sejak saat itu, ABRI mulai mengeluarkan keputusan-keputusan yang reformis seperti penghapusan Jabatan Kepala Staff Sosial dan Politik (Kassospol) ABRI untuk kemudian diganti menjadi kepala staf teritorial (Kaster), mengadili para penculik mahasiswa, pengakuan dosa TNI lewat forum-forum sipil sepanjang Mei 1999, pengurangan anggota ABRI di DPR dan sebagainya. Tetapi fakta yuridis yang paling monumental adalah pemisahan Polri dari ABRI dengan penggantian istilah ABRI menjadi TNI.

2.1.1 Pengumuman Rencana Pemisahan POLRI-ABRI, 5 Oktober 1998

Kolom Jati Diri pada Harian Jawa Pos, 5 Oktober 1998 menulis bahwa hari ini bersamaan dengan Peringatan HUT ABRI, Pangab Jendral TNI Wiranto akan mengumumkan pemisahan Polisi dari ABRI. Setelah itu mulai tahun depan, Kepolisian berada di bawah Dephankam. Sebagai institusi Penyidik Tunggal, kepolisian harus otonom, bebas dari kepentingan dan campur tangan instansi lain, termasuk dari jajaran ABRI.

2.1.2 Pengumuman Pemisahan POLRI-ABRI, 5 Oktober 1998

Harian Surya tanggal 1 April 1999 memberitakan bahwa Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto menyatakan bersamaan dengan pemisahan Polri dari ABRI yang dilaksanakan mulai 1 April 1999, pimpinan ABRI menyampaikan "saran" kepada Presiden B.J.Habibie untuk mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2.1.3 Komentar Karni Ilyas Tentang Pemisahan POLRI-ABRI, 18 April 1999

Terkait dengan upacara pemisahan Polri dengan ABRI pada tanggal 1 April 1999, Karni Ilyas, dalam kolom Catatan Hukum Forum Keadilan, No.02, 18 April 1999 menyatakan bahwa pekan lalu, warga sipil mendapat tambahan anggota keluarga baru. Atau, bisa juga dikatakan anggota keluarga lama yang kembali ke "asalnya", yaitu Polisi. Dengan penyerahan Patoka Polri oleh Kepala Staff Umum (Kasum) ABRI, Letjen. Soegiono, kepada Sekjen Dephankam, Letjen Fachrul Razi, resmilah polisi - yang sejak orde baru "nyasar" menjadi ABRI - kembali ke warga sipil.

2.1.4 Penggunaan Istilah TNI Oleh Kasster dan Asrenum Panglima TNI, 25-26 Mei 1999

Harian Kompas secara berturut-turut, pada tanggal 25 Mei dan 26 Mei 1999 memberitakan pernyataan 2 orang perwira tinggi ABRI yang sudah menggunakan istilah "TNF". Kepala Staff Territorial (Kaster) TNI, Letjen. TNI Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 25 Mei 1999 menyatakan bahwa siapapun nanti yang akan terpilih secara demokratis dan Jurdil, TNI akan hormat dan tunduk. Jadi TNI akan menerima kepemimpinan pemerintahan baru.

Sementara itu dalam pemberitaan Kompas Edisi 26 Mei 1999, Asrenum Panglima TNI, Mayjen. agus Wirahadikusumah menyatakan bahwa Reformasi Internal TNI bukanlah sekedar pernyataan politik, namun dilakukan secara sungguh-sungguh.

2.1.5 Materi UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankam Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan Reorganisasi ABRI 1998/1999

UU No.20 tahun 1982 pasal (1) memberikan ketentuan umum tentang ABRI, terutama ayat (9), (15) dan (17).

UU No. 20 Tahun 1982 pasal 1 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :

"Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib adalah warga negara yang diikutsertakan secara wajib dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".

UU No 20 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (15) berbunyi sebagai berikut :

"Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".

UU No 20 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (17) berbunyi sebagai berikut :

"Panglima Angkatan Bersenjata adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

UU No 20 Tahun 1982 Pasal (12) mengatur tentang fungsi Hankam, yang berbunyi sebagai berikut:

“Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri, serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara”.

UU No 20 Tahun 1982 Pasal (21) mengatur tentang keanggotaan ABRI, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh secara :

- a. Sukarela, dari anggota rakyat terlatih yang memenuhi persyaratan;
- b. Wajib, dari anggota rakyat terlatih yang diperlukan kemampuan dan keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang anggota Angkatan Bersenjata sukarela dan anggota Angkatan Bersenjata Wajib masing-masing diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

UU No 20 Tahun 1982 Pasal (26) berbunyi sebagai berikut :

“Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial”.

UU No 20 Tahun 1982 pasal (29) mengatur tentang unsur-unsur Angkatan Bersenjata yang terdiri atas :

- a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya;
- b. Tentara Nasional Indoensia Angkatan Laut beserta cadangannya;
- c. Tentara Nasional Indoensia Angkatan Udara beserta cadangannya;
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - undang No. 20 Tahun 1982 tidak memuat ketentuan bahwa Menhankam / Pangab boleh membuat langkah-langkah reorganisasi di luar ketentuan Undang-undang ini, hal tersebut tercermin dalam bab-bab ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

2.1.6 Materi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan Reorganisasi ABRI Tahun 1998/1999

UU No.28 tahun 1997 Pasal (7) menyatakan bahwa susunan organisasi dan tata kerja POLRI diatur oleh Panglima ABRI.

UU No 28 Tahun 1997 Pasal (8) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas POLRI, Presiden dibantu oleh Menhankam dan Panglima ABRI.

UU No 28 Tahun 1997 Pasal (9) menyatakan bahwa dalam hal Pembinaan kemampuan POLRI, Kapolri bertanggung jawab kepada Panglima ABRI.

UU No 28 Tahun 1997 Pasal (11) menyatakan bahwa Pembinaan kemampuan profesi POLRI diatur dengan Keputusan Panglima ABRI.

UU No 28 Tahun 1997 pasal (27) Jelas-jelas menyatakan bahwa dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, POLRI dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur ABRI lainnya dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7 Materi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Yang Berkaitan Dengan Keputusan Reposisi Dan Reorganisasi ABRI 1998/1999

UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer ternyata bukan hanya mengatur tentang Pengadilan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, tetapi juga seluruh komponen Dephankam dan ABRI, termasuk POLRI. Undang-undang tersebut secara gamblang dan jelas mengatur tentang sistem Peradilan di seluruh jajaran Dephankam dan ABRI, walaupun nama undang-undangnya adalah "Peradilan Militer". Jadi unsur Non-Militer (Polisi, dll) juga diatur dalam UU ini. Dan UU ini belum dihapus hingga sekarang.

2.2 Landasan Teoritik

Landasan Teoritik adalah Pisau analisis yang akan digunakan untuk membedah, mengklasifikasikan, dan meramu kembali data-data yang didapatkan

dalam sebuah penelitian ilmiah. Oleh karena itu landasan teoritik harus betul-betul tajam dan komprehensif sehingga relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Dalam meninjau reposisi dan reorganisasi ABRI, penulis melihat dari kacamata politik, hukum, dan militer. Maka penulis menguraikan terlebih dahulu teori-teori dasar tentang kekuasaan, kemiliteran, kepolisian, dan Perundang-undang.

2.2.1 *Cyclus Polybios*

Teori kekuasaan klasik menunjukkan bahwa terjadi siklus kekuasaan secara alamiah dalam masyarakat. Teori tersebut dikenal sebagai *Cyclus Polybios*. Menurut Teori *Cyclus polybios*, pada permulaannya, suatu masyarakat masih tumbuh secara tidak teratur, chaos, dan anarkhi. terjadi kondisi *Homo homini Lupus*, yang kuat menindas yang lemah, yang banyak pengikutnya menyerang yang sedikit pengikutnya. Dari masyarakat yang sederhana itu tampillah seorang yang unggul dan berani, lalu menundukkan semua orang, serta mengaturnya dalam suatu tata tertib bermasyarakat. Orang tersebut menjalankan kekuasaan untuk kepentingan orang banyak, dan disebut *MONARCH*, sistem kekuasaannya disebut *Monarchie*.

Setelah sekian lama berkuasa, sang *Monarch* ditimpa oleh Adagium *The Power Attends to Corrupts*. Sang *Monarch* mulai tergoda nafsu kemewahan dan kegagahan. sang *Monarch* menjadi angkuh dan tidak lagi menjalankan kekuasaan untuk kepentingan semua orang. Sang *Monarch* menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk kepentingan diri sendiri. Sang *Monarch* menjelma menjadi diktator, dengan sistem kekuasaan otokrasi, dan biasa dikenal sebagai *Tyrani*. *Tyrani* adalah pemerintahan negara yang dipegang oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.

Rakyat menjadi marah dan dendam kepada Sang *Tyran*, terutama kalangan cendekiawan, bangsawan istana, dan tokoh masyarakat yang merasa tidak diikutkan dalam proses pengambilan kebijakan. Akhirnya kalangan cendekiawan, bangsawan, dan tokoh masyarakat yang biasa dikenal dengan sebutan *Aristoi* menggulingkan Sang *Tyran*, kemudian memegang kekuasaan secara bersama-sama. Sistem kekuasaannya disebut aristokrasi, yaitu kekuasaan negara di tangan sejumlah kecil

rakyat yang merupakan orang-orang yang terbaik dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang.

Setelah berjalan lama, para Aristoi dan keturunannya mulai menyeleweng, dan menjalankan kekuasaan demi kepentingan keluarga dan kroni-kroninya. Sistem kekuasaan ini disebut Oligarchie, yaitu kekuasaan negara yang dipegang oleh beberapa orang yang menjalankan kekuasaan secara bersama-sama untuk kepentingan orang-orang itu sendiri.

Rakyat kembali marah, kemudian bergerak mengadakan revolusi umum menuju pemerintahan yang dipegang sendiri oleh orang banyak (seluruh rakyat) secara bersama-sama. Pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem kekuasaan ini disebut Demokrasi, yaitu suatu pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar rakyat dan menjalankan kekuasaan itu demi kepentingan semua orang.

Sistem Demokrasi dalam perjalanannya menjadi terlalu bebas dan terbuka, sehingga kehidupan masyarakat tidak bisa dikendalikan lagi, kerusuhan terjadi di mana-mana. Muncul kompetisi destruktif antar elite politik yang berebut pengaruh dengan segala cara. Keadaan negara menjadi chaos dan berpuncak kepada suasana anarkhis. Masyarakat kembali pada kondisi Homo Homini Lupus.

Pada saat situasi chaos dan kondisi anarkhis akibat Demokrasi yang berlebihan itulah kembali lahir seorang kuat (The Strong Military Man/The Man Behind The Gun) yang memang dibutuhkan masyarakat dan dianggap mampu menguasai negara. Orang tersebut merebut pimpinan negara serta menjalankan kekuasaan untuk orang banyak. Kebangkitan orang kuat (Monarch) untuk kedua kalinya ini biasanya berasal dari kalangan militer dan sama dengan teori awal, Monarchie ini akan menyeleweng lagi menjadi Tyrani, dan begitu seterusnya. Laksana perputaran sebuah cyclus.

2.2.2 Konsepsi Dasar Kemiliteran Dan Kepolisian

Militer yang biasanya tampil sebagai penguasa pemerintahan pada saat situasi chaos dan kondisi anarkhis, secara terminologi berasal dari kata Perancis, L'Armeea

de La Terre, yang artinya bala tentara darat. Jadi, militer semula bermakna tentara darat atau Angkatan Darat, tetapi kini militer berarti segala hal yang bersangkutan dengan :

1. Angkatan bersenjata suatu negara.
2. Komunitas militer pada umumnya.
3. Pertahanan dan keamanan suatu negara (Hassan Shadily : 1990).

Berkaitan dengan militer, kita harus membedakan antara militer dengan milisi, Hukum Militer dengan Pemerintahan Militer, Pemerintahan Militer dengan Militerisme, dan Pemerintahan Militer dengan Junta. Kita juga harus mengetahui perbedaan keadaan bahaya dengan keadaan darurat.

Milisi adalah pasukan militer yang terdiri dari penduduk sipil yang dibentuk dalam keadaan darurat, pertama kali di Inggris pada sekitar tahun 1590. Gagasan dasar Milisi adalah bahwa setiap orang merdeka mempunyai hak dan kewajiban mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan, Hukum, dan ketertiban Nasional. Dalam konteks kekinian kita bisa membedakan antara militer intervert , militer TNI, dengan milisi falintil, Fretilin, Aitarak, dan Besi merah Putih di Timor-timur.

Hukum Militer adalah suatu sistem yurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan Bersenjata serta penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Hukum Militer terdiri dari Hukum Keadaan Perang (SOB), Pelaksanaan Yurisdiksi Militer atas kesatuan-kesatuan Militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai, dan pemerintahan militer. Sedangkan Pemerintahan militer adalah pelaksanaan yurisdiksi militer di suatu daerah atau daerah pendudukan, baik secara langsung oleh orang-orang militer maupun secara tidak langsung oleh orang-orang sipil yang diangkat oleh pemegang kekuasaan militer. Berbeda dengan militerisme yang berarti Tata Nilai yang mengagungkan sifat-sifat prajurit, loyalitas, patriotisme, disiplin, keberanian dan kekuatan fisik di atas sifat-sifat warga negara sipil yang individualisme, humanisme, intelektual, kreatif dan artistik. Jadi militerisme tidak sama dengan pemerintahan militer, juga

tidak sama dengan junta. Junta adalah suatu pemerintahan militer, terutama dikatakan jika kekuasaan pemerintahan negara dipusatkan dalam tangan sekelompok kecil petinggi militer (Hassan Shadily : 1990).

Keadaan bahaya adalah suatu keadaan Hukum dimana penguasa militer dapat melakukan sejumlah tindakan, demi untuk menjaga dan mempertahankan keamanan di dalam dan di luar negara, dalam keadaan yang dianggap darurat (luar biasa). Sedangkan keadaan darurat adalah keadaan negara yang membahayakan atau menguatkirkan yaitu mara bahaya, huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya (Hassan Shadily : 1990).

Militer negara berkembang secara ideologis dan institusional sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Para perwira negara berkembang belajar di Amerika Serikat dan kemudian mengadopsi ide-ide dan memodifikasi dengan bantuan orang sipil, sesuai dengan kondisi negaranya sendiri dan akhirnya muncullah ideologi atau doktrin militer setempat.

Sekolah Staff dan Komando Militer di negara-negara berkembang, yang sangat terpolakan oleh US Military Assistance Missions, telah mengembangkan sebuah ideologi keamanan dan pembangunan Nasional yang sangat terinci. Menurut Ideologi ini negara-negara komunis dan negara-negara Non-komunis di dunia telah terlibat dalam perang semesta atau Total War. Dalam perang ini musuh bukanlah pihak yang berasal dari luar melainkan musuh itu berada di halaman sendiri dan siap menerkam negara dari dalam, misalnya bahaya laten komunis, organisasi tanpa bentuk (OTB) dan lain-lainnya. Strategi yang dibutuhkan untuk memenangkan perang semesta ini pertama adalah persatuan, kemauan dan kapasitas produktif dari seluruh negara, sehingga kunci utama dari strategi ini adalah saling keterkaitan antara keamanan nasional dan pembangunan Nasional. Hari-hari dimana profesionalisme lama, ahli bertempur dan ahli mempergunakan senjata telah ditinggalkan. Prajurit profesional baru, terlatih untuk bertempur dalam perang semesta melawan musuh dari dalam negeri sendiri, baik dari sektor militer, sosial, ekonomi, maupun pada politik. Karena para pemimpin sipil tidak memiliki ketrampilan dan organisasi yang

disyaratkan untuk memenangkan perang baru ini, maka kemudian para prajurit profesional baru ini memegang kontrol terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, memacu pembangunan sosio-ekonomi, dan meraih kemenangan secara mulia atas musuh-musuh yang mengancam negara. Brazil adalah negara pertama yang menjadi ujian untuk menerapkan ideologi ini. Namun reformasi itu gagal total. Total War yang merupakan bagian dari perang dingin ini sesungguhnya juga dianut oleh tentara di Indonesia (Th. Sumartana : 1999).

Militer non-barat sering menganggap bahwa ia merupakan golongan yang paling modern, dan menganggap organisasi yang paling mampu dan canggih dalam masyarakat. Keinginan untuk campur tangan terhadap urusan-urusan sipil diperkuat oleh keyakinan bahwa mereka, sebagai perwira yang cakap dan efisien, dapat memerintah lebih baik daripada orang-orang sipil (Eric A. Nordlinger : 1994).

Sedangkan Polisi, merupakan badan sipil sebagai bagian eksekutif, yang bertugas memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada pribadi dan harta milik dari tindakan di luar Hukum. Kesatuan Polisi modern pada umumnya berasal dari Polisi Metropolitan yang dibentuk di London oleh Sir Robert Peel pada tahun 1829.

Badan-badan kepolisian biasanya terdiri dari dinas pengawasan keselamatan negara, Reserse Kriminal, Polisi Perairan, Polisi Lalu Lintas, Brigade Mobil, dan Polisi Perintis. Jadi Polisi berbeda dengan Militer maupun Angkatan Bersenjata Nasional. Kalau militer bergerak di sektor negara, Polisi bergerak di sektor masyarakat. Tetapi Polisi Indonesia pada tahun 1964, dijadikan Angkatan Kepolisian RI (AKRI) sebagai bagian dari ABRI dan Dephankam (Hassan Shadily : 1990).

2.2.3 Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Tertib Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan Hukum serta tempat diketemukannya aturan Hukum. Ada 2 macam Sumber Tertib Hukum, yaitu Sumber Tertib Hukum Materiil, dan Sumber Tertib Hukum Formal. Sumber Tertib Hukum Materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari Aturan-aturan Hukum, seperti Sumber Historis, Sumber

Sosiologis/Antropologis, dan Sumber Filosofis. Sumber tertib Hukum Formai adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada, seperti UU, Konvensi, Yurisprudensi, dan Doktrin.

Tata urutan peraturan perundangan RI menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tersusun sebagai berikut :

A. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan :

1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 ialah sebagai berikut:

UUD RI 1945 ,

Ketetapan MPR,

Undang-undang /Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ,

Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden,

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti :

- Peraturan Menteri,
- Instruksi Menteri,
- dan lain-lainnya.

2. Sesuai dengan sistem Konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan autentik UUD 1945, UUD Republik Indonesia 1945 adalah bentuk Peraturan Perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan dalam negara.

3. Sesuai pula dengan prinsip negara Hukum, maka setiap Peraturan Perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.

B.1. Undang-Undang Dasar.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden.

2. Ketetapan MPR

- a. TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang.
- b. TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan Keppres.

3. Undang-undang

- a. UU adalah untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR.
- b. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti Undang-undang.
 - 1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya.
 - 2) Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka Peraturan Pemerintah harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang.

5. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (Einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, TAP MPR dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri (Permen), Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Dalam praktek masih dikenal adanya Instruksi Menteri, Surat Menteri, Surat Keputusan Menteri. Dalam pada itu berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dikenal adanya Peraturan Daerah (Tingkat I dan II) dan Keputusan Kepala Daerah (Tingkat I dan II).

Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu UU No.22 tahun 1999 juga mengenal Peraturan Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) dan Keputusan Kepala Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota). Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala daerah bersama DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten atau DPRD Kota.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Terhadap Eksistensi, Posisi, dan Organisasi ABRI

Peranan dan sepak terjang Militer sejak masa Demokrasi terpimpin hingga masa Orde baru mendapat banyak sorotan negatif dari masyarakat, baik kalangan sipil maupun kalangan senior ABRI sendiri. ABRI khususnya TNI-AD memang tampil terlalu ambisius dan arrogant dalam mengintervensi kehidupan politik sipil.

Bahkan dari dalam tubuh ABRI sendiri, timbul banyak keluhan dan protes terhadap peran dan sepak terjang ABRI selama ini. Secara psikologis, ABRI Non Angkatan Darat merasa dianaktirikan dalam pelaksanaan dwifungsi ABRI, terutama Instansi Kepolisian yang tidak seharusnya masuk dalam jajaran Angkatan bersenjata nasional itu. Polisi selama ini mengeluh karena selalu diintervensi oleh “saudara tua”-nya yang berbaju tentara dalam melakukan tugas-tugas Kepolisian, Anggarannya didikte Angkatan lain, bahkan jatah-jatah latihan dan beasiswa luar negeri selalu dirampas Angkatan lain (Karni Ilyas: 1999). Akibat kedekatannya dengan militer, Polisi selama ini bersikap sebagai sosok yang berkuasa terhadap rakyat, bukan pelindung dan pengayom masyarakat sipil. Karena beratribut ABRI, Polisi selama ini terkesan sebagai aparat yang atas nama hukum berhak untuk bertindak apa saja. Selama 3 Dasawarsa Polisi bergabung dengan Militer telah terjadi suatu Involusi yang didalamnya “Polisi menjadi berwatak militer” dan “Militer jadi berwatak Polisi”. Polisi juga menjadi kekurangan fasilitas, karena diatur oleh Mabes ABRI. Padahal Kepolisian Indonesia termasuk salah satu yang sangat miskin di dunia. Dibanding dengan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Selandia baru, Singapura, Hongkong, Jepang, Pakistan dan Thailand, Anggaran negara untuk Polisi Indonesia tergolong terendah. Bahkan dari segi yang paling vital, yaitu doktrin, Tri Brata POLRI hanya boleh dipakai untuk keperluan Internal Kepolisian, sedangkan yang umum

berlaku adalah Sapta Marga. Padahal Sapta Marga adalah doktrinnya Angkatan Darat . Hari jadi ABRI diperingati pada tanggal 5 Oktober tiap tahun, padahal itu adalah hari jadi Tentara. Dan masih banyak diskriminasi lainnya yang dilakukan oleh TNI-AD terhadap terhadap angkatan lainnya di tubuh ABRI.

Kapolda Jawa Timur dalam semiloka di Banyuwangi tahun 1998 menyatakan bahwa setelah menyatu dengan ABRI , polisi menjadi bagian dari Angkatan Perang, sistem pembinaan militer tersebut paling tidak mempunyai pengaruh dalam pembentukan perilaku POLRI yang keras di lapangan. Tidak terhitung keluhan masyarakat , terutama kalangan bawah, yang keluarganya atau dia sendiri berurusan dengan Polisi. Masyarakat bercita-cita POLRI menjadi institusi sipil yang mandiri dan demokratis, sebab sebetulnya kepolisian itu adalah sebuah jawatan sipil, sebuah birokrasi sipil, bukan Angkatan Perang yang serba kaku dan kasar. POLRI tidak bisa menjalankan fungsi utamanya selama berada di dalam tubuh ABRI (Sayidiman Soeryohadiprodo : 1999).

Selain tumpang tindih dengan TNI-AD , peran POLRI sebagai penyidik tunggal selama ini terberai akibat kelahiran berbagai UU, misalnya UU kelautan, yang memberikan hak penyidikan atas kasus-kasus pelanggaran Hukum yang terjadi di laut kepada TNI-Angkatan Laut (Adrianus Meliala : 1999). Oleh karena itu sebagai penyidik tunggal, kepolisian harus otonom. Bebas dari kepentingan dan campur tangan instansi lain, termasuk dari jajaran ABRI. Sebetulnya pada awal-awal kemerdekaan, kepolisian terpisah dari Angkatan Perang, yaitu dipimpin langsung secara otonom oleh Menteri Kepolisian, tetapi pada tahun 1962 kepolisian dijadikan AKRI, dan pada tahun 1964 dijadika Polri, yang berada di bawah naungan ABRI.

Polisi selalu dihadapkan pada konflik kepentingan ketika harus menyidik perkara yang melibatkan oknum dan instansi militer tertentu. Jika sebuah perkara melibatkan oknum militer tertentu, kepolisian sering hanya terima jadinya. Artinya proses penyidikan perkara dilakukan instansi lain yang di kalangan LSM dikenal dengan instansi *Ekstra Judicial* (bukan instansi yang berwenang melakukan penyidikan perkara). Pada perkara yang berupa tindak pidana politik, yang mengawali proses

penyidikan dan penangkapan bukan Polisi. Polisi tinggal membuat surat penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarganya tanpa Polisi sendiri pernah melakukan penangkapan. Tragisnya, setelah itu Polisi dipaksa, atau paling tidak sudah tahu sama tahu, untuk mengumumkan bahwa Polisi telah melakukan penangkapan. contohnya terlihat pada kasus penangkapan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Andi Arief dan aktivis Buruh Perempuan Marsinah.

Menurut standar Internasional, Polisi tidak berada di bawah Struktur Angkatan Bersenjata, ataupun Struktur Departemen Pertahanan. Polisi seharusnya diposisikan sebagai Aparat Sipil yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, atau kalau tidak, Polisi dapat berdiri sendiri menjadi Departemen Kepolisian.

Sedangkan TNI sendiri, sejak memosisikan dirinya sebagai kekuatan Sosial-Politik di samping kekuatan Hankam, terutama sejak mengubah organisasinya menjadi ABRI, tidak henti-hentinya mendapat hujatan, kritik, dan caci maki dari kalangan masyarakat.

Apapun alasannya, Dwifungsi dan karya ABRI gagal memenuhi janjinya, perwira ABRI ternyata tidak handal sebagai Manajer Perubahan Sosial. Kelemahan pokok Dwifungsi dan karya ABRI adalah ketidakmampuan mengembangkan kaitan kelembagaan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Kaitan kelembagaan yang dibangun melalui Golongan Karya ternyata sangat rentan. Sebabnya, antara lain, Golkar memang tidak dipersiapkan menjadi parpol yang menyuarakan kepentingan bawah. Partai itu hanya dimaksudkan untuk menjamin dukungan bagi pemerintah melalui Pemilu (Mochtar Mas' oed : 1998).

Para perwira tidak memiliki fleksibilitas dan kesabaran dalam melakukan bargaining politik secara Demokratis, yang sering mengharuskan kesediaan untuk berkompromi serta saling memberi dan menerima. Para perwira juga sulit menolak godaan yang muncul atas pemilikan kekuasaan yang tidak *akuntabel*. Para perwira tidak bisa (tidak berusaha) mengelak dari penyakit pokok Orde Baru, yaitu Korupsi Politik. Yaitu suatu kebiasaan bahwa setiap pejabat menggunakan wewenang jabatannya bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga

“teman seperjuangannya”. Ketidaksabaran para perwira teruji dalam pengalaman Politik Indonesia yang penuh kekerasan sejak akhir 1950-an, di bawah Rezim Soekarno maupun Soeharto, yang kedua-duanya didukung oleh ABRI. Ini membuktikan bahwa keterlibatan tentara dalam politik telah mengganggu Perkembangan demokrasi, yang walaupun terbata-bata masih lebih baik daripada otoriterisme. Ringkasnya, kredibilitas ABRI sebagai pelaku politik yang tidak partisan, sebagai *The Guardian of The Nation*, sudah runtuh. ABRI sudah terkena diskualifikasi dalam permainan Demokratisasi. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.

Pada tanggal 21 Agustus 1999, Kaster TNI Soesilo Bambang Yoedhoyono menyatakan, “ TNI pernah mengalami sebagai alat negara, alat pemerintah, dan alat kekuasaan itu perlu diperbaiki. Kami adalah Bhayangkari Negara”

Memang sejak peristiwa malapetaka 15 Januari (Malari) 1974, ABRI betul-betul menjadi alat penguasa, dan selalu melakukan kebijakan represif sehingga nasibnya terpuruk. Kita lihat saja dunia Intelijen Indonesia kacau sekali, sebab dibentuk dan diorganisir sesuai dengan kebutuhan penguasa. sebelum Orde Baru, organisasi intelijen dan operasionalisasinya lebih demokratis, dalam arti dilaksanakan secara fungsional. Intelijen untuk Keamanan Negara atau Intelijen Negatif (*Counter Intelligence*) dilaksanakan penuh oleh POLRI dalam wadah Dinas Pengamanan Keselamatan Negara (DPKN). Sedangkan Intelijen yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Lapangan Intelijen Angkatan Darat, Laut, dan Udara mengarah pada Profesionalisme Intelijen Tempur atau *Combat Intelligence*, yang tentu saja mempunyai akses erat dengan Intelijen Positif Badan Pelaksana Intelijen (BPI). Karena itu daya tempur Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara relatif tinggi berkat dukungan *Combat Intelligence* yang solid dan profesional. Ini dibuktikan dengan kemampuan TNI menumpas setiap kekuatan separatis dimanapun mereka berada. Kehebatan itu, setelah zaman Orde Baru tidak tampak lagi, padahal lebih dari 90 % kekuatan TNI terdidik secara profesional dan terarah, itu karena kekuatan Intelijen ABRI tidak tercurah pada profesionalisme *Combat Intelligence*. Intelijen ABRI di era Orde Baru lebih banyak mengurus orang-orang yang dianggap ekstrim (ekstrim kanan/ekstrim kiri). Maka daya

dukung Intelijen untuk kekuatan tempur tidak terlalu tajam. Pertempuran Timor-timur dapat menggambarkan pernyataan itu. Kegagalan utama Intelijen Indonesia adalah karena semua orang intel ingin menjadi Polisi Rahasia. Mereka menikmati tugas Polisi. Kalau hal itu tidak diluruskan, sampai kapanpun kejadian seperti di Aceh, Irian Jaya, Ambon, Sambas dan Timor-timur tidak akan dapat terselesaikan secara tuntas.

Dunia Intelijen kita terkena imbas ideologi/doktrin "*Total War*" yang ditanamkan oleh Amerika Serikat kepada Militer Negara Berkembang. Oleh karena itu, hampir tidak ada segi kehidupan di negeri ini yang luput dari sentuhan ABRI. ABRI bisa segala-galanya, kecuali menjaga keamanan. Dwifungsi ABRI banyak diyakini telah menjadi jalan pintas bagi mulusnya ABRI meluncur di dunia bisnis. ABRI dapat leluasa menciptakan dan mempengaruhi beleid pemerintahan di bidang ekonomi. Di sinilah mereka bermain dengan kekuasaan politiknya yang sangat besar. Dalam perjalanan bisnisnya, ABRI banyak berkongsi dengan pengusaha Non-Pribumi. Berbisnis dengan ABRI kemudian menjadi trend untuk melaju di jalur bisnis "bebas hambatan". Walaupun tidak terlibat langsung, anggota ABRI cukup mendapat upeti dengan imbal jasa perlindungan (*Sleeping Partner*).

Pada tahun 1998, Mantan KSAD Kemal Idris menyatakan bahwa ABRI berbisnis itu ide Soeharto, ABRI berbisnis *is wrong. No Politic, No Economy*. Bisnis ABRI, menurut Indria Samego, lebih banyak menguntungkan mereka yang terlibat langsung, bukan kepada institusinya. Perwira hidup dengan rumah mewah, main Golf, anak sekolah di Luar Negeri, padahal gajinya kecil. Gaji Jenderal tidak sampai Rp. 1.000.000,-. Di ABRI, perbedaan antar tingkat hanya puluhan ribu saja. Antara Bintang Satu dengan Bintang Dua bedanya hanya Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Tetapi *Dana Non Budgetter* dari Pemerintah untuk ABRI sangat besar. Para Danrem baru saja, mendapat *Cherokee*. Di jaman Soeharto, *Uang Non Budgetter* itu sebagai instrumen untuk mengendalikan ABRI. Hal itu terjadi karena kekuasaan ABRI tidak terkontrol.

Anggaran, personil, dan persenjataan ABRI sangat minim dibanding negara – negara lainnya, sehingga perlu dipertanyakan apakah TNI Angkatan Laut, Angkatan

Udara, dan Angkatan Darat mampu menjaga Indonesia. Demi masa depan keamanan negara, Indonesia perlu berpikir serius soal kekuatan militer ABRI, bukan malah kekuatan politiknya. Kita bisa lihat perbandingan kekuatan militer dengan negara tetangga pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tabel Kekuatan Militer Beberapa Negara ASIA

Negara	Tentara	Tank	Pesawat	Kapal	Rudal	Missil
Cina	2.840.000	10.900	5910	975	14	60
Vietnam	492.000	1.900	223	55		
Indonesia	461.000	305	126	44		
Thailand	266.000	763	220	62		
Singapura	70.000	350	75	26		
Philipina	110.500	41	155	44		
Malaysia	111.500	26	105	37		

Sumber : ISSR 1997/1998

Dari data di atas, perlengkapan militer Indonesia tersebut banyak mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan Perancis. Sepanjang tahun 1975 – 1997 Amerika telah memberikan bantuan perlengkapan militer sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Bantuan Perlengkapan Militer Amerika Serikat Kepada Indonesia Periode 1975 – 1997.

Perlengkapan	Jenis	Jumlah
Pesawat Militer	Pengintai, Tempur, Penyergap, Transport Militer, Anti Pemberontak, transport Serba Guna, Latih T-34, Latih Cessna, Transport Cessna.	235 unit
Senjata Peledak	Peluru Kendali (Rudal)	268 buah
Pesawat Boeing Militer	Jetfoil	5 buah
Pesawat Freegat	Kelas Claude Jones (Avondale Industries)	4 buah

Transportasi darat Militer	Kendaraan lapis baja	402 buah
Perlengkapan lainnya	Senjata ringan/Amunisi	puluhan ribu

Sumber : Dephankam RI

Tabloid Mingguan ADIL

Dengan kualitas dan kuantitas kekuatan militer ABRI yang begitu minim, maka tidak relevan lagi bila ABRI terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan non-militer. Bagi masyarakat sipil sendiri, kehadiran militer di kancah pertarungan perpolitikan sipil merupakan suatu hal yang pantas dicermati. Karena perpolitikan sipil adalah politik yang mengembangkan budaya egaliter dalam “frame” Demokrasi Pluralistik, yang lazimnya tidak biasa dimainkan militer. Oleh karena itu beberapa tokoh Intelektual Sipil mengemukakan sekian alasan kenapa Dwifungsi ABRI harus dihapuskan atau dikurangi.

Muhammad Asfar (FISIP Unair), dalam Jawa Pos edisi 6 Oktober 1998 mengemukakan tiga alasan :

1. Tingkat Modernisasi dan perkembangan masyarakat menuntut ruang yang lebih luas bagi kelompok-kelompok sipil untuk terlibat dalam proses politik dan posisi politis yang selama ini dipersepsi sebagai hak paten ABRI.
2. Pengalaman selama Orba menunjukkan, selalu terjadi distorsi dalam implementasi konsep Dwifungsi ABRI.
3. Pada tingkat global, ada indikasi kuat keterlibatan militer dalam dunia politik tidak lagi *favourable* di mata dunia Internasional.

Moch. Mahfud MD menyatakan alasan yang senada, yaitu :

1. Over Representation
Perwakilan ABRI di Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat melebihi jumlah yang proporsional sehingga dirasakan kurang adil. Untuk keanggotaan di DPR misalnya, Over Representation itu tampak sangat mencolok. Dari 500 anggota DPR, yang 100 orang adalah dari ABRI aktif yang diangkat tidak melalui pemilihan; sedangkan yang 400 orang dipilih dengan rasio antara jumlah pemilih dan satu kursi adalah 400.000 : 1. Ini berarti bahwa setiap orang sipil (termasuk

Purnawirawan ABRI), untuk menjadi anggota DPR harus didukung oleh 400.000 orang pemilih. Jika ratio untuk orang sipil itu diberlakukan bagi ABRI, seharusnya ABRI memiliki wakil tidak sampai 3 orang. Fenomena Over Representation ini tampak pula pada posisi-posisi tertentu di lingkungan eksekutif. Data tentang asal instansi Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia pada bulan Maret 1994, sebagaimana dilakukan Harian Republika menunjukkan perbandingan 43 % ABRI dan 57 % Sipil.

2. Superioritas Militer.

Militer mempunyai perasaan atau opini bahwa mereka lebih unggul daripada sipil. Hal ini menimbulkan dominasi dan arrogansi militer dalam percaturan politik Indonesia. (Moch.Mahfud MD, 1999 : 102)

Sementara itu peneliti LIPI, Indria Samiego mengemukakan beberapa alasan, antara lain:

1. Pendekatan keamanan terlalu kuat, sehingga masyarakat kurang dinamis. Siapa berani berbeda dengan pemerintah /ABRI akan dituduh Subversif, ekstrim, atau komunis. Pemerintah /ABRI dengan mudah menjatuhkan sanksi terhadap mereka tanpa suatu proses pengadilan.
2. Campur tangan pihak militer /ABRI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan sosial politik maupun sosial ekonomi, mengakibatkan kecenderungan semakin rumit dan berlarut-larutnya konflik-konflik yang timbul di kalangan masyarakat. Dalam kaitan ini yang paling aktual adalah intervensi ABRI dalam persoalan internal yang dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
3. Campur tangan ABRI yang terlalu jauh di bidang Hukum, sebagaimana yang disoroti oleh sejumlah tokoh masyarakat di berbagai daerah, mengakibatkan semakin luntuhnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan di Republik ini. Hal ini terlihat dari merebaknya berbagai kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas dan cenderung menyimpan sejumlah "misteri" sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti tewasnya wartawan Bernas

Yogyakarta, Udin, dan berbagai kasus kriminal yang diduga kuat melibatkan “oknum” ABRI.

4. Keterlibatan ABRI di bidang Ekonomi sering dianggap justeru tidak menguntungkan bagi perkembangan sektor ini. tidak ada satupun BUMN yang dipimpin ABRI yang menguntungkan secara finansial, karena banyaknya ketentuan dan kebijakan diatasnya. Peranan ABRI di bidang Ekonomi merupakan salah satu sebab ketidaksiapan Indonesia dalam menyongsong *Asean FreeTrade Aggrements* (AFTA) 2003.
5. Dunia sedang dilanda gelombang demokrasi dan tuntutan penghormatan terhadap HAM yang memiliki klaim Universal, sangatlah sulit bagi suatu negara, terutama negara berkembang yang secara ekonomi masih tergantung pada negara-negara maju, untuk mempertahankan keunikan sistem politik yang dimilikinya. Dwifungsi ABRI tidak termasuk dalam kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku pada umumnya.
6. Situasi politik keamanan Regional pasca Perang Dingin yang kurang menentu semakin menuntut ABRI untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah Hankam. Apakah ABRI akan tetap mampu melaksanakan tugas ganda, yaitu bidang Hankam dan Sospol, sementara kalangan militer di negara –negara kawasan Asia Pasifik semakin meningkatkan profesionalisme dan kemampuan Pertahanan Konvensional mereka, guna menghadapi situasi keamanan yang semakin kompleks dan kurang menentu. Di Asia Tenggara, Singapura meningkatkan anggaran militernya pada periode 1991-1996 sebesar 80 %, Thailand 66 %, Malaysia 48 %, dan Indonesia 45 %. Apabila pada tahun 1985 anggaran militer Indonesia merupakan yang paling tinggi di ASEAN, pada tahun 1996 angka ini sudah dilewati oleh Malaysia (3,5 miliar US\$), Singapura (4,01 miliar US\$) dan Thailand (4,2 miliar US\$). Tetapi betapapun peningkatan yang terjadi di lingkungan Asia Tenggara, total belanja militer negara –negara ASEAN tidak sampai separuh anggaran militer RRC (31,7 miliar US\$) atau sepertiga Anggaran Pertahanan Jepang (45,1 miliar US\$) pada tahun 1996. (Indria Samiego : 1998).

Kemudian kita lihat juga argumentasi yang dipaparkan oleh Pengamat Militer, A. Yahya Muhaimin, mengapa peran Sosial Politik ABRI harus segera dikurangi:

1. Aktualisasi Dwifungsi ABRI memang menimbulkan masalah dengan Counter-Partnernya, yaitu kaum Sipil. tetapi kita harus berpikir profesional, tak realistis bila peran Sospol ABRI dihapus. Dampak nasionalinya cukup luas.
2. Banyak keluhan mengenai peran ABRI di bidang Hankam. Letak Indonesia sangat strategis, sehingga kita sangat perlu Angkatan Perang atau Militer yang tangguh. Karena itu bidang Hankam harus ditangani dengan serius.
3. Seharusnya kekuatan Militer ABRI sudah kuat. anehnya, ada kapal nelayan yang masuk ke Laut Aru, Laut Cina Selatan, Selat Malaka tanpa bisa dideteksi. (Tabloid Adil, No.05 tahun ke-67, 4-10 Nopember1998)

3.2 Proses Reposisi Dan Reorganisasi ABRI

Reposisi dan Reorganisasi ABRI cukup menonjol ketika Mabes ABRI mengeluarkan rumusan Paradigma baru ABRI menyongsong Abad XXI pada HUT ABRI ke-53 di Jakarta, kemudian diikuti dengan langkah-langkah pemisahan ABRI dengan POLRI, perubahan istilah ABRI menjadi TNI, dan penghapusan jabatan Kassospol diganti dengan Kaster TNI, serta langkah-langkah lainnya yang dilaksanakan oleh Pimpinan ABRI dalam pelaksanaan Paradigma Baru ABRI tersebut .

Namun, para Intelektual kita justru mencermati bahwa Proses Reformasi Internal ABRI berupa Reposisi dan Reorganisasi, telah berlangsung secara bertahap selama Pemerintahan Orde Baru, dan semakin meningkat pesat sejak satu dekade terakhir.

3.2.1 Proses Reposisi Dan Reorganisasi ABRI Pada Masa-masa Terakhir Pemerintahan Orde Baru

Presiden Soeharto telah meminta kepada LIPI untuk mengkaji peran SOSPOL ABRI sejak tanggal 21 Pebruari 1995. Itu adalah langkah-langkah klimaks Presiden Soeharto, yang mengindikasikan *Political Will* Orde Baru. Sebelum itu pemerintahan Orde baru sudah mereorganisasi Kopkamtib yang begitu “menyeramkan” menjadi

Bakorstanas, kemudian membebaskan sejumlah Tahanan Politik PKI dan Tanjung Priok, bahkan pada Pemilu 1997 Eks Tapol PKI diberi Hak Pilih. Pemerintahan Orde Baru juga telah mengurangi anggota F-ABRI di DPR-RI, dari 100 menjadi 75 orang. Sebetulnya sejak dekade 70-an, Pemerintahan Orde Baru sudah mulai setapak demi setapak membubarkan lembaga ASPRI Presiden RI, menghapus Lembaga Kowilhan, menciutkan jumlah Kodam, serta mengganti Badan Intelijen Strategis (BAIS) dengan Badan Intelijen ABRI (BIA). Tetapi pada Era Reformasi, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kembali menghidupkan Lembaga BAIS, memekarkan Kodam, membentuk DPKSH, membentuk Rakyat Terlatih (Ratih), dan mengeluarkan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang jelas-jelas bersifat represif. Di situlah letak fluktuasi komitmen ABRI terhadap Demokrasi, terkadang mengambil langkah simpatik dan demokratis, tetapi tiba-tiba diikuti dengan langkah-langkah radikal dan represif. ABRI bergerak dalam ketidakpastian dan ketidaksiapan dalam melakukan Reposisi dan Reorganisasi.

Mayjen. Djoko Soebroto, Pangdam V Brawijaya, pada bulan Desember 1998 menulis dalam Semiloka Hubungan Sipil-Militer di Banyuwangi bahwa secara obyektif, dan tanpa maksud untuk membela diri, sesungguhnya sejak awal 1990 pemerintah dan ABRI telah membuat beberapa upaya untuk memperluas koridor demokrasi dengan memperkuat posisi kelompok-kelompok non-militer. Misalnya melalui pelonggaran kekangan terhadap pers nasional, pencabutan mekanisme perijinan untuk pertemuan umum, seminar, khotbah, dan lain-lainnya. Di bidang legislatif ABRI telah mengurangi jatah kursi fraksi ABRI di DPR RI dari 100 menjadi 75. Di bidang kepemimpinan, ABRI telah mencanangkan pemberlakuan prinsip kepemimpinan Tutwuri Handayani sebagai ganti dari konsep Ing Ngarso Sung Tulodho.

Senada dengan Mayjen Djoko Soebroto, Direktur Laboratorium FISIP UI, Eep Saefulloh Fatah menulis bahwa selama dekade terakhir pemerintahan orde baru telah terjadi trends demokratisasi politik ABRI berupa pengurangan kuantitas keterlibatan ABRI dalam politik. Anggota ABRI yang menduduki jabatan Gubernur misalnya, menunjukkan trend menurun dari pelita ke pelita : 73 % dalam PELITA I, 76, 9 %

dalam PELITA II, 59,2 % dalam PELITA III, 51,8 % dalam PELITA IV, dan 44,4 % dalam PELITA V. Trend yang sama kita temukan dalam komposisi anggota kabinet pembangunan. Jika dalam tiga pelita pertama, rata-rata 31,2 % anggota kabinet adalah ABRI aktif, maka dalam tiga pelita terakhir, rata-rata hanya 9,6 % anggota kabinet yang berasal dari ABRI aktif. Trend yang sama dapat ditemukan dalam komposisi (Sipil-Militer) pejabat asisten menteri, duta besar dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya. Lembaga legislatif mengikuti dengan pengurangan anggota fraksi ABRI dalam DPR dari 100 menjadi 75 orang. posisi strategis yang biasanya didominasi oleh ABRI, mulai beralih kepada sipil. Misalnya kepemimpinan sipil pertama dalam GOLKAR sejak Oktober 1993, serta masih banyak indikasi lainnya tentang proses demokratisasi politik ABRI selama dekade terakhir pemerintahan Orde Baru. Dalam proses yang sama, pada Pemilu 1992 ABRI mulai menjaga jarak dengan Golkar

3.2.2. Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI pada era Reformasi

Era Reformasi adalah era terpenuhinya tuntutan Reformasi oleh Gerakan Reformasi. Gerakan Reformasi tersebut adalah gerakan yang digalang oleh kelompok-kelompok Aktivis Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Pers se-Indonesia dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang digalang pada akhir pemerintahan Orde Baru, dengan tujuan untuk mengakhiri Orde Baru dan membangun suatu era baru pemerintahan Indonesia yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Rezim Orde Baru adalah sebuah rezim yang menguasai sistem kenegaraan dan kemasyarakatan secara totaliter dan hegemonik dengan didukung oleh ABRI, Golkar dan birokrasi. Orde Baru pada awalnya ditujukan untuk melakukan koreksi total terhadap Orde Lama namun akhirnya menjadi kekuasaan presiden Soeharto yang dilakukan dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Orde Baru adalah sebuah mesin politik yang “berdarah dingin” serta terpatron kepada figur utama Jendral Soeharto.

Oleh karena itu, momentum awal dari era reformasi ditandai dengan pengumuman Jendral Besar Soeharto berhenti sebagai Presiden RI, serta pengumuman Kabinet Pembangunan VI demisioner, pada pukul 09.00 WIB, tanggal 21 Mei 1998 di

ruang Jepara Istana Negara Jakarta, dengan disaksikan oleh Ketua MPR/DPR H.Harmoko beserta empat wakilnya dan Sekjen DPR/MPR Afif Makruf.

Tuntutan-tuntutan utama gerakan reformasi, selain Soeharto mundur, adalah penghapusan Dwifungsi ABRI, pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil secepatnya, dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tuntutan reformasi tersebut ditindaklanjuti dengan Sidang Istimewa MPR RI yang memakai puluhan korban mahasiswa. Sidang Istimewa “berdarah” tersebut menghasilkan beberapa ketetapan yang sedikit memberi angin segar kepada gerakan reformasi.

Sebetulnya ABRI sendiri terlibat secara langsung dalam detik-detik reformasi, dan keterlibatan tersebut dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yang secara kronologis proses tersebut kami susun sebagai berikut :

1. Insiden Tri Sakti

Mahasiswa Tri Sakti hendak *long march* menuju gedung DPR, tiba-tiba saja ketegangan memuncak luar biasa. Pasukan ABRI mengejar mahasiswa, ABRI menjadi beringas. Suara tembakan terdengar hampir empat puluh menit lamanya. Kampus Tri Sakti porak poranda, sembilan mahasiswa Tri Sakti meninggal. Masyarakat semakin marah, dan DPR pun mendesak Presiden Soeharto untuk segera mundur.

2. Penolakan Menhankam/Pangab Terhadap Pernyataan Pimpinan DPR/MPR RI 18 Mei 1998

Pada tanggal 18 Mei 1998 pukul 17.00 WIB Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo, HS. Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto, serta Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoedin menghadap Presiden Soeharto di cendana. Tiga jam setelah menghadap Soeharto, Menhankam/Pangab Jendral Wiranto mengeluarkan pernyataan bahwa pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mundur, meskipun disampaikan secara kolektif, adalah pendapat pribadi. Sementara itu aksi mahasiswa sudah mulai menduduki gedung MPR/DPR.

3. Rencana Reshuffle Kabinet

Tanggal 19 Mei 1998 pukul 10.00 WIB datang tiga ratus orang dari Pemuda Pancasila (PP), Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan ABRI (FKPPI) ke gedung MPR/DPR untuk menyerbu mahasiswa. Bentrokan besar nyaris terjadi, tetapi masing-masing pihak berhasil menahan diri. Satu jam setelah insiden tersebut, para petinggi ABRI mendampingi Presiden Soeharto mengumumkan rencana Reshuffle Kabinet Pembangunan VI dan akan diganti dengan Kabinet Reformasi. Tapi mahasiswa tetap menduduki gedung MPR/DPR.

4. Pernyataan akan mundur

Tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto, Mensesneg Sa'adilah Mursyid, dan Staff Sekretariat Negara (penulis pidato presiden) Yusril Ihza Mahendra. Kepada tiga orang tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan akan mundur dari jabatan Presiden RI.

5. Pernyataan mundur (momentum reformasi)

Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI, kemudian menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden RI B.J. Habibie, dan menyatakan Kabinet Pembangunan VI demisioner. Pernyataan mundurnya Soeharto dan pelantikan Presiden Habibie pada hari itu langsung diikuti oleh pernyataan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto bahwa ABRI akan melindungi Soeharto dan segenap keluarganya, begitu juga para mantan presiden beserta keluarganya dan presiden yang baru berkuasa.

6. Pengakuan dosa I

Setelah Soeharto turun, hujatan masyarakat diarahkan pada ABRI, agar kasus penculikan dan orang hilang selama kekuasaan Soeharto segera diusut dan dituntaskan. Pada tanggal 29 Juni 1998 Wiranto mengaku bahwa ada keterlibatan beberapa oknum ABRI dalam kasus penculikan dan orang hilang selama pemerintahan Orde Baru.

7. Seminar ABRI di Sekolah Staff Dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD)

Seminar ABRI yang biasanya mengundang para intelektual sipil, kini hanya mengundang para pakar dan senior militer sendiri. ABRI mulai menyadari posisinya dan bertekad agar peran Sospol ABRI segera diakhiri, sebab peran itu telah menjadikan ABRI sebagai pelanggeng rezim, sedangkan peranan sebagai alat Hankam Negara terabaikan.

8. Rancangan paradigma baru

Pada bulan September 1998, pimpinan ABRI mengumumkan kepada masyarakat bahwa ABRI sedang menyusun paradigma baru yang akan dimulai pada 5 Oktober 1998.

9. HUT ABRI ke-53 : paradigma baru

Pada tanggal 5 Oktober 1998, HUT ABRI diselenggarakan di Mabes Cilangkap tanpa *show of force*, parade, maupun *defile*. Acara dikemas serba sederhana, efisien dan terkesan hemat. ABRI betul-betul tampil *low profile* saat itu. Hari itu juga Menhankam/Pangab menepati janjinya kepada masyarakat, yaitu mengumumkan paradigma baru ABRI, yang disusun dalam bentuk buku, dengan judul : "ABRI Abad XXI-Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa". Buku tersebut berisi tentang sejarah perkembangan peran ABRI, refleksi atas perkembangan ABRI, tantangan terhadap peran Sospol ABRI, paradigma baru dan visi serta peran ABRI ke depan. Bersamaan dengan pengumuman paradigma baru ABRI tersebut Menhankam/Pangab juga mengumumkan permintaan maaf ABRI kepada masyarakat, dan rencana pemisahan Polri dari ABRI.

10. Purnawirawan menghujat pemerintah

Sehari setelah HUT ABRI 1998, para Jenderal Purnawirawan menghujat Presiden B.J. Habibie karena telah memojokkan para aktivis pro-Reformasi dan menyamakan gerakan Reformasi dengan gerakan radikal revolusioner. Senior ABRI betul-betul tampil vokal dan garang membela Reformasi.

11. DPKSH dan Ratih

Pada akhir tahun 1998, pemerintah kembali membuat kebijakan kontroversial, dengan membentuk Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dipimpin langsung oleh Presiden Habibie dan Ketua Pelaksana Harian dipegang oleh Menhankam/Pangab Wiranto. Pembentukan DPKSH tersebut disusul dengan pernyataan Menhankam/Pangab bahwa Dephankam akan membentuk Rakyat Terlatih. Mendengar rencana itu, mahasiswa mulai turun jalan lagi. Untuk meredakan situasi, pada 13 Desember 1998, Menhankam/Pangab dengan didampingi pejabat tinggi DPKSH, Dephankam dan ABRI mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa DPKSH tidak sama dengan Kopkamtib dan Bakorstanas. Mengenai Rakyat Terlatih, Menhankam menyatakan bahwa rencana itu tetap akan diteruskan, dan mulai Januari 1999 Ratih sudah terbentuk dengan perekrutan awal 40.000 anggota, mereka akan digaji di atas Upah Minimum Regional (UMR) setempat.

12. Menteri menolak Ratih

Pada tanggal 14 Desember 1998, Menteri Kehakiman Muladi menyatakan tidak setuju dengan rencana pembentukan Ratih yang akan dimulai Januari 1999. Alasannya, Ratih baru dapat dibentuk setelah ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai lembaga tersebut. Sementara Menteri Keuangan Bambang Soebiyanto mengungkapkan bahwa Dephankam telah mengajukan dana sebesar 2,5 milyar rupiah yang sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan Ratih dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1998-1999.

13. Pro-kontra Rakyat Terlatih

Pada tanggal 15 Desember 1998, tokoh gerakan reformasi nasional M. Amien Rais mempertanyakan dimana letak lembaga Pertahanan Sipil (Hansip), Perlawanan Rakyat (Wanra), Keamanan Rakyat (Kamra) atau Perlindungan Masyarakat. Sementara yang sudah ada dianggap tidak efektif kini malah diusulkan lembaga lain. Hal senada diungkapkan oleh gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen Agum Gumelar, yang meminta ABRI menilai dulu, apakah memang

diperlukan Undang-undang khusus yang mengatur pembentukan Ratih atau tidak. Hal itu dikemukakan Agum kepada pers se usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai di Kantor Lemhannas, 15 Desember 1998. Sesuai dengan usulan Amien Rais, akhirnya Departemen Pertahanan Dan Keamanan (Dephankam) menunda Rakyat Terlatih (Ratih) dan merencanakan pembentukan Kamra (Keamanan Rakyat).

14. Upacara penisahan Polri-ABRI

Sesuai dengan janji Menhankam/Pangab pada tanggal 1 April 1999, kasum ABRI Letjen Soegiono menyerahkan Pataka Polri kepada Sekjen Dephankam Letjen Fachrulrazi, resmiah Polisi keluar dari ABRI dan kembali menjadi warga sipil. Bersamaan dengan itu, Menhankam/Pangab meminta kepada pemerintah agar nama ABRI ditinggalkan dan nama TNI dipakai kembali.

15. Seminar hubungan sipil militer di Depok : Pengakuan Dosa II

Tanggal 25 Mei 1999, Fisip UI Depok menyelenggarakan seminar Hubungan Sipil Militer. Disitu Kaster Soesilo Bambang Yoedhoyono dan Asrenum Panglima TNI Agus Wirahadi Kusumah mengakui dosa-dosa ABRI, ABRI ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan Orde Baru. Dalam seminar itu, S.B.Yoedhoyono menggunakan nama TNI, bukan ABRI.

16. Wakil Panglima TNI

Pada bulan Juli 1999, pemerintah menghidupkan kembali pos jabatan wakil Panglima TNI, dan diserahkan kepada Laksamana Widodo A.S dari Angkatan Laut . Widodo A.S dilantik langsung oleh Presiden RI BJ Habibie. Tetapi jabatan Wakil Panglima kali ini tidak disertai dengan kewenangan-kewenangan khusus.

17. Kurikulum Baru POLRI

Pada tanggal 1 Juli 1999, POLRI memulai Kurikulum Pendidikan baru pada sekitar 11 ribu siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) dan 300 orang mahasiswa Akademi Kepolisian (Akp) tahun ajaran 1999-2000.

18. RUU KKN

Kalau pada bulan September 1998, Masyarakat terhibur dengan pengumuman akan disusunnya Paradigma Baru ABRI, maka pada bulan yang sama setahun Kemudian, Masyarakat dikejutkan dengan rencana Dephankam untuk mengajukan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Keselamatan Negara (RUU KKN). Masyarakat mengajukan protes keras terhadap RUU tersebut, tetapi pihak Dephankam tetap bersikeras mengajukannya menjadi Undang-undang, bahkan dalam perkembangan berikutnya Dephankam berencana akan mengajukannya bersamaan dengan RUU Ratih, yang pernah menjadi Polemik pada akhir tahun 1998. Demonstrasi besar mahasiswa kembali meledak, dan ABRI kali ini bertindak lebih Agresif. Kali ini Militer betul-betul tidak memberikan ampunan kepada siapapun yang dianggap menghalang-halangi kekuasaan Militer di Seluruh Indonesia. Keadaan menjadi semakin gawat ketika pada tanggal 23 September 1999, rapat Paripurna DPR-RI menyetujui RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) menjadi UU. Undang-undang PKB sebagai “ Reinkarnasi “ dari RUU KKN yang *Abortus* menambah corengan hitam militer dalam sejarah Indonesia.

3.3. LEGITIMASI TERHADAP REPOSISI DAN REORGANISASI ABRI

Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru mendapatkan Legitimasi dari UU yang lebih tinggi, yaitu UU No.20 Tahun 1980 tentang ketentuan-ketentuan pokok HANKAM NEGARA RI, UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Bela Negara , UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI dan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam materi ketiga UU di atas, POLRI adalah bagian dari ABRI , dan ABRI adalah alat Pertahanan dan Keamanan Negara sekaligus kekuatan Sospol. Sistem Peradilan POLRI juga ikut Peradilan Militer dan empat Undang-undang t, serta beberapa undang-undang lainnya yang terkait sampai saat ini belum dihapus.

Karena UU Pokok Hankam, UU Peradilan Militer , dan UU Kepolisian masih berlaku dan belum dicabut, maka kebijakan atau keputusan macam apapun, yang

kedudukannya berada di bawah Hierarki Undang-undang, sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketiga Undang-undang tersebut.

Jadi, keputusan pemerintah tentang Reposisi dan Reorganisasi ABRI setelah 5 Oktober 1998 merupakan keputusan Inkonstitusional, karena berlawanan dengan urutan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Karena tidak ada legitimasi yang kuat terhadap Reposisi dan Reorganisasi tersebut, maka keputusan tersebut tidak legitimed, yang berarti sekarang masih ada ABRI, POLRI berada di bawah Komando ABRI, dan ABRI masih absah menduduki peran-peran Sosial-Politik di seluruh tanah air Indonesia.

3.4 Penerapan Hukum Yang Benar Dalam Melakukan Reposisi Dan Reorganisasi ABRI

Bila Pejabat Militer Indonesia berupaya melakukan Reposisi dan Reorganisasi ABRI tanpa berusaha untuk mengubah ketentuan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu, berarti Pejabat tersebut telah bertindak di luar Prosedur Hukum serta melanggar Tertib Hukum Indonesia, dan keputusannya jelas-jelas Inkonstitusional.

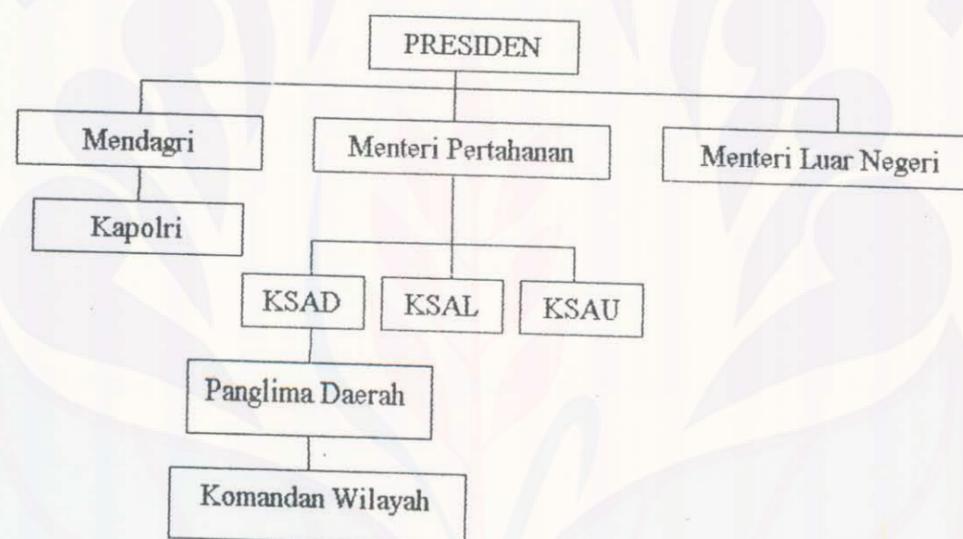
Posisi yang benar adalah kembali pada posisi Militer sebelum diberlakukannya undang-undang Darurat No.11/Plt/1957 (SOB), yaitu Angkatan Perang sebagai alat Pertahanan dan Keamanan Negara RI, bukan kekuatan Sosial-Politik seperti yang selama ini diperankan oleh ABRI. Posisi Angkatan Perang harus betul-betul profesional, jangan sampai Angkatan Perang Indonesia memosisikan diri sebagai Militer Revolusioner ataupun Militer *Praetorian*. Angkatan Perang Modern adalah Angkatan Perang Profesional.

Organisasi Angkatan Perang yang benar adalah terpisah dengan Kepolisian dan dikendalikan secara profesional oleh Pejabat Sipil. Organisasi Angkatan Perang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Panglima atau Kepala Staff yang berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan Negara.

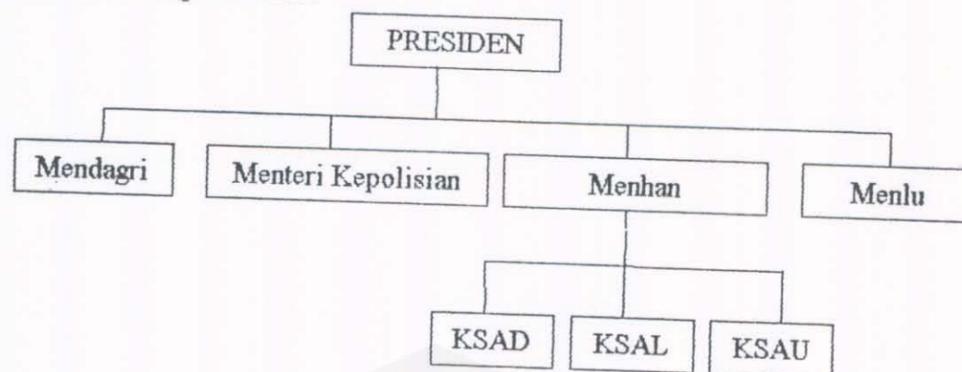
Menteri Pertahanan yang ideal adalah seorang Sipil yang punya wawasan dan strategi politik yang matang. Menteri Pertahanan selalu berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kepolisian, atau kalau Kepolisian berada di bawah Depdagri, Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri.

Presiden adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Perang, jadi bukan Panglima Tertinggi seperti yang diterapkan selama Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Dalam Manajemen Angkatan Perang yang Modern dan Professional, tidak ada lembaga Panglima Tertinggi Angkatan Perang maupun Panglima Angkatan Perang. Angkatan Perang hanya patuh pada Komando Panglima masing-masing Angkatan, dan Panglima masing-masing angkatan berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan, selanjutnya Menteri Pertahanan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Oleh karena itu, Presiden RI dinyatakan sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Angkatan Perang Professional selalu tunduk dan patuh kepada siapapun yang memegang pemerintahan, mereka tidak mau sedikitpun ikut campur apalagi sampai intervensi terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan, karena itu bukan profesi mereka. Profesi Angkatan Perang cuma satu, yaitu bertempur dan memenangkan peperangan atas perintah negara untuk mencapai kejayaan dan kemuliaan negara. Secara skematik, bisa kita susun organisasi Pertahanan negara yang ideal sebagai berikut :



Atau tersusun sebagai berikut :



Pemerintah seharusnya memahami Manajemen Angkatan Perang yang Professional tersebut, untuk kemudian mentransformasikannya dalam suatu Rancangan undang-undang yang baru, baik RUU Pertahanan Negara maupun RUU Kepolisian Negara.

Konsep RUU Pertahanan Negara yang baru tidak lagi mengenal ABRI, tetapi Angkatan Darat RI (ADRI), Angkatan Laut RI (ALRI), dan Angkatan Udara RI (AURI). Sedangkan RUU Kepolisian Negara yang baru tidak lagi mengenal istilah Kapolri bertanggung jawab kepada Pangab, tetapi Menteri kepolisian yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Setelah RUU Pertahanan dan RUU Kepolisian yang baru ditetapkan menjadi Undang-undang, tinggalah Wakil Rakyat mengatur melalui TAP MPR bagaimana Angkatan Perang tidak ikut campur lagi terhadap urusan Politik pemerintahan.

Setelah Undang-undang dan TAP MPR dikeluarkan, pemerintah (Presiden RI, Menteri Pertahanan, Menteri Kepolisian) tinggal menurunkannya dalam berbagai peraturan pelaksanaan terhadap TAP MPR dan Undang-undang tersebut.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut:

1. Reposisi dan Reorganisasi ABRI dilatar belakangi oleh perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa sejak awal-awal Kemerdekaan. Angkatan perang Indonesia terutama Angkatan Darat mulai ikut campur terhadap segala sektor kehidupan Masyarakat Sipil sejak diberlakukannya SOB (Undang-undang Darurat Perang). SOB yang ditetapkan pada tahun 1957 merupakan momentum awal tegaknya peran sosial politik ABRI, yang dirumuskan menjadi dwi fungsi ABRI, dan melandasi tegaknya kekuasaan orde baru selama 32 tahun.
2. Para tokoh Intelektual Sipil maupun Militer mengungkapkan bahwa posisi dan organisasi ABRI sudah tidak relevan dan tidak ideal lagi untuk sebuah Angkatan Perang yang profesional. Selain itu dwi fungsi ABRI selama ini dianggap telah menyengsarakan masyarakat. Dan perkembangan dunia internasional di bidang penegakan demokrasi dan HAM telah mematangkan paradigma Civil-Society yang menghendaki supremasi Sipil di seluruh dunia.
3. Proses Reposisi dan Reorganisasi ABRI ternyata secara bertahap dan Evolusioner sudah berlangsung selama pemerintahan orde baru, terutama sejak satu dasawarsa terakhir kekuasaan Rezim tersebut. Tetapi, kebijakan tersebut berjalan fluktuatif, karena sesudah lahir kebijakan yang demokratis, segera disusul dengan kebijakan yang Represif, tetapi masih sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sedangkan Reposisi dan Reorganisasi ABRI sejak 5 Oktober 1998 cenderung hipokrit dan inkonstitusional serta fluktuatif. Contohnya setelah pemisahan ABRI dengan POLRI serta perubahan ABRI menjadi TNI, tiba-tiba Dephankam

mengajukan RUU KKN/RUU PKB dan RUU Ratih yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang pada akhir September 1999.

4. Produk Hukum yang melegitimasi Reposisi dan Reorganisasi ABRI sejak 5 Oktober 1998 bukanlah Undang-Undang, tetapi peraturan di bawah Undang-Undang yang berlawanan dengan Undang-Undang pokok Hankam, Undang-undang Prajurit ABRI, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Bela Negara, dan Undang-Undang peradilan Militer. Jadi jelas dan gamblang bahwa keputusan Reposisi dan Reorganisasi ABRI tersebut tidak sah karena Inkonstitusional.
5. MPR/DPR hasil pemilu 1999 dan pemerintahan baru dapat mengeluarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin Angkatan Perang Negara kembali ke posisi semula sebagai alat pertahanan belaka, serta kepolisian yang otonom dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di luar koordinasi Dephankam. Ketetapan-ketetapan dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengembalikan Militer Praetorian menjadi Militer Profesional. Setelah itu, pihak pemerintah atau eksekutif dapat menerapkan supremasi Sipil di semua sektor kehidupan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka kami memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya MPR hasil pemilu 1999 mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang dapat menjamin Angkatan Perang RI kembali pada posisi yang sebenarnya serta disusun secara terpisah dengan organisasi pemerintahan Sipil, seperti Kepolisian.
2. Pemerintah dan DPR hasil pemilu 1999 hendaknya mengeluarkan Undang-Undang untuk menata kembali organisasi Hankam, ABRI dan POLRI.
3. Hendaknya seluruh kekuatan masyarakat, baik mahasiswa, pers maupun LSM mendorong dengan baik agar pihak Militer terutama perwira tinggi Angkatan

Darat mempunyai Political will untuk kembali pada posisi sebagai prajurit profesional yang tunduk kepada segala macam pemerintahan Sipil.

4. Hendaknya Masyarakat dan pemerintah tidak latah untuk menggunakan istilah-istilah baru yang dikeluarkan oleh pimpinan ABRI untuk menarik simpati Masyarakat tanpa mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menyikapi dikeluarkannya segala bentuk Undang-Undang baru yang Militeristik dan Represif (UU PKB/UU Ratih), hendaknya masyarakat bersikap lebih bijaksana dan mengambil langkah-langkah konstitusional disamping gerakan moral untuk menghapuskan Undang-Undang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

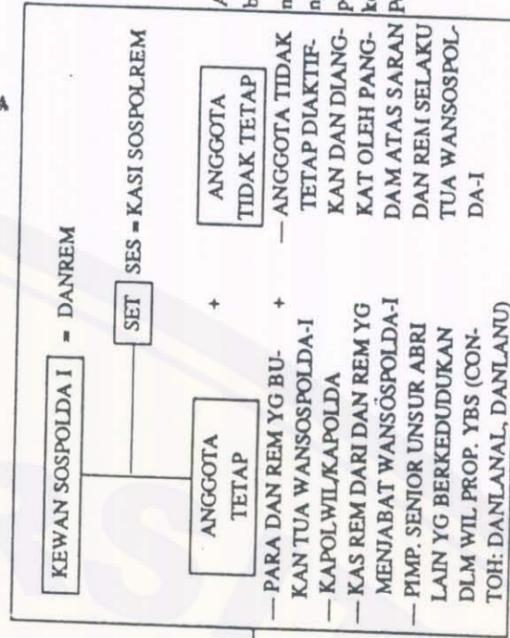
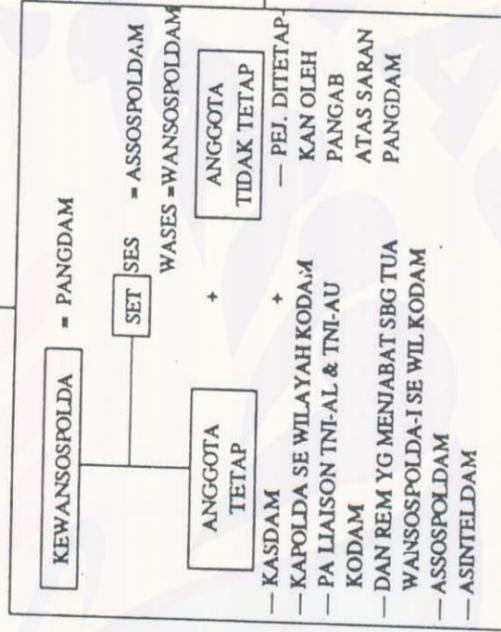
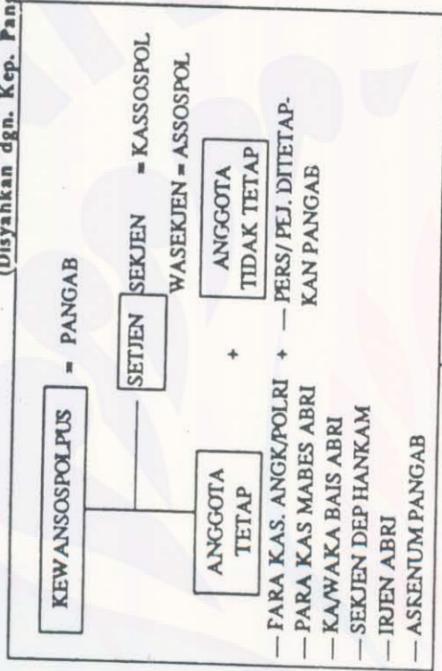
- Adrianus Meliala, 1999, Lingkungan Luar POLRI, Dalam Forum Keadilan: No.17/1999.
- Ahmad Zaini Abar (Ed), 1990, Beberapa Aspek pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol Bulak Sumur. Solo : Ramadhani.
- Ali Moertopo, 1981, Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta : Yayasan Proklamasi-CSIS.
- Amos Perlmutter, 1984, Militer dan Politik. Jakarta : CV. Raja Wali.
- C.S.T. Kansil, 1987, Haluan Politik Negara Indonesia, Pembahasan TAP MPR 1968-1983. Jakarta : Erlangga.
- Daniel S. Lev, 1995, Seputar Cornell Papers. Jember : Pustaka Fordeka.
- Dede Oetomo, 1998, Merajut Paradigma Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, Makalah Semiloka Hubungan Sipil-Militer. Banyuwangi : Yayasan Blambangan.
- Djoko Soebroto, 1998, Aktualisasi Dwi Fungsi ABRI dalam Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis, Makalah Semiloka Hubungan Sipil-Militer. Banyuwangi : Yayasan Blambangan.
- Eep Saefulloh Fatah, 1998, Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Eric A. Nordlinger, 1994, Militer Dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Harsono, 1992, Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Hassan Shadily (Ed), 1980, Enslikopedi Indonesia I, A-CER. Jakarta : Penerbitan Buku Ikhtiar Baru-Van Hoeve,.
- Hassan Shadily (Ed), 1980, Enslikopedi Indonesia II, Ces-Ham. Jakarta : Penerbitan Buku Ikhtiar Baru-Van Hoeve.

- Indria Samego Et al, 1998, Bila ABRI Menghendaki, Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwi Fungsi ABRI. Jakarta : Mizan Pustaka-Kronik Indonesia Baru.
- I.O.Nanulaita, 1966, Timbulnya Militerisme di Ambon. Jakarta : Penerbit Bhratara.
- John R. Bershline, 1950, Perencanaan, Organisasi, Komando, Dan Kontrol Dalam Pertahanan Dinas Angkatan Udara Amerika Serikat. Whashington.
- Juwono Sudarsono, 1997, Kebangkitan Jiwa Keprajuritan Nasional. Bogor : Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).
- Karni Ilyas, 1999, Sipil, Dalam Forum Keadilan No. 02/1999.
- Kartini Kartono, 1991, Pemimpin dan Kepemimpinan, Edisi Baru. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Koentjaningrat (Ed), 1977, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Kunarto, 1999, Intelijen Represif, Dalam Forum Keadilan No. 17/1999.
- Laila Hasyim, 1981, Mc Iver: Jaring-jaring Pemerintahan. Jakarta : Penerbit Aksara Baru.
- Moch. Dayat, 1998, Strategi Penyikapan Politik Kekerasan dan Kekerasan Polisi di Masyarakat, Makalah Semiloka Hubungan Sipil-Militer. Banyuwangi : Yayasan Blambangan.
- Moch. Mahfud, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Mochtar Mas'oad, 1998, Ketika Dwi Fungsi Terkena Diskualifikasi, Dalam Opini, Jawa Pos 5 Oktober 1998.
- M. Solly Lubis, 1990, Ilmu Negara. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- M.T. Arifin, 1999, Politik TNI yang Gamang, Kolom, Dalam Forum Keadilan: No. 17/1999.
- Muhammad Asfar, 1998, ABRI di Tengah Tuntutan Reformasi Politik, Dalam Jawa Pos, 6 Oktober 1998.

- Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Nasution, 1966, Ketetapan-ketetapan MPRS Tonggak Konstitusional Orde Baru. Djakarta : CV. Pantjuran Tudjuh.
- N. Daldjoeni, 1991, Dasar-dasar Geografi Politik. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon Et al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ruslan Abdul Ghani, 1997, Kebangkitan Jiwa Keprajuritan Nasional (Pengantar). Bogor : Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA).
- Samsul Wahidin, 1998, Aktualisasi Makna Pendekatan Kesejahteraan-Keamanan ABRI, Opini, Dalam Jawa Pos 5 Oktober 1998.
- Satjipto Rahardjo, 1999, Reedukasi Polisi Kita, Dalam Forum Keadilan: No. 02/April 1999.
- Sayidiman Suryohadiprodo, 1999, Kembali ke Nama TNI, Dalam Forum Keadilan, No. 02/1999.
- Soebijono (Ed), 1999, Dwi Fungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya Dalam kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sofyan Efendi, 1998, Himpunan Undang-Undang Pokok Dengan Penjelasan dan Peraturan Pelengkap. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutrisno Hadi, 1980, Methodologi Research, Jilid I, Cetakan ke-X. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Talukder Maniruzzaman, 1998, Militer Kembali ke Barak, Sebuah Studi Komparatif. Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana.
- Winarno Surakhmad, 1982, Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Wiranto, 1998, ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI Dalam Kehidupan Bangsa. Jakarta : Mabes-Cilangkap.

LAMPIRAN - I

ORGANISASI DEWAN SOSPOL ABRI
(PUSAT, DAERAH)
(Disyahkan dgn. Kep. Pangab No. Kep/05/VII/1991 Tgl. 29 Juli 1991)



Apabila Kapolda berpangkat Pati, maka keanggotaannya dalam Wansospolda-I diwakilkan kepada Waka Polda.



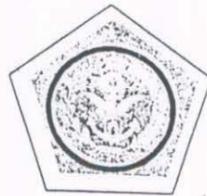
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI	KABINET	PERIODE
1. R A A Wiranatakusumah	Presidentil	19-08-45 - 14-11-45
2. Sutan Sjahrir (Sosialis)	Sjahrir-I	14-11-45 - 12-03-46
3. Dr Sudarsono (Sosialis)	Sjahrir-II	12-03-46 - 02-10-46
4. Mr Moh Roem (Masjumi)	Sjahrir-III	02-10-46 - 26-06-47
5. Wondoamiseno (PSSI)	Amir Sjarifuddin-I	03-07-47 - 11-11-47
6. Mr Moh Roem (Masjumi)	Amir Sjarifuddin-II	11-11-47 - 29-01-48
7. Dr Sukiman (Masjumi)	Hatta-I	29-01-48 - 04-08-49
8. Mr T M Hasan	Darurat	19-12-48 - 13-07-49
9. Mr Wongsonegoro (PIR)	Hatta-II	04-08-49 - 20-12-49
10. Anak Agung Gde Agung	R I S	20-12-49 - 06-09-50
11. Mr S Tirtoprodjo (PNI)	Susanto	20-12-49 - 21-01-50
12. Mr S Tirtoprodjo (PNI)	Halim	21-01-50 - 06-09-50
13. Mr Assaat	Natsir	06-09-50 - 27-04-51
14. Mr Iskak Tjokrodisurjo (PNI)	Sukiman-Suwirjo	27-04-51 - 03-04-52
15. Mr Moh Roem (Masjumi)	Wilopo	03-04-52 - 30-07-53
16. Prof Dr Mr Hazairin (PIR)	Ali Sastroamidjojo-I	30-07-53 - 12-08-55
17. Mr R Sunarjo (NU)	Burhanuddin Harahap	12-08-55 - 24-03-56
18. Mr R Sunarjo (NU)	Ali Sastroamidjojo-II	24-03-56 - 09-04-57
19. Sanusi Hardjadinata	Karya	09-04-57 - 10-07-59
20. Ipik Gandamana	Kerja-I	10-07-59 - 18-02-60
21. Ipik Gandamana	Kerja-II	18-02-60 - 06-03-62
22. Ipik Gandamana	Kerja-III	06-03-60 - 12-11-63
23. Ipik Gandamana	Kerja-IV	13-11-63 - 27-08-64
24. Mayjen Dr Sumarno	Dwikora-I	27-08-64 - 28-03-66
25. Mayjen Basuki Rachmat	Dwikora-II	28-03-66 - 25-07-66
26. Mayjen Basuki Rachmat	Ampera-I	25-07-66 - 17-10-67
27. Letjen Basuki Rachmat	Ampera-II	11-10-67 - 06-06-68
28. Letjen Basuki Rachmat	Pembangunan-I	06-06-68 - 28-03-73
29. Letjen Amir Machmud	Pembangunan-II	28-03-73 - 29-03-78
30. Letjen Amir Machmud	Pembangunan-III	29-03-78 - 19-03-83
31. Soepardjo Rustam	Pembangunan-IV	19-03-83 - 21-03-88
32. Rudini	Pembangunan-V	21-03-88 - 17-03-93
33. Yogie Suardi Memet	Pembangunan-VI	17-03-93 -

HARI BERSEJARAH : 4 Juni

- Int : Berdirinya Bima, suatu negara di kawasan Asia Tenggara (1948).

Nas : Ibukota RI bertsama Presiden dan Wakilnya mengungsi ke Yogyakarta (1946).



DEPARTEMEN HANKAM

	MENTERI	KABINET	PERIODE
Politisi	1. Sulyadikusuma	Presidentil	19-08-45 - 14-11-45
	2. Mr. Amir Syarifuddin	Sjahrir-I	14-11-45 - 12-03-46
	3. Mr. Amir Syarifuddin	Sjahrir-II	12-03-46 - 02-10-46
	4. Mr. Amir Syarifuddin	Sjahrir-III	02-10-46 - 26-06-47
	5. Mr. Amir Syarifuddin	Amir Syarifuddin-I	03-07-47 - 11-11-47
	6. Mr. Amir Syarifuddin	Amir Syarifuddin-II	11-11-47 - 29-01-48
	7. Drs. Mohammad Hatta	Hatta-I	29-01-48 - 04-08-49
	8. Mr. Sutan Rasjid	Darurat	19-12-48 - 13-07-49
	9. Sri Sultan Hamengkubuwono-IX	Hatta-II	04-08-49 - 20-12-49
	10. Sri Sultan Hamengkubuwono-IX	RIS	20-12-49 - 06-09-50
	11. Dr. Abdul Halim	Natsir	06-09-50 - 27-04-51
	12. Sukiman-Suwiryo	Sewaka (PIR)	27-04-51 - 03-04-52
	13. Sri Sultan Hamengkubuwono-IX	Wilopo	03-04-52 - 30-07-53
	14. Mr. Iwa Kusumasumantri	Ali Sastroamidjojo-I	30-07-53 - 12-08-55
	15. Mr. Burhanuddin Harahap (Masj)	Burhanuddin Harahap	12-08-55 - 24-03-56
	16. Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)	Ali Sastroamidjojo-II	24-03-56 - 09-04-57
	17. Haji Ir. Djuanda	Karya	09-04-57 - 10-07-59
Military	18. Letjen AH. Nasution	Kerja-I	10-07-59 - 18-02-60
	19. Jend. AH Nasution	Kerja-II	18-02-60 - 67-03-62
	20. Jend. AH Nasution	Kerja-III	06-03-62 - 13-11-63
	21. Jend. AH Nasution	Kerja-IV	13-11-63 - 27-08-64
	22. Jend. AH Nasution	Dwikora-I	27-08-64 - 28-03-66
	23. Letjen Suharto	Dwikora-II	23-08-66 - 25-07-66
	24. Letjen Suharto	Ampera-I	25-07-66 - 17-10-67
	25. Jend. Suharto	Ampera-II	11-10-67 - 06-06-68
	26. Jend. Suharto	Pembangunan-I	06-06-68 - 09-09-71
	27. Jend. Maraden Panggabean	Pembangunan-I	09-09-71 - 28-03-73
	28. Jend. Maraden Panggabean	Pembangunan-II	28-03-73 - 29-03-78
	29. Jend. M Jusuf	Pembangunan-III	29-03-78 - 19-03-83
	30. Jend. Pur. S. Poniman	Pembangunan-IV	19-03-83 - 21-03-88
	31. Jend. L.B. Murdani	Pembangunan-V	21-03-88 - 17-03-93
	32. Jend. TNI Edi Sudradjat	Pembangunan-VI	17-03-93 -

HARI KELAHIRAN : 5 Januari

- Int : Juan Carlos, Raja Spanyol (1937); K Adenauer, Negarawan Jerman (1876).
- Nas : Kfi. Idham Chalid, ex Ketua DPR (1921); Fariz RM, musisi (1959).

HANKAM



TNI - ANGKATAN DARAT

Motto : *Kartika Eka Paksi*
Artinya : *Kekuatan, Kesatuan, Kesetiaan.*



ELEMEN-ELEMEN :

1. **Bintang** melukiskan instrumen ketentaraan sebagai pelambang cita-cita yang tinggi.
2. **Garuda** melukiskan jiwa ksatria, pemberani dan gagah perkasa seperti jiwa burung itu sendiri.
3. **Perisai** dengan warna bendera RI dan putih melukiskan jiwa dan semangat kebangsaan.
4. **Bulu Sayap** yang masing-masing berjumlah 10 helai melukiskan bulan Oktober sebagai saat kelahiran tentara RI.
5. **Bulu Ekor** terdiri dari 7 helai melambangkan ketujuh prilaku keprajuritan yaitu "Sapta Marga".

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

1. G.P.H Djatikusumo, Kol. Inf	1948-1949	10. Surono, Jend	1963-1974
2. A.H. Nasution, Kol. Inf	1949-1952	11. Makmun Murod, Jend	1974-1977
3. Bambang Sugeng, Kol. Inf	1952-1955	12. Widodo, Jend	1977-1980
4. Bambang Utuyo, Mayjen	1955-1962	13. Poniman, Jend	1980-1983
5. A.H. Nasution, Jend	1962-1962	14. Rudini, Jend	1983-1986
6. A. Yani, Letjend	1962-1965	15. Tri Sutrisno, Letjen	1986-1988
7. Suharto, Jend	1965-1968	16. Edi Sudrajat, Jend	1988-1993
8. M. Panggabean, Jend	1968-1969	17. Wismoyo Arismunandar, Letjen	1993-
9. Umer Wirahadikusumah, Jend	1969-1973		

HARI KELAHIRAN : 15 Mei

- Int : Pierre Curie, Ilmuwan Prancis (1859); William Lamb, Negarawan Inggris (1779).
- Nas : DR M. Alwi Dahlan, Ilmuwan (1933); Akhmad Sunaryo, Ilmuwan 1910)

TNI-ANGKATAN LAUT



Motto : *Jalesveva Jayamahe*
Artinya : *Di Laut Kita Jaya*

ELEMEN-ELEMEN :

1. Garuda Pancasila adalah falsafah negara Republik Indonesia yang sepenuhnya menjadi unsur utama lambang AL.
2. Jangkar melukiskan semangat bahari dan kecintaan prajurit AL terhadap seluruh nusantara.
3. Rantai yang melilit pada jangkar melukiskan semangat kesatuan dan persatuan seluruh gugusan kepulauan RI.
4. Padi diantara kapas melukiskan cita-cita kemakmuran bangsa Indonesia dengan kecukupan pangan.
5. Kapas yang menjadi lambang sandang melukiskan cita-cita kesejahteraan bangsa dengan memiliki cukup pakaian.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT

1. Nasir Laksamana	1946-1948	7. R.S. Subiakto, Laksamana	19 -1977
2. Subiyakto, Laksamana	1948-1950	8. Waluyo Sugito, Laksamana	1977-1983
3. R.E. Martadinata, Laksamana	1960-1966	9. M. Ramli, Laksamana	1983-1986
4. Mulyadi, Laksamana	1966-1969	10. R. Kasenda, Laksdya	1986-1989
5. Sudomo, Laksamana	1969-1973	11. M. Arifin, Laksdya	1989-1993
6. R. Subono, Laksamana	1973-19	12.. Tanto Kuswanto, Laksda	1993-

TNI - ANGKATAN UDARA



Motto : *Swa Bhuwana Paksa*
Artinya : *Sayap Tanah Air*

ELEMEN-ELEMEN :

1. Sayap yang mekar melukiskan kesiap-siagaan prajurit udara RI untuk melindungi tanah air.
2. Anak Panah dalam cengkeram menyatakan bahwa TNI-AU senantiasa siaga untuk mengusir musuh-musuhnya.
3. Perisai dengan peta seluruh kepulauan Indonesia melukiskan wawasan yang harus dilindungi.
4. Butir Padi berjumlah 45 buah melukiskan tahun kemerdekaan RI.
5. Biji Kapas diantara butir-butir padi yang berjumlah 8 buah melukiskan bulan kemerdekaan.

HARI BERSEJARAH : 15 Mei

- Int : PM. Malaysia Datuk Hussein Onn mengundurkan diri diganti Mahathir M. (1981).
- Nas : Pres. Suharto terpilih dari 6 tokoh Asia berprestasi oleh Washington Times, 1983

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

1. Suryadi Suryadharna, Komodor	1945-1962	7. Ashadi Tjahjadi, Marsekal	1977-1983
2. Demar Dhani, Marsekal	1962-1965	8. Sukardi, Marsekal	1983-1986
3. Sri Mulyono Herlambang, Marsekal	1965-1966	9. Oelomo, Marsdya	1986-1990
4. Roesmin Nurjadin, Komodor Udara	1966-1969	10. Siboen, Marsdya	1990-1993
5. Suwoto Sukendar, Marsekal Madya	1969-1973	11. Rilo Pambudi, Marsda	1993-
6. Saleh Basarah, Marsekal Madya	1973-1977		

KEPOLISIAN RI



Motto : **Rastra Sewakotama**
Artinya : **Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa**

ELEMEN-ELEMEN :

1. Bintang berjumlah 3 buah melambangkan ketiga falsafah Kepolisian RI yaitu "Tri Brata".
2. Perisai melambangkan tugas anggota Kepolisian sehari-hari yaitu melindungi seluruh warga negara RI.
3. Sinar Obor melambangkan sifat anggota kepolisian yang senantiasa memberi petunjuk dan penerangan bagi rakyat.
4. Tugu yang berdiri kokoh dan tegak melukiskan semangat pengabdian Kepolisian sebagai tiang penyangga negara.
5. Padi-Kapas melukiskan cita-cita kemerdekaan RI yaitu mengantar negara mencapai masyarakat makmur dan sejahtera.

KEPALA KEPOLISIAN RI

1. Sukanjo Cokrodialmojo, Jend. Pol	1945-1959	7. Widodo Budidarmo, Jend. Pol	1974-1978
2. Sukamo Joyonagoro, Jend. Pol	1959-1963	8. Awaluddin Jamin, Jend. Pol	1978-1982
3. Sucipto Danukusumo, Jend. Pol	1963-1965	9. Anton Sudjarwo, Jend. Pol	1982-1986
4. Soetjipto Judodihardjo, Jend. Pol	1965-1968	10. Sanusi, Letjen. Pol.	1986-1991
5. Hugeng Imam Santoso, Jend. Pol	1968-1971	11. Drs. Kunarto, Jend. Pol	1991-1993
6. M. Hassan, Jend. Pol	1971-1974	12. Drs. Banurusman, Mayjen. Pol.	1993-

HARI KELAHIRAN : 16 Mei

- Int : Henry Fonda, Aktor AS (1905); Marie G. Agnesi, Matematikus Itali (1718).
- Nas : Mr Moh. Rum, ex PM RI. (1908); Letjen Yogie SM, Gub. Jawa Barat (1929).

WASPADALAH
Terhadap Ancaman Pidana Kuhp

DELIK	PASAL	ANCAMAN/MAKSIMUM
Pencurian	362	5 tahun
Penipuan	378	4 tahun
Pemerasan	368	9 tahun
Penggelapan (<i>umum</i>)	372	4 tahun
Penggelapan (<i>aparap</i>)	415	7 tahun
Penadahan	480	4 tahun
Menghancurkan/Merusak (<i>barang</i>)	406	2 tahun 8 bln.
Pengeroyokan/Pengrusakan	170	7 tahun (<i>luka</i>), 9 tahun (<i>luka berat</i>), 12 tahun (<i>mati</i>).
Mendatangkan bahaya umum	187	12 tahun (<i>Barang rusak</i>) 13 tahun (<i>Bahaya Maut</i>)
Penganiayaan	351	2 tahun 8 bln. (<i>Biasa</i>) 5 tahun (<i>Berat</i>) 7 tahun (<i>Mati</i>)
Kematian Karena Lalai	359-360	5 tahun (<i>Luka berat/Mati</i>) 9 bulan (<i>Penderitaan</i>)
Pembunuhan	338	15 tahun
Penculikan	328	15 tahun
Merampas Kemerdekaan	333	8 tahun 9 tahun (<i>Luka berat</i>) 12 tahun (<i>Mati</i>)
Merusak Kesopanan	281	2 tahun 8 bln.
Perzinahan	284	9 bulan
Perkosaan	285	Tergantung Hakim
Merusak Kehormatan Orang	310	9 bulan (<i>Ringan</i>)
Menyogok/Menyuap	209	2 tahun 4 bln.
Menerima Suap/Sogok	418-419	5 tahun
Membela Kejahatan	221	9 bulan
Laporan Palsu	220	1 tahun 4 bln.
Memalsukan Mata Uang	244	15 tahun
Membuat Surat Palsu	263	6 tahun
Perjudian	303	2 tahun 8 bln.
Kenakalan	489	Tergantung Hakim
KEJAHATAN NON KUHP		
Kejahatan Bersenjata Api	UU. No. 12/ 1951	20 tahun/mati (<i>Seumur hidup</i>) 10 tahun (<i>Senjata Pemukul</i> , <i>Menikam, menusuk</i>)
Kejahatan Narkotika	UU. No. 9/ 1976	2 tahun/Hukuman Mati

HARI BERSEJARAH : 16 Mei

- *Iuf* : Pesawat Sovyet menjatuhkan kapsul di Planet Venus untuk mendapatkan info (1969).
- *Nas* : Indonesia resmi menjadi anggota WHO (World Health Organisation) (1950).

DELAPAN WAJIB ABRI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha Untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

11 AZAS KEPEMIMPINAN ABRI

1. TAQWA ialah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepadanya
2. ING NGARSA SUNG TULADA Yaitu memberi suri-tauladan dihadapan anak buahnya
3. ING MADYA MANGUN KARSA Yaitu ikut bergiat menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
4. TUT WURI HANDAYANI Yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
5. WASPADA PURBA WISESA Yaitu selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.
6. AMBEG PARAMA ARTA Yaitu dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
7. PRASAJA Yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
8. SATYA Yakni sikap loyal yang timbal-balik dari atasan terhadap bawahan, dari bawahan terhadap atasan dan kesamping.
9. GEMI NASTITI Yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
10. BELAKA Yaitu kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakannya.
11. LEGOWO Yaitu kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung-jawab dan kedudukannya kepada Generasi berikutnya.

TUJUH AZAS KEPEMIMPINAN Dan KOMUNIKASI SOSIAL ABRI

1. Konstitusionil, ialah prilaku yang berorientasikan U.U.D. 45, peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan program pemerintah.
2. Mengutamakan tindakan pencegahan dari pada tindakan penanggulangan agar tidak tertindak.
3. Kemanusiaan, ialah prilaku yang berdasarkan diri kepada hak-hak azasi manusia dan yang dilandasi oleh keadilan dan peradaban.
4. Kekeluargaan dan kegotong-royongan
5. Mendidik untuk menanamkan kemampuan
6. Mengayomi dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan.
7. Persuasif, ialah meyakinkan orang lain, agar mereka menyadarinya sebagai keyakinannya sendiri dan melahirkan rasa tanggung-jawab.

HARI BERSEJARAH : 17 Mei

- Int : Kemerdekaan Norwegia, negara yang terletak di Eropa Utara (1914).
- Nas : Hari Perpustakaan Nasional (1980).

"SAPTA MARGA"

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

KEPRIBADIAN SAPTA MARGA Sebagaimanifestasi KEPRIBADIAN PANCASILA DENGAN WUJUD AMALNYA

1. Sadar akan kedudukannya sebagai anggota masyarakat/warga negara kesatuan RI yang bersendikan Pancasila.
2. Memiliki sifat patriot yang bertanggung jawab dan pantang menyerah dalam mendukung dan membela Ideologi Negara.
3. Berjiwa ksatria yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berani membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Menjadi Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Setia dan menepati janji serta sumpah Prajurit.

SUMPah PRAJURIT

SAYA BERSUMPah.
DEMI ALLAH :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah / putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

CATUR PRASETYA

1. SATYA HAPRABU : Setia kepada Negara dan Pimpinan.
2. HANYAKEN MUSUH : Mengenyahkan musuh-musuh Negara dan Masyarakat.
3. GINEUNG PATRIDINA : Mengagungkan Negara
4. TAN SATRISNA : Tidak terikat trisna kepada sesuatu.

HARI KELAHIRAN : 17 Mei

- Int : Ayatullah Khomaini, (1900); Vasein Djuranovic, PM Yugoslavia (1925).
- Nas : Martono, Mentran, Kab. Pem. IV (1925); Kartini Mulyadi SH, Notaris (1930).

GRATIS, UNTUK PELANGGAN HARIAN SURYA I DISKON DI RATUSAN TEMBOK BELAJAR



041-851543-4 041-8515900

Agus bopik berbisnis!

SURYA I

NO. 001 TAHUN 38 • ISSN 0215-506X

KAMI MELAYANI ANDA HINGGA MENJELANG TIDUR IKLAN CIKIL SURYA Bulas/d 20.00 WIB, Cukup t 841 9600 Mengapa harus bonor kalian hadapnya sama

Muladi tolak ratih

Ratih pecah Kabinet Habibie



Pembentukan ratih berdasar UU 20/1982 Raih tidak untuk kepentingan politik tertentu

Mentaham/angab Jenderal TNI Wicakso

"Nantinya akan menumbuhkan rakyat sipil yang memiliki sifat dan sikap lebih militer daripada militer"

Ketua DPP PAN Dr HM Amien Rais

"Saya usulkan raih Mtunda, karena menampung keinginan rakyat."

Dr Muladi SH

Tol Mbak Tutut

Gus Dur: Saya tak temui Soeharto

PERLU UU LEBIH DULU WIRANTO MINTA 2,5 MILIAR

Jakarta, Gurya Menteri Kehakuman Prof Dr Muliati SH ternyata tak setuju dengan rencana pemerintah untuk menambah jumlah raih (raih) yang akan dibentuk. Program raih itu, meski ditentang oleh beberapa kalangan, raih baru dapat dibentuk setelah ada undang-undang yang mengatur pembentukan raih. "Dibarengkan, maka pembentukan raih itu sudah lama, tapi belum ada hukumnya sangat besar. Kalau raih sudah ada, maka raih akan lebih mudah dibentuk," kata Muliati. Menurut Muliati, dasar pembentukan raih adalah Undang-undang Pokok Hukum Acara No 22 tentang pokok-pokok Bah. No 22 tentang pokok-pokok, dalam undang-undang itu diwajibkan, untuk pembentukan raih harus dibarengkan dengan undang-undang.

Menurut Muliati, saat ini pemerintah sedang menyiapkan raih yang akan dibentuk. "Saya usulkan raih Mtunda, karena menampung keinginan rakyat." Muliati juga mengusulkan raih yang akan dibentuk. "Saya usulkan raih Mtunda, karena menampung keinginan rakyat."

Di mana hansip, wanra dan kamra?

SUDAH KEBERES? Ombi: Dr Amien Rais, ketua DPP PAN, mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk raih yang akan menampung keinginan rakyat. "Saya usulkan raih Mtunda, karena menampung keinginan rakyat."

Baramuli: Gus Dur juga tak dihargai

KETUA DPP/Dr AA Baramuli yang biasanya dikenal sebagai orang yang berani berbicara, kali ini terlihat sangat marah. "Saya usulkan raih Mtunda, karena menampung keinginan rakyat."



Dana Dakab untuk 'suntik' Bank Duta

Jakarta, Gurya



JP 26 Mei 1999

Siapkan Komunike III

JP- tai-partai yang tidak akan me- lakukan pengadilhan terhadap residen dari Partai Kea- l Dns Didin Hafiduddin gatakan bahwa minggu ada komunike tahap III a partai politik, untuk ikan "darah segar" bagi n reformasi. Hal itu kan Didin seusai dialog f dengan mahasiswa dan ual di gedung Pusat n Mahasiswa (PKM) marin. Didin, komunike III t Didin, komunike III dibuat oleh partai-partai antaranya. Partai Umata Baru, dan PSII. Didin ut, selain untuk mem- "darah segar" bagi ke- reformasi, komunike ta- ni berupaya agar pemilu ampai gagal. "Sebab, ka- ipai pemilu gagal, dam- akan sangat berat bagi akat", katanya. ah yang diambil sebelum s, jelas Didin, "banyak s komunike bersama. pemilu, mungkin akan an suatu bentuk koalisi menghadapi partai-partai uo yang tidak mengingin- ubuhan. Termasuk, par-

Pemekaran Kodam Bukan dari Rakyat

Jakarta, JP- Rencana TNI memekarkan kodam menjadi 17 dinilai tidak realistis dan mengada-ada. Apa- lagi, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis sehingga aneh kalau ide pemekaran itu tetap dilaksanakan.

Demikian penilaian pengamat politik LPI Dr Hermawan Sulistyono dan Kenua YLBHI Bambang Widjojanto. Keduanya berbicara kepada wartawan setelah tampil dalam diskusi tentang militer di Park Line Hotel, Jakarta, kemarin.

Menurut Hermawan, yang perlu ditingkatkan dari TNI adalah kemampuan mengendalikan kerusuhan dan peningkatan kesejahteraan. Bukan pembentukan struktural kodam baru.

"Jelas tidak ada uangnya karena pembentukan kodam baru memerlukan biaya tidak sedikit," kata Hermawan.

Rasionalisasi ABRI saat Menhankam/Pangab dijabat Jenderal (Pur) L.B. Moerdani dengan menghapus kowilhan dan beberapa kodam saat itu bertujuan memperkecil personel ABRI sekaligus memperpendek ko-

mando di lingkungan ABRI. "Sekarang kok akan dimekarkan lagi. Ini kan membingungkan. Saya dengar, di kalangan TNI sendiri sebagian juga tidak sepakat atas pemekaran kodam itu," tutur Hermawan.

Justru tuntutan paling mende- sak saat ini adalah pemekaran instansi kepolisian dan penam- bahan personel polisi untuk menjaga keamanan negara ini.

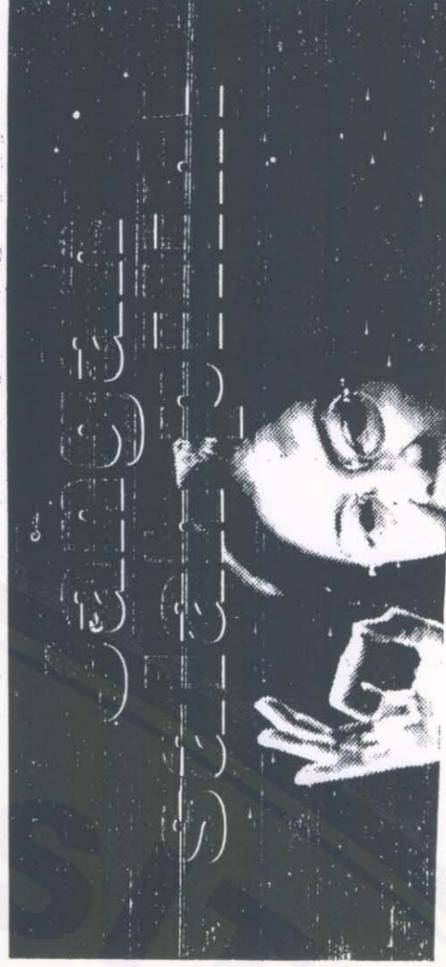
"Bukan malah sebaliknya me- nambah kodam baru," jelas Sulistyono.

Sementara itu, menurut Direk-

tur YLBHI Bambang Widjo- janto, alasan TNI bahwa pemekaran kodam akibat ada per- mintaan masyarakat hanya omong kosong. Sulit bisa dite- rima kalau ada kesimpulan aspi- rasi rakyat menghendaki penam- bahan jumlah kodam.

Jika rencana pemekaran kodam diwujudkan TNI, Bambang mengingatkan, itu berarti benten- tangan dengan paradigma baru keamananan.

Padahal, itu tidak dibutuhkan masyarakat. Justru yang men- desak bagaimana mengatasi keamanan. Dan itu tugas aparat kepolisian. "Logikanya, kepo- litisan yang dimekarkan sekaligus terpengaruh oleh reformasi. Soal layaknya pemekaran kodam bergantung pemerintahan masa- rakat setempat. Yang jelas, untuk Aceh, masyarakat tidak bisa menerima karena kepo- litisan yang dimekarkan sekaligus liter, Tidak tahu daerah lain," katanya. (bh)



PT. GURU
Denny Melati Sukma

Bank Rekap
Akan Di-BTO?

uh yang undangan itu, menyatakan tidak ada sanksi bagi Prabowo. Iklan itu kan juga bisa kan nama Prabowo. ta tetap berharap be- tandas Syamsul. Ketua Tim Gabungan ta (TGPF) kasus Mei iki Darusman beber- lalu menyatakan beber- bowo mengklarifikasi- muan di Makostad

a berlarut-larut, leba- rasi klarifikasi, sehin- gencuci nama baik ndiri," kata Marzuki rapi rencana kepu-



ER JAZZ D BENOIT sama "SHAKILA"

pianis jazz dunia noit akan tampil penyanyi jazz "SHAKILA" dalam watan tur 6 kota. di : Jakarta pada April 1999, Bandung Semarang 6 April, a 7 April, Surabaya an diakhir di Bali gal 10 April 1999.

ENOIT : GEDUNG PUTIH ir Jazz menggemari nya untuk nts piano, untuk komposisi ng cukup melodius, ilah karyanya untuk isik televisi dan

sus politik seperti penculikan aktivis politik. "Bowo baik-baik saja," katanya.

Menurut lelaki bertubuh kecil kelahiran Kebumen 29 Mei 1917 ini, Prabowo berada di Amman untu bisnis. Ia mengatakan, seba- gai orangtua hanya bisa mem- beri dukungan yang terbaik buat anak-anaknya.

Soal rencana Prabowo pulang, Sumitro mengaku dirinya tidak tahu sama sekali. Jika Prabowo mau pulang dan menganggap hal itulah yang terbaik, maka Sum- itro siap memberi dukungan.

Menghadapi berbagai masalah menyangkut Prabowo, Sumitro dengan tenang mengatakan yakin keadilan pasti datang. (tya/ant)

ilustrasi musik film. Benoit memang musikus serba bisa, dan inovator terkenal di lahan musik jazz dunia.

Karier musiknya dibuka sejak akhir tahun 70-an, dengan sejumlah album emas yang dilepas dibawah label GRP, Amerika. Sudah ratusan kali David Benoit manggung di 5 benua, tetapi sejauh ini, David merasa terkesan sewaktu bermain piano mengiringi "PATTI AUSTIN" untuk menghibur para tamu Gedung Putih, di depan Presiden Ronald Reagan di tahun 1988.

Prestasi lain yang pernah dicatat lewat tangan dan pemikiran David Benoit adalah perannya sebagai ilustrator musik film dan sejumlah acara televisi yakni untu film "The Stars Fell On Henrietta" (karya Warner Bros), "Cinderella" dan sejumlah acara teve : "All my Children"(ABC TV), Sisters, Shannon's Deal, This is America, Charlie Brown (NBC TV). Kedadangan ke Indonesia ini adalah untu ketiga kalinya di sponsori oleh:

A mild / H.M. Sampoerna dan dipromotori oleh Peter Basuki dari PT. Buena Produktama.

Tendangan...

"Persebaya sudah bertekad keluar sebagai pemenang tanpa adu penalti. Cukup 90 menit saja. Tetapi, kalau toh sampai adu penalti, kami sudah siap," kata Rusdy.

Rusdy menambahkan, ia sudah menyiapkan senjata pamungkas untu mendongkrak pertahanan PSMS, jika serbuan dari berbagai penjuru kandas. Senjata Pamungkas itu adalah tembakan geledek Eri Irianto dan Yoseph Lewono yang akan dilepaskan dari jarak jauh.

Kedua pemain itu tampil menjadi bintang saat Persebaya menaklukkan Perisikota 2-1 lalu. Saat itu, Eri mencetak gol dari tendangan bebas dan Lewono melepaskan tembakan dari jarak 40 meter untu mencetak gol kemenangan. "Kedua pemain itu bisa menjadi pamungkas kami dalam pertandingan nanti," kata Rusdy.

Dalam pertandingan semifinal ini, Persebaya akan menggunakan kostum kebesaran, hijau-hijau sedangkan PSMS— yang juga memiliki kostum ke-

Sambungan dari halaman 1

banggaan hijau-hijau—mengu- nakan kostum putih. Hal ini ter- jadi karena Persebaya menjadi juara Grup P dan PSMS runner up Grup Q.

Persebaya diunggulkan Sementara itu, bursa taruhan di Jakarta kemarin siang menyebutkan, bursa taruhan mengunggulkan Persebaya den- gan perbandingan 0,5 : 1. Bahkan perbandingan itu bisa saja berubah Kamis siang ini dan kemungkinan besar akan naik sampai dengan Persebaya unggul 1. Kenapa demikian, menurut salah seorang yang tidk disebutkan namanya, meng- stakan, hal itu tidak terlepas dari banyaknya orang yang menjagokan Persebaya bakal ke final.

Sedangkan untu semifinal kedua, tim Macan Kemayoran Persija Jakarta diunggulkan untu menggulingkan PSIS Semarang dengan ekor 0,5-1.

Trofi hilang Sementara itu, pengurus PSSI kini pusing tujuh keliling. Ini karena trofi sebagai lambang juara Liga Indonesia telah hi-

lang. Salah seorang karyawan PSSI yang tidak bersedia dise- butkan namanya mengatakan, hingga kemarin trofi yang ber- lapis emas itu belum ditemu- kan.

Juara Liga Indonesia yang terakhir adalah Persebaya, yang mengalahkan Bandung Raya di final 1997. Tetapi, ada informasi yang menyebutkan, Perse- baya tidak menerima trofi yang terbuat dari emas itu. Klub ha- bangaan areh-areh Surabaya itu hanya membawa pulang duplikat trofi bergilir.

"Saya tidak tahu persis diman- a trofi itu. Masalahnya Liga IV lalu kan berhenti di tengah ja- lan. Ya, kita berusaha keras untu menemukan trofi itu," kata karyawan PSSI itu.

Karyawan lainnya menyeb- utkan, mungkin saja trofi itu ditempatkan di sebuah bank untu menjaga keamanannya. Tetapi, ia tidak menyebutkan nama bank itu. "Yang jelas, kami sampai sekarang berusa- ha keras untu mencari trofi itu. Semoga saja bisa cepet ditemukan," kata karyawan PSSI itu. (rht/hri)

Wiranto...

Angkatan ke-5 Wiranto menjelaskan, untu langkah pemisahan Polri akan terus dilaksanakan bertahap, termasuk perubahan struktur organisasi, piranti lunak dan sosialisasi terhadap jajaran ABRI dan masyarakat.

"Selama masa transisi itu, kita tidak hanya mengoper- asikan Polri dengan sistem ter- pisah dari ABRI secara struk- tural, tetapi juga melalui pros- es kultural. Kebijakan ini untu menciptakan postur dan pe- nampilan Polri yang profesio- nal, mahir dan berwibawa," kata Wiranto.

"Saya minta pengertian selu- ruh masyarakat bahwa dalam masa transisi ini, kita memang baru dapat melakukan seba- gian reformasi Polri secara struk- tural. Namun secara bertahap, akan dilakukan pembenahan pada segenap sistem organisasi dan manajemen Polri sehinga mampu memberikan pelayanan masyarakat, serta berperan efektif dalam upaya penegakan hukum," tegas Wiranto.

Pemisahan Polri ini ditang- gapi positif. Ketua DPRD I Ja-

Sambungan dari halaman 1

tim Brigjen TNI H Sutarmas menilai pemisahan itu akan le- bih memandirikan dan mempro- fesionalkan Polri dalam men- jalankan peran di bidang kam- tibmas.

Sedangkan H Hudan Dardiri, Wakil Ketua DPRD I Jatim menyikapi hal itu dengan catat- an khusus.

"Perlu hati-hati, jangan sampai sejarah hitam terulang yang memunculkan permintaan angka- tan kelima, yakni adanya tuntut- an rakyat harus dipersenjatai," kata Hudan mengingatkan.

Hudan lalu membeber seja- rah pertama Polri saat dipim- pin Kapolri Sukanto, yang menem- patkan Polri dibawah Depdagri. Posisi itu berubah, saat KNIP memutuskan Polri dibawah kendali Perdana Menteri (PM) Sutan Syahrir.

Kemudian pada masa pen- dudukan Jepang 1942, polisi di- jadikan pasukan pelopor (*Tohu- betsu Keikatsu*). Lalu berubah menjadi Polisi Pelopor, dan ber- ganti lagi menjadi Polisi Istimewa tahun 1945. Polisi Istimewa ini diterjunkan Jepang untu membantu pertempuran. Sedang polisi biasa yang bertu- gas menangani kamtibmas.

Kemudian Polisi Istimewa berubah menjadi Mobile Polisi yang oleh Bung Karno diubah menjadi Polisi Militer (PM). Baru pada 1962 Bung Karno memisahkan menjadi Angkatan

Kepolisian RI (AKRI).

Tahun 1966 ketika muncul- nya empat angkatan, yakni TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Ang- katan Kepolisian, ini Partai Komunis Indonesia (PKI) men- untut adanya angkatan kelima. "PKI minta rakyat dipersenjatai dan dilatih di Halim Perdana Kusuma," kenangnya.

Disintegrasi Di Pekanbaru, Kapolri Jen- deral Pol Drs Rusmanhandi meng- akekan, dengan segala upaya yang ada, Polri bertekad mem- lihara stabilitas kamtibmas karena tidak ingin timbul risiko disintegrasi bangsa.

Dalam amanat tertulis pada pelantikan 198 bintang lulusan Sekolah Kepolisian Negara (SPN), di Pekanbaru, Kapolri menggambarkan beratnya tan- tangan yang dihadapi Polri berkaitan munculnya krisis yang mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan bermasyar- akat, berbangsa dan bernegara.

"Perkembangan situasi ini berpengaruh besar terhadap upaya pemeliharaan stabilitas kamtibmas," kata Kapolri dalam sambutan dibacakan Ir- polda Riau Kolonel Drs Fach ruddin Bakar.

Apalagi, lanjutnya, gangguan kamtibmas yang terjadi bukan hanya kasus kriminal konven- sional, tapi juga yang berskala luas yang cenderung menganc- am persatuan kesatuan bang- sa, termasuk akal kerusuhan massal belakangan ini. (tri/ant)

GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (IMKI PRIMA)

TERBUKTI..... Kualitas & kurikulum program BBA, MBA, Ph.D Global Institute of Management dipakai STANDAR PENGELOLAAN PROGRAM BBA, MBA, Ph.D di seluruh Indonesia

MENERIMA MAHASISWA BARU (ANGKATAN VII) BBA, MBA, Ph.D

Kerjasama dengan Universitas Luar Negeri yang diakui Internasional & Nasional (West Coast Institute of Managements Technology Perth, Westerns Australia) KULIAH PERDANA 14 APRIL 1999

Y.A	BBA 6.050.000	MBA 10.000.000	
Registrasi	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-	
Pendidikan 25-03-99	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Program Weekend Executive Sabtu : 15.30-21.00 Minggu: 09.00-14.30
Pendidikan 25-03-99	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	
YA PENDIDIKAN PROGRAM BBA : Rp. 4.050.000,-	BERSISWA REGISTRASI PENDAFTAR SEBELUM 20/3/99		
PROGRAM MBA : Rp. 7.000.000,-			

Informasi dan Pendaftaran
1. Kantor Operasional : Jl. Ngajati Jaya 3 Telp. 031 - 5665051 (Berh)
HP 081-8370781 (Iip Idus), HP 081-8395066 (Iip Mulyati), 081 1336467 (Djumadi)
Kuliah Program BBA-MBA : World Trade Centre Building Surabaya 6th Floor, Jl. Pemuda 27-31 Surabaya

TERUS TERANG HANYA PROGRAM BBA IMKI PRIMA YANG BISA BEGINI

SEJARAH KEPOLISIAN

19 Agustus 1945- Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Polisi Negara Republik Indonesia masuk dalam Kementerian Dalam Negeri

1 Juli 1946- Jawatan Kepolisian dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, dan dijadikan jawatan tersendiri langsung di bawah perdana menteri

15 Mei 1949- Dibentuk Polisi Pemerintahan Militer (PPM), terdiri gabungan Polisi Negara dan Corps Polisi Militer (CPM)

17 Agustus 1950- Negara kesatuan terbentuk kembali. Dibentuk Jawatan Kepolisian Indonesia kemudian dinamakan Kepolisian Negara. Pimpinan Kepolisian Negara di lapangan politik polisional tetap dipegang Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Sedangkan pimpinan sehari-hari ada pada Kepala Kepolisian.

1964- Kepolisian Negara menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk salah satu angkatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Mulai 1 April 1999- Kepolisian secara bertahap dilepaskan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Jakarta, Surya
Menhankam/
Pangab Jenderal
TNI Wiranto me-
mulai dengan pemisahan
Polri dari ABRI yang
dilaksanakan mulai 1 April
1999, pimpinan ABRI menyam-
paikan saran kepada Presiden
BJ Habibie untuk mengubah
nama ABRI menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI).



Wiranto

FOTO: SURYADOK

mua komponen
bangsa/masya-
rakat agar dapat
memahami dan
mendukung langkah-langkah
yang telah menjadi kebijakan
ABRI, khususnya dalam mewujudkan
masyarakat demokratis, ter-
peliharanya Negara Kesatuan
RI berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, serta berlandaskan

supremasi hukum.
Wiranto menjelaskan, lahirnya
konsep kebijakan strategi Menhankam/Pangab
tentang Paradigma Baru Peran
ABRI pada Oktober 1998 meru-
pakan wujud dari dorongan si-
kap kesadaran ABRI, yang memandag
pentingnya reformasi internal
sebagai upaya penataan dan
penyempurnaan sistem, doktrin,
struktur dan pranata ABRI
lainnya.
Sebagai tindak lanjut kebijak-
an itu, kata Wiranto, ABRI mulai
1998 menjabarkannya, ditandai
dengan penataan organisasi sosial
politik ABRI. Reformasi internal
itu dilaksanakan secara bertahap
dan berlandaskan undang-undang.

"Dengan kelurnya Polri, organisasi
ABRI hanya terdiri TNI AD, TNI
AL, dan TNI AU. Oleh karenanya,
pimpinan ABRI mengajukan saran
kepada Presiden selaku pemegang
kekuasaan tertinggi atas TNI AD,
TNI AL, dan TNI AU, untuk mengu-
bah nama organisasi ABRI menjadi
TNI," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (1/4).
Berkaitan dengan pelepasan
Polri mulai 1 April, katanya, ja-
jangan Dephankam-ABRI akan
melaksanakan upacara pemisahan
Polri dari ABRI. Mulai 1 April
itu pula, wewenang pembinaan
dan operasional Polri dilimpahkan
dari Mabes ABRI ke Dephankam.
Berkaitan pemisahan itu
Wiranto mengimbau kepada se-

Bersambung ke halaman 12 kolom 7

Rudini: Dana KPU tak bocor

Jakarta, Surya

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rudini men-
bantah tuduhan dana KPU telah
bocor sekitar Rp 29 miliar. Ma-
salah ini sempat mencuat di
sela-sela rapat pleno Rabu (31/3)
kemarin di Gedung Lembaga
Pemilihan Umum (LPU).

Kebocoran dana itu naik ke
permukaan setelah terdapat
selisih jumlah dari dana yang
akan dilimpahkan ke KPU.
Dalam laporan kemarin se-
dikit, alokasi dana pemilu dari
APBN 1998/1999 dan 1999/2000
plus bantuan dari UNDP
sejumlah Rp 1,3 triliun. Sejuah
ini dari APBN 1998/1999 di-
alokasikan Rp 360 miliar, dan dari
dana itu telah digunakan LPU
Rp 182 miliar, sebelum diberi-
kan ke KPU. Namun dalam la-
poran disebutkan dana tersisa
hanya Rp 148,2 miliar sehingga
ada selisih Rp 29,8 miliar.
Angka ini dipertanyakan
Bungbang Sulistomo dari Partai
Aliansi Demokrasi Indonesia
(PADDI) dan Sutradara Ginting
(PKP). Mereka menuntut agar
diusut kemana larnya dana itu.
Sementara itu KPU belum
mendapat wewenang untuk
menangani anggaran pemilu.
Rudini mengaku belum tahu
soal hitung-hitungan alokasi
dana, termasuk soal jumlah dan
alokasinya.

"Soal dana itu urusan pem-
erintah, KPU cuma mengusulkan
saja. Diberi yang syukur, tidak
ya tak apa-apa. Sebab bunyi UU
Parpol dan UU Pemilu 1999

memang begitu," jelas Rudini.
Soal berapa besar dana pem-
ilu, Rudini menolak meny-
ebutkannya karena tidak hafal.
"KPU hanya ditugasi membuat
rencana anggaran dana pemilu
untuk diusulkan ke pemerintah,
tidak untuk menuntut dana
pemilu," tegas Rudini.
Hal sama dikatakan Hendrik
Kuok (PRD). Ia merasa heran
dengan sejumlah pimpinan par-
pol yang ada di KPU. "Tidak
tahu isi UU dan cenderung asal
komentar. Otomatis analisisnya
tanpa dasar," tambahnya.

Bertemu Habibie
Rapat pleno KPU yang ber-
langsung enam jam dan tertut-
up akhirnya menyepakati untuk
bertemu dengan Presiden BJ
Habibie. "Setelah melalui perde-
batan panjang, kami berkesim-
pulan untuk bertemu dengan
presiden dalam bentuk pertem-
uan konsultasi," jelas Rudini
sesuai memimpin rapat.

Menurut Rudini, karena pre-
siden yang mengangkat KPU,
maka KPU merasa perlu berkons-
ultasi dengan presiden. Dalam
pertemuan itu juga akan dilapor-
kan kerja KPU selama ini.
Kapan KPU konsultasi de-
ngan presiden, Rudini mengaku
tak bisa mengatur presiden dan
akan menyesuaikan dengan jad-
wal presiden.

Tentang keputusan KPU
melarang pejabat termasuk
menteri kampanye, Rudini me-
negaskan KPU tetap teguh me-

Bersambung ke halaman 11 kolom 6

Singapura, Surya
Perusahaan telekomunika-
si Belanda, KPN NV
membantu mengatur dan mem-
bantu menjamin utang bank
sebesar 91 juta dolar Singapura
untuk pengusaha Setyawan
Djody pada 1996. Jaminan itu
dikeluarkan dalam rangka
memperoleh kepemilikan sa-
ham PT Telkomsel.
Harian *Asian Wall Street
Journal* (AWSJ) edisi 30 Maret
1999 menulis mengenai 'dugaan
suap' dan kolusi tersebut semu-
la disiarakan Televisi Belanda
Ntuterk.
KPN NV, yang tidak mengung-
kap hal itu dalam laporan tahu-
n hingga ambruknya ekonomi
Asia tahun 1997 lalu, bisa ber-
hadapan dengan pengawasan

para pengatur (regulator) AS.
Sebab rekening-rekening depo-
sito KPN di AS diperdagangkan
di Pasar Bursa New York.
Dikonfirmasi sebuah media
Belanda, jurubicara KPN meng-
akui perusahaannya membantu
pengatur pembayarannya bagi
buah perusahaan milik Setia-
wan Djody, yang disebutnya se-
bagai seorang rekan bisnis (kro-
ni) putra mantan Presiden Soe-
harto, Tommy Soeharto.
Bantuan itu dilakukan untuk
memperoleh 5 persen kepemil-
ikan saham di Telkomsel, salah
satu jaringan kerja telepon se-
luler terbesar di Indonesia.
Seperti diberitakan harian
ini, Setiawan Djody yang juga
budayawan itu berkali-kali me-
ngatakan tidak pernah menda-

pat fa-
ana,
Di-
hubu-
ma S-
to. N-
bung-
nah n-
ga Ce-
Suryo-
ta, ak-
Mei-
rusah
memb-
yakni
agar
bisa n-
ham T-
dolar
KPI-
kan se-

"Pengungsi juga

Pontianak, Surya

Ketua MUI Kalbar, HA Malik
mengemukakan kondisi fisik
para pengungsi akibat kerusu-
han Sambas kini membaik, ter-
utama kebutuhan pangan. Na-
mun untuk kebutuhan lain se-
perti sandang dan biologis (seks)
perlu mendapat perhatian se-
mua pihak.

Untuk kebutuhan sandang dan
kebutuhan rohani sedang di-
usahakan dengan meminta ban-
tuan Departemen Agama. "Yang
tidak kalah penting kebutuhan
biologis bagi pengungsi yang su-
dah berkeluarga," ujar Malik
yang juga Kakanwil Depag Ka-
lbar di Pontianak, Rabu (31/3).

Dia mengakui sudah menden-
gar bahwa para pengungsi, yang
ditampung di GOR Sepakbola
Sultan Syarif Abdurrahman dan

beberapa stadion olahraga lain-
nya di Pontianak, meminta agar
pihak berwenang dapat memaha-
mi tuntutan biologis para peng-
ungsi yang kini di Pontianak su-
dah mencapai 21 ribu jiwa.

"Paling tidak, pada jam tert-
entu listrik stadion dimatikan,"
katanya.

Menurut Malik, para pengun-
si yang sudah berkeluarga hen-
daknya 'pandai-pandai' dalam
memenuhi tuntutan kebutuhan
tersebut. Jangan di tempat terbu-
ka dan harus hati-hati, karena
hal itu menyangkut nilai agama
yang harus diindahkan.

Sementara itu sebanyak
1.573 pengungsi dari Sambas,
Kalimantan Barat (Kalbar), di-
pastikan telantar di Pulau Ma-
dura karena mereka sudah ti-
dak memiliki sanak keluarga

pelag-
Ke-
tauan
sian di
trokan
Merek
(31/3) d-
perjala
nekad l-
sian, ku-
ditelan-
Kape-
san Po-
berkap
Pelabel
05.55 w-
kaki di
pengu-
tidak s-
yang m-
Keda-
peranta

Tendangan geledek E

10 BESAR



Jakarta, Surya

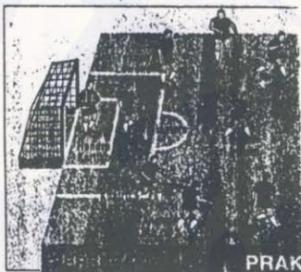
Perburuan
Persebaya un-
tuk memperta-
hankan gelar
juara Liga Indo-
nesia (LI), Ka-
nis (1/4) sore
ini, memasuki
momen yang sa-
ngat penting. Aji Santoso dkk
diuji tim tangguh PSMS Medan
pada pertandingan semifinal LI
V di Stadion Utama Senayan
Jakarta.

Persebaya tentunya harus
bisa mengatasi perlawanan
PSMS jika ingin melangkah ke
final. Jika gagal, Persebaya ha-
rus merelakan gelarnya lepas.

Supporter fanatik Persebaya
yang tak sempat pergi ke Jakar-
ta bisa menikmati partai Perse-
baya vs PSMS yang diperhi-
tungkan berlangsung dengan
tempo tinggi dan keras itu lewat
layar TVRI serta ANteve mulai
pukul 16.00 wib.

Semifinalis lainnya, Persija
Jakarta vs PSIS Semarang juga
akan ditayangkan kedua televisi
tersebut, mulai pukul 18.15 wib.
Ini dengan catatan, partai Perse-
baya vs PSMS tak terjadi perpan-
jangan waktu serta adu penalti.

Pelatih Persebaya Surabaya
Rusdy Bahalwan tak mengelak
bahwa duel Persebaya vs PSMS
Medan adalah pertemuan dua tim
yang beda karakter. Persebaya



PRAK

DI TVRI-ANteve
Pkl 16.00 WIB

tampil dengan teknik dan didu-
kung oleh kerja sama tm, sedang-
kan PSMS akan tampil dengan
karakter permainan keras.

Ia mengatakan, kunci pertan-
dingan nanti akan terjadi di lini
tengah. Untuk itu, Rusdy men-
ginstruksikan kepada Uston
Nawawi dan Eri Irianto bisa
merebut lini yang paling vital
ini. Mereka akan bertarung ket-
at dengan Edwin Daud dan Af-
fan Lubis.

Pelatih bertangan dingin itu
akan menginstruksikan kepada
pemain tengahnya untuk mela-
kukan *pressing* ketat pada saat

PSMS ak-
an balik.
Rusdy
runkan l-
sembuh
Padalah
Umum l-
minta ag-
bermasa
rahatkan
"Saya s-
bicara de-
jelaskan
melakuk-
ma berad-
muanya s-
turun," ki-
yo kemar
Tetapi,
gai pelati-
dak akan
dak untul

Surya

1 April 1999



JATI DIRI

Setelah Polisi Pisah dari ABRI

HARI ini, bersamaan dengan peringatan HUT ABRI, Pangab Jenderal TNI Wiranto akan mengumumkan pemisahan polisi dari ABRI. Setelah itu, mulai tahun depan, kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Pemisahan polisi dari ABRI sudah lama diusulkan banyak kalangan, khususnya praktisi hukum. Mereka berpendapat, sebagai institusi penyidik tunggal, kepolisian harus otonom. Bebas dari kepentingan dan campur tangan instansi lain, termasuk dari jajaran ABRI.

Pada awal-awal kemerdekaan, kepolisian pernah terpisah dari ABRI. Lembaga penyidik tunggal ini tidak berada di bawah ABRI, tetapi merupakan lembaga otonom yang dipimpin menteri kepolisian.

Status tersebut kurang lebih sama dengan negara-negara lain yang menempatkan polisi sebagai penyidik tunggal pada kedudukan bebas dan mandiri. Tidak berada di bawah struktur angkatan bersenjata. Ada yang menempatkan polisi di bawah Departemen Dalam Negeri dan ada pula yang mendudukkannya sebagai Departemen Kepolisian tersendiri.

Kita berharap, setelah pisah dari ABRI, kepolisian benar-benar mandiri sebagai penyidik tunggal. Tidak ada lagi konflik kepentingan ketika dihadapkan pada penyidikan perkara yang melibatkan oknum dan instansi militer tertentu.

Selama ini banyak orang mencatat, jika sebuah perkara melibatkan oknum militer yang dianggap sebagai saudara tua Polri, kepolisian sering melitigasi.

Bahkan, untuk perkara yang melibatkan kepentingan instansi militer tertentu, kepolisian sering hanya terima jadinya. Artinya, proses penyidikan perkara dilakukan di instansi lain —yang di kalangan LSM dikenal dengan instansi ekstrajudisial (bukan instansi yang berwenang melakukan penyidikan perkara). Polisi tinggal membuat berkas perkaranya.

Hal yang sama sering terjadi jika perkara itu berupa tindak pidana politik. Masyarakat seolah maklum —meski tetap tidak bisa menerimanya—, untuk perkara tindak pidana politik, yang mengawali proses penyidikan dan penangkapan bukan polisi.

Di kalangan pegiat politik dan LSM sudah tahu bahwa jika mereka harus ditangkap atau harus diperkarakan secara hukum, institusi yang mengawali proses penangkapan itu bukan polisi.

Kalangan aktivis tahu, polisi tinggal membuat surat penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarganya tanpa polisi sendiri pernah melakukan penangkapan. Tragisnya, setelah itu polisi dipaksa, atau paling tidak sudah tahu sama tahu, untuk mengumumkan bahwa polisi telah melakukan penangkapan.

Contohnya, kasus penculikan Andi Arief dan penangkapan tidak prosedural tersangka pembunuh Marsinah. Semua orang tahu, yang melakukan penangkapan bukan polisi, tetapi instansi ekstrajudisial. Beberapa hari kemudian baru polisi diminta untuk mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah menangkap orang yang dimaksud.

Persoalannya, setelah hari ini pisah dari ABRI, apakah dengan sendirinya profesionalisme polisi dapat ditegakkan? Belum tentu. Pemisahan struktur Polri dari ABRI baru membuka kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme.

Dengan kata lain, meskipun otonomi sudah diperoleh implementasi, profesionalisme bergantung pada Polri sendiri serta komitmen instansi lain untuk turut menegakkan kemandirian polisi.

Penyakit bangsa ini yang secara kultural sangat kronis ialah gengsi pada salah kaprah untuk menjaga wibawa atasan dan kehormatan mitra yang sering membungkus hukum itu selama ini tidak hanya dilakukan sesama instansi militer, tetapi juga pejabat tinggi negara lain dan kelompok yang memiliki kekuatan memaksa polisi untuk tidak berkulit melakukan penyidikan.

menyuarakan kepentingan eksekutif, yang sering mengharuskan kesediaan untuk berkompromi serta saling "memberi dan menerima".

Seperti halnya para politikus sipil yang dikritiknya, dan karena itu perlu diberinya tuntunan, para perwira itu juga sulit menolak godaan yang muncul dari pemilihan kekuasaan yang tidak akuntabel. Para perwira tidak bisa (tidak berusaha) mengelak dari penyakit pokok Orde Baru, yaitu korupsi politik. Sistem Orde Baru mengembangkan tuntutan, harapan, dan kebiasaan bahwa setiap pejabat menggunakan wewenang jabatannya bukan hanya untuk memperkaya diri dan keluarganya, tetapi juga "teman seperjuangan"-nya.

Intervensi ke dalam politik dan pemerintahan tanpa kemampuan mengelakkan diri dari korupsi bukan hanya membahayakan keutuhan internal kelembagaan ABRI, tetapi bahkan telah membahayakan keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa. Krisis akhir-akhir ini jelas sangat berkaitan dengan fenomena korupsi itu.

Apakah ini persoalan budaya? Penulis berpendapat bukan. Perilaku korup itu muncul sebagai tanggapan atas struktur insentif yang memang tampaknya dikembangkan di masa Orde Baru sebagai perekat kesetiaan kepada pimpinan. Melalui berbagai mekanisme dan saluran, terutama APBN dan praktik bisnis yang berkaitan dengan negara, rezim Orde Baru

politik yang tuak pun of the nation, sudah ru sungguh untuk meir berarti ABRI terke "permainan" demokr REFORMASI SYAI

Sementara kredil "prestise" demokrasi Masyarakat Indonesia perubahan nilai yang otoriterisme (demi demokrasi boleh dit pada konsolidasi den ternyata marosot akil an politik). Inf terutama laman politik yang pe 1950-an, di bawah i Soeharto, yang kedur

Salah satu kendala i bisa memfasilitasi p dan resolusi konflik i adanya pengalaman politik, terutama seji Konstituante hasil Per Soekarno dengan dukr itu membuat mayor kesempatan belajar permainan politik y menunjukkan bahwa

IVA Kepasrahar

Ingar-bingar parpol akhir-akhir ini, mulai PKB, PAN, Bulan Bintang, Partai Keadilan, hingga partai sindiran mahasiswa "Partai Sapi Ikan dan Buku", memunculkan pertanyaan reflektif: partai itu dibentuk untuk apa?

Wacana konstitusi kita mengajarkan, kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR sendiri merupakan hasil pergulatan partai-partai dalam pemilu dan pergantian golongan-golongan tertentu. Karena itu, partai politik dalam konstitusi diposisikan sebagai lembaga yang "melaksanakan" kedaulatan rakyat.

Selintas hal ini dapat menjawab pertanyaan di atas, partai itu dibentuk untuk apa? Asumsi-asumsi teoretik yang dipetik dari *trias politica* Montesquieu. PKB, PAN, dan sebagainya secara langsung menempatkan diri dalam bingkai ini. Tanpa diminta, mereka berkeharusan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang memikat masa dan berniat membangun sistem pemerintahan tersendiri, beralaskan kepentingan subjektifnya. Secara hukum, hal ini jelas sah-sah saja.

Persoalannya, dalam sejarah kepartaian Orba, partai yang diandaikan konstitusi dapat mengontrol mekanisme kepemimpinan eksekutif ternyata berbalik arah. Partai justru menihak setiap kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hanya satu atau dua kali mereka lantang bersuara keras, namun setelah itu hilang tertelan retorika lembaga kepresidenan. Di tengah pertarungan antarkeduanya, MA tak luput dari arus politik hukum yang membawanya dalam alam pikir hegemonik dan turut menciptakan situasi kondusif bagi kuatnya lembaga kepresidenan.

Belajar dari pengalaman sejarah ini, timbul asumsi-asumsi baru yang menolak paradigma *trias politica* tadi. Parpol (parlemen), lembaga kepresidenan (eksekutif), dan MA (yudisial) ternyata berada dalam horizon yang sama, yaitu negara (*state*). Secara gotong royong (konsetus, istilah Gramsci) mereka bahu-membahu memproduksi wacana politik-hukum yang menyuarakan kepentingan eksekutif. Dan, nyaris



apa yang disebut *civ* terdapat dalam lembag

Bila demikian hal sentasi *civil society* s PKB, PAN, dan seter dang dari perspektif lembaga yang bukan tetapi bagi siapa saja sebagai *broker* negar PASRAH TOTAL

Menelaah pasal den tidak terjumpai sece lanjutan kepasrahar Mengapa timbul perti teks konstitusi dan de dan paket lima UU pe sistem politik-hukum jalan untuk mengont konstitusi cukup be limpahan wewenang Tak terpedulikan apak sebab pertarungan sem bagaimana partai da berkuasa di wilayah r Dalam konteks partu an seperti PKB, kta kapasitas keilmuannya. negur pejabat-pejabat dilakukan, mengingat penuh daya istikharah yang lebih sepuh. Taj dapat kita jumpai dal mempunyai ikatan i semacam Partai Repul yang baru memperke Sulit membayangkan gerak sendiri, tanpa a rakyat —sebut saja *ci* amati dan menilai ge Mereka hanya didud

PéCUT

- * 161 purnawirawan TNI AL gabung dengan PDI Megawati.
- Darah baru, tapi sudah agak asin...
- * Menkes khawatirkan gencras nanti banyak yang "hang" karena kekurangan gizi.
- Habis gimana, ngatasi sembak "error" saja pemerintah juga nggak bisa...
- * Amien Rais tantang "duel" Soeharto lewat televisi.
- Duel kelas kakap!
- * Mobil Timor milik Tommy nung-gak pajak Rp 30 miliar.
- Apa fasilitasnya masih kurang...



Pembaca Menulis

Kecewa RSUD Nganjuk
 Pada 1 Juli 1998, saya jadi korban perampasan sepeda motor dan penganiayaan. Musibah ini terjadi di Desa Salamrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Setelah ditemukan oleh warga sekitar, dalam kondisi sangat kritis, saya langsung dibawa ke ruang UGD RSUD Nganjuk. Dokter yang menangani operasi tidak langsung mengoperasi karena mempermasalahkan biaya. Saya jadi korban penganiayaan pada sekitar pukul 19.00, tapi baru dioperasi pukul 03.00 dini hari. Sungguh waktu yang lama. Dokter tidak memperhatikan saya, masa depan saya. Saya kan masih sekolah dan belum tua. Mestinya, kalau tidak sanggup, langsung saja dikirim ke RSUD dr Soetomo Surabaya. Akibat penanganan yang terlalu lama, tiga jari tangan kanan saya harus diamputasi karena membusuk. PRAYOGO, SMU Negeri 1 Gondangwetan, Jl Raya Bromo 33, Pasuruan

Kecewa Eksekutif Muhammadiyah
 Kami atas nama Hammas (Himpunan Aksi Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya) merasa kecewa, pada era yang seperti ini masih ada cara pengkotak-kotakan dalam acara pengajian. Seperti halnya pada acara pengajian klub eksekutif di Garden Palace pada Selasa, 29-9-1998. Kami tak habis pikir, apakah hanya karena penampilan kami yang tidak eksekutif kami tidak boleh mengikuti pengajian dengan penceramah Bapak Faisal Basri? Saya berharap kepada panitia dan Bapak Abdurrahim Nur selaku Ketua PW Muhammadiyah Jatim untuk lebih membuka diri pada acara-acara berikutnya. Untuk dijadikan perenungan, tidak selamanya manusia berdui, tapi setiap manusia berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. ADI WIBOWO, atas nama Hammas, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kecewa Klub Keluarga Citraland
 Pada 29-9-1998, pukul 16.30 — 20.00, saya bersama tiga orang rekan saya menggunakan voucher Klub Keluarga Citraland. Dengan harapan jika pelayanan dan fasilitas yang diberikan bagus dan menyenangkan, maka kami berminat untuk menjadi anggota Klub Keluarga Citraland. Namun, pada kunjungan tersebut, kami dikecewakan oleh pelayanan petugas kamar ganti wanita (sebut saja Y). Pada waktu itu Y menuduh kami tidak menjaga kebersihan. Padahal, jelas-jelas bukan salah satu dari kami yang sengaja membuang sampah sembarangan. Selain itu, dari sikap pelayanan petugas tersebut memberikan kesan terjadi perbedaan pemberian pelayanan terhadap orang pribumi dan nonpribumi. Kami diberi peringatan bahwa, fasilitas yang ada khusus ditujukan untuk anggota, sehingga kami mengartikan bahwa anggota klub adalah (maaf) eksklusif orang nonpribumi. Dari hal tersebut kami merasa

Alamak, RRI Stasiun Sumenep

punya gengsi? Saya l lapangan bulutangkis. digusur, diganti lapar Di saat prestasi atle. gelar seperti saat motivasi untuk lebih agar di masa datang menganglat martaba Sumenep muncul pe berprestasi buat bang Bapak pejabat teras mungkin perlu kami sang merah putih ber melalui bulutangkis. teras di Sumenep, se tingginya (gengsi) e cabangnya, melai kan dicapai. Tidak ada populer tapi tidak kancang nasional mau GUNAWAN WIB

■ TNI

Mengepas Seragam Menjelang Sidang

Setelah pos wakil panglima dihidupkan dan BIA direorganisasi, beberapa posisi strategis TNI juga akan berubah. Apa saja itu?

Perlahan tapi pasti, pembenahan terus berjalan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sejak paradigma baru ABRI (kini: TNI) dicanangkan pada September 1998, organisasi lembaga militer ini ditata kembali. Mulai dari pengurangan anggota DPR dari ABRI, pemisahan Polri, hingga perubahan istilah ABRI menjadi TNI. Bahkan, pada bulan ini saja, dua kebijakan baru telah diterapkan. Sementara itu, serangkaian pergantian posisi pun telah menanti.

Langkah pertama adalah penghidupan kembali pos wakil panglima TNI. Sabtu dua pekan silam, Presiden B.J. Habibie melantik Laksamana Widodo A.S. menjadi wakil panglima TNI. Posisi KSAL ditinggalkannya pada Laksamana Madya Ahmad Sutjipto. "Saat ini diperlukan seorang wakil untuk membantu panglima TNI dalam menjalankan komando operasional" kata Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto.

Posisi itu sudah lama kosong. Laksamana Sudomo adalah orang terakhir yang menduduki kursi itu pada 1983, merangkap sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Namun, kini, Widodo tak mendapatkan tugas khusus tambahan itu.

"Wakil panglima TNI tak punya wewenang mengkomando pangdam, sekalipun Panglima TNI berhalangan," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan Hankam/TNI, Brigadir Jenderal Djadja Sudrajat.

Langkah kedua tak kalah mengejutkan: Badan Intelijen ABRI (BIA) dirombak. Mula-mula, "Kembali pada nama semula, Bais (Badan Intelijen Strategis)," kata Djadja.

Selain itu, kendati bosnya masih sama,

Tyasno Sudarto, pangkatnya naik setingkat menjadi letnan jenderal. Ia mengelola dinas rahasia militer itu galibnya sebelum berubah menjadi BIA beberapa tahun lamapau. Supervisinya tak lagi di bawah Kepala Staf Umum TNI, melainkan langsung Panglima TNI. Lima direktoratnya yang mekar menjadi delapan ditambahkan satuan tugas intelijen: bidang ekonomi dan teknologi.

Pembenahan itu agaknya tak hanya sampai di situ. Apalagi, sejak April 1999, penambahan kodam telah dipersiapkan. Setelah Kodam Pattimura di Maluku diresmikan, dua bulan lamapau, beberapa kodam baru akan menyu-



PELANTIKAN WIDODO A.S. Sikap politiknya lebih bisa diprediksi.

sul. Konsep Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) yang dilikuidasi tahun 1984 dengan alasan efisiensi pun akan diterapkan lagi.

Reorganisasi itu tentu saja menyebabkan pergeseran posisi beberapa petinggi TNI. Isu pergantian pun beredar. Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Djadja Suparman konon bakal dipromosikan menjadi Panglima Kostad. Nama Pangdam V/Brawijaya Mayjen Ryamizard Ryacudu dan Pangdam

IX/Udayana Mayjen TNI Adam Damiri santer disebut-sebut sebagai kandidat penggantinya.

Karena lokomotif bergerak, pergeseran gerbong di belakangnya otomatis terjadi. Beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon Pangdam V/Brawijaya, antara lain; Kapuspen TNI Mayjen Syamsul Maarif, Asisten Operasi KSAD Mayjen Kiki Syahnakri, dan Asisten Personalia Kasum TNI Mayjen Agus Wirahadikusumah. Sementara itu, karena Kodam IX Udayana bakal dipersiapkan untuk perwira bintang satu, bursanya cukup ramai.

Namun, seperti biasanya, para pejabat militer itu mengelak ketika dikonfirmasi kebenaran isu yang konon bakal menjadi kenyataan pekan depan. "Itu semua isu. Saya enggak mau komentari isu," ujar Djadja sambil menggeleng-geleng. Begitu pula dengan Djadja Sudrajat. Ia mengelak ketika ditanyai perihal kabar mutasi di tubuh TNI.

Meskipun demikian, serangkaian kebijakan ini mendapat perhatian beberapa pengamat. "Penghidupan kembali pos wakil panglima TNI adalah bagian dari usaha penguatan struktur," kata pengamat militer M.T. Arifin. Bahkan, di akhir masa pemerintahannya,

Soeharto sempat berniat menerapkannya. Tapi, ketika itu, Kepala Staf TNI AD Jenderal Subagyo H.S. yang ditawarkan posisi itu menolak.

Apa alasannya, tak jelas.

Yang pasti, jabatan itu memang terkesan "berat". Tak mengherankan bila acara pelaporan Widodo AS atas jabatan barunya di Cilangkap, Sabtu dua pekan silam, terkesan "kikuk". Para jenderal menghindari wartawan. Hanya para perwira AL, AU, dan Polri yang tampak kalem. Termasuk Widodo yang diam seribu basa.

Menurut seorang perwira tinggi yang tak mau disebutkan namanya, sikap di-

am Widodo itu terbaik. "Kalau dia ngomong, malah salah," ujarnya. Penunjukan Widodo sebagai itu, konon, mengundang kecemburuan. Padahal, menurut sumber kita itu, ia dipilih karena jenderal lain sulit diprediksi ambisi politiknya. Padahal, menjelang Sidang Umum MPR, kepastian soal itu amat penting.

Hanibal W.Y. Wijayanta,
Victoria Sidjabat, dan Anton Bachtiar Rifai

Buruk Polisi VII c Kurikulum di Belah

Kurikulum pendidikan polisi diubah, pelajaran berbau militerisme dikurangi secara drastis. Tujuannya, membentuk polisi yang profesional tapi hangat dan akrab dengan masyarakat.



Sistem Pendidikan di Akademi Kepolisian. Ada sistem magang.

POLISI kembali menjadi sorotan alias ampunan kejengkelan. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-53, Kamis pekan lalu—juga merupakan hari ulang tahunnya pertama setelah institusi ini "diceraiikan" dari Tentara Nasional Indonesia—aparatus penegak hukum itu justru bertrok dengan ratusan pengunjung rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Diperkirakan, 12 anggota Partai Rakyat Demokratik dihajar tembakan peluru karet dan belasan pendemo maupun polisi luka-luka.

Kecaman ke arah polisi mengalir deras. Walaupun insiden ini—menurut beberapa sumber—dipicu oleh lemparan berbagai benda keras dari arah pengunjung rasa, amat disayangkan bila kemudian polisi bersikap reaktif dan langsung melepaskan tembakan. Sikap-sikap seperti inilah yang oleh para petinggi kepolisian dicoba dikikis. "Sifat militerisme dan arogansi polisi akan kita ubah. Kita harus sanggup melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat," kata Kapolri Jenderal Roesmanhadi, hanya beberapa saat sebelum insiden KPU meletus.

Pengikisan sifat militerisme itu dilakukan dengan merombak sebagian besar kurikulum polisi yang diajarkan di 17 sekolah polisi

negara (SPN) dan Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang. Kurikulum baru yang mulai diterapkan pada 1 Juli 1999 inilah yang akan diberikan pada sekitar 11 ribu siswa SPN dan 300 orang mahasiswa Akpol tahun ajaran 1999/2000 ini.

Secara umum perubahan kurikulum dari dua jenis sekolah polisi itu—SPN hanya berlangsung delapan bulan dan lulusannya berpangkat sersan, Akpol tiga tahun dan lulusannya letnan—tak banyak berbeda. Materi kemiliteran yang semula sampai 60 persen kini dicitutkan dan tinggal 10 persen saja. Pelajaran yang bersumber dari kurikulum ABRI seperti doktrin sosial politik yang mencakup dwifungsi ABRI, teknik bertempur, dan hukum militer, dihapuskan. Bahkan pembinaan ideologi Pancasila diganti dengan pelajaran budi pekerti. Di SPN, mata pelajaran yang dulu 116 dipangkas tinggal 51 saja, dengan beberapa mata pelajaran baru seperti budaya dan hukum adat serta hak asasi manusia. Tentu, agar mereka tetap bugar, pelajaran olah raga tak ditinggalkan.

Yang paling penting dalam perubahan kurikulum ini ialah adanya sistem magang. "Magang dimaksudkan untuk mempraktekan materi yang sudah dipelajari. Siswa dilatih siap pakai agar langsung terjun ke ma-

sarakat," ujar Letkol Heru Slamet Purnomo, Kepala SPN Karombasan, Manado. Bahkan, menurut Kapolri Roesmanhadi, hanya polisi lulus magang yang bisa jadi polisi. Masa magang di SPN berlangsung selama dua bulan, sedangkan di Akpol, menurut Letkol S.T. Srijono Parsono, Kepala Bagian Penerangan Akpol, direncanakan selama satu semester.

Selama masa magang, kemampuan dan perilaku calon siswa akan dinilai secara ketat. Direncanakan, akan ada psikolog yang turut memberi penilaian kepada calon polisi. Nantinya, instruktur meminta psikolog untuk mengamati siswa bila ada kelainan. "Pokoknya, mental fisik dan akademis akan dihilai dan dievaluasi," tutur Kolonel Stevanus Marsono, Kapolda Sulawesi Selatan.

Untuk itu, dalam pendidikan baru, seorang calon polisi dituntut agar mampu mengendalikan diri—sesuatu yang tidak terlihat dalam insiden di depan KPU. Selain itu, polisi juga harus memiliki tingkat intelektual yang tinggi, karena dalam bertugas ia harus lebih banyak mengambil inisiatif. Menurut Heru, polisi punya hak diskresi atau bertindak menurut pertimbangannya sendiri, karena polisi itu hukum yang berjalan. Untuk itu, mental polisi—yang dinilai oleh psikolog—harus baik.

Mata pelajaran yang melandasi ketangguhan mental itu memang dimaksudkan untuk membina citra polisi masyarakat (*community police*) yang profesional. Menurut pengamat polisi Satjipto Rahardjo, polisi masyarakat adalah polisi yang hangat dan dekat dengan masyarakat. Hilangnya kesan militer tidak harus menghilangkan profesionalisme, seperti garis komando.

Masalahnya, apakah resep baru kurikulum SPN ini akan jitu memperbaiki citra polisi. "Ini kan masih eksperimen. Jadi, pada waktu-waktu mendatang masih bisa diperbarui," kata Satjipto. Seorang pengamat pernah mengatakan, mengubah citra polisi bukan sekadar mengubah sistemnya, tapi mengubah watak polisi itu sendiri. "Butuh satu generasi untuk mengubah citra polisi secara total," ujar Kapolri Roesmanhadi.

Dan setakat ini, baru 11 ribu calon polisi yang digembleng melalui kurikulum berbau sipil tersebut. Lalu bagaimana dengan 180 ribu polisi aktif lainnya yang selama bertahun-tahun sudah terkontaminasi gaya militer, seperti yang secara kasat mata terlihat dalam insiden di depan gedung KPU? Kalau yang itu, selain memalukan, juga menimbulkan rasa waswas. Soalnya, untuk mengubah citra, tidak saja diperlukan waktu dan pengemblengan, tapi juga keteladanan. Yang disebut terakhir ini sangat langka, mungkin satu dalam sejuta.

Bina Bektiali, Hardy R. Hermawan, Dwi Wiyana, koresponden Semarang, Verrianto Madjawa (Manado)

rekruit adalah badan-badan dalam ABRI, terutama di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang pejabat di lembaga-lembaga tersebut. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang pejabat di lembaga-lembaga tersebut.

Sebelum menjelaskan makna kegiatan pergerakan massa berdasar-basis, jati diri, dan semangat yang menjadi ciri khas gerakan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang konsep gerakan ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berakar pada masyarakat.

Sebelum menjelaskan makna kegiatan pergerakan massa berdasar-basis, jati diri, dan semangat yang menjadi ciri khas gerakan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang konsep gerakan ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berakar pada masyarakat.

Sebelum menjelaskan makna kegiatan pergerakan massa berdasar-basis, jati diri, dan semangat yang menjadi ciri khas gerakan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang konsep gerakan ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berakar pada masyarakat.

Sebelum menjelaskan makna kegiatan pergerakan massa berdasar-basis, jati diri, dan semangat yang menjadi ciri khas gerakan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang konsep gerakan ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berakar pada masyarakat.

Sebelum menjelaskan makna kegiatan pergerakan massa berdasar-basis, jati diri, dan semangat yang menjadi ciri khas gerakan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu tentang konsep gerakan ini. Gerakan ini adalah gerakan yang berakar pada masyarakat.

KOMPAS, SI

RENTAL ORKLIFT TOYOTA Forklift, Crane, Loader, Genset, dll. JAKARIA, Cikarang, Sukabaya, Bandung, Pakanaranan.

DAIHATSU Irucky Th 95 Isuzu, STNK Pij. Ass. As. Risk. Jual Cpl. Hub. Ph. 4514840/ Hp. 0818738034. Itari GT 96 (77.500) 95(500) 93 (45J) Mulus 6xi Jayakarta Mir. J. Samantudi 71-73 Ph. 3456823.

Siwa Pioneer SONY, NEI National Panasonic SHARP. TOSHIBA, PHILIPS, SANYO, KENWOOD. Toko elektronik dengan berbagai merk.

RENTAL ORKLIFT TOYOTA Forklift, Crane, Loader, Genset, dll. JAKARIA, Cikarang, Sukabaya, Bandung, Pakanaranan.

DAIHATSU Irucky Th 95 Isuzu, STNK Pij. Ass. As. Risk. Jual Cpl. Hub. Ph. 4514840/ Hp. 0818738034. Itari GT 96 (77.500) 95(500) 93 (45J) Mulus 6xi Jayakarta Mir. J. Samantudi 71-73 Ph. 3456823.

Siwa Pioneer SONY, NEI National Panasonic SHARP. TOSHIBA, PHILIPS, SANYO, KENWOOD. Toko elektronik dengan berbagai merk.

ORNLIN, SNI, KSH. Berbagai iklan layanan masyarakat dan informasi.

KOMPAS, SI

RENTAL ORKLIFT TOYOTA Forklift, Crane, Loader, Genset, dll. JAKARIA, Cikarang, Sukabaya, Bandung, Pakanaranan.

DAIHATSU Irucky Th 95 Isuzu, STNK Pij. Ass. As. Risk. Jual Cpl. Hub. Ph. 4514840/ Hp. 0818738034. Itari GT 96 (77.500) 95(500) 93 (45J) Mulus 6xi Jayakarta Mir. J. Samantudi 71-73 Ph. 3456823.

Siwa Pioneer SONY, NEI National Panasonic SHARP. TOSHIBA, PHILIPS, SANYO, KENWOOD. Toko elektronik dengan berbagai merk.

DPKSH Bukan Kopkamtib

Gus Dur

XI A

* Jenderal Wiranto: Rakyat Terlatih Bukan untuk Melawan Rakyat

Jakarta, Kompas

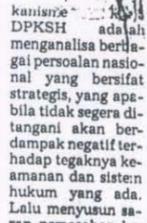
Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) dan rakyat terlatih merupakan dua bagian yang tak terpisahkan, yang dimaksudkan pemerintah dan ABRI, sebagai upaya menegakkan keamanan dan wibawa hukum yang dewasa ini menjadi persoalan besar. DPKSH tidak sama dengan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstansas), sedangkan program Ratih (rakyat terlatih) tidak dimaksudkan untuk melawan rakyat. Ratih tidak untuk mendukung kepentingan kekuatan politik tertentu. Ratih hanya membantu polisi, tidak dipersenjatai, kecuali pentungan, tameng dan kekuatan legalitas untuk menangkap, memborgol, melaporkan, mencari informasi.

Demikian Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (13/12). Ia antara lain didampingi Sekjen Dephankam Letjen TNI (Purn) Soeyono, Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Fachrul Razi, Letjen TNI Arie Kumaat (DPKSH), Asisten Sosial Politik Kepala Staf Teritorial ABRI Mayjen TNI Sudi Silalahi, Kepala Puspren ABRI Mayjen TNI Syamsul

Ma'arif. Mengenai pembentukan DPKSH dan rencana pembentukan rakyat terlatih, Wiranto menilai telah terjadi tanggapan, analisis yang prematur dan tidak didukung pemahaman mendalam mengenai latar belakang, referensi hukum, serta tujuan pembentukan kedua hal itu.

Tanpa wewenang komando

Pangab menjelaskan, me-



Jenderal TNI Wiranto

kanisize... DPKSH adalah menganalisa berbagai persoalan nasional yang bersifat strategis, yang apabila tidak segera ditangani akan berdampak negatif terhadap tegaknya keamanan dan sistem hukum yang ada. Lalu menyusun saran pemecahan kepada presiden untuk kemudian dilaksanakan departemen, instansi terkait atau lembaga lainnya. Dewan lebih mencerminkan sikap koordinatif dan adaptif, mengadopsi, mendengarkan dan memahami aspirasi di tengah masyarakat, kemudian diangkat

menjadi tugas. Dewan ini, terutama permasalahan yang memerlukan pemecahan yang terpadu dan terintegrasi.

Dengan demikian, baik antara lembaga struktural, fungsional maupun kultural yang ada dalam masyarakat akan terjadi interaksi dan koordinasi yang sangat erat untuk memecahkan berbagai permasalahan, yang tidak mungkin dipecahkan oleh hanya

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-4)

• Batalkan, hlm 6

"Masih ingatkah Anda, Berapa kali dalam sebulan Anda terserang SAKIT KEPALA?"

BIOGESIC

Sakit Kepala? Cari BIOGESIC Segera!

Subsidi Pupuk dan Mekanisme Pasar

BELUM lama berselang, dalam dialog interaktif di TVRI, Presiden BJ Habibie ditanya, mengapa kebijakan ekonomi tidak menyentuh sektor riil. Jawabannya, bahwa tingkat inflasi menurun, tingkat suku bunga menurun, nilai rupiah menguat. Ditambahkan, angka-angkanya riil, sehingga sektor riil sudah terjangkau.

Kita bingung. Yang ditanya sektor riil, seperti produksi yang tidak meningkat, bukannya gejala di sektor moneter itu memang riil terjadi atau tidak. Jawaban itu tidak menjelaskan permasalahan.

Kebijakan terakhir yang menyentuh sektor riil yang vital adalah kebijakan dalam bidang pupuk. Pemerintah mengumumkan pupuk tidak disubsidi

ANALISIS KWIK KIAN GIE

di lagi. Serta merta harganya membubung dan barangnya langka. Satu-satunya alasan yang dikemukakan, bahwa subsidi bertentangan dengan mekanisme pasar. Untuk menanggulangi kenaikan harga dan langkanya barang, pemerintah akan memberikan fasilitas kepada importir supaya bisa membuka L/C (letters of credit).

Lho, fasilitas ini hanya akan berpengaruh pada kecukupan barang. Itu pun kalau ada minat besar untuk mengimpor. Harganya akan didasarkan atas harga di luar negeri yang harus dibayar dalam valas. Dengan nilai rupiah yang begitu rendah,

harga pokok pupuk impor masih tetap akan sangat tinggi, sehingga tak terjangkau petani.

Kebijakan demikian mengundang pertanyaan lebih fundamental. Bagaimana pemerintah Habibie, atau lebih khusus lagi, bagaimana Menperindag Ra-

hardi Ramelan melihat mekanisme pasar, dan bagaimana pemahaman serta keyakinannya tentang baik buruknya mekanisme pasar?

MEKANISME pasar pada umumnya, dibandingkan sistem perencanaan dan komando sentral memang lebih baik, lebih

(Bersambung ke hlm 11 kol 5-9)

UNTUK TELEPON KE LUAR NEGERI 001 INDOSAT PALING JERNIH.

INDOSAT SLI 001

Buntut "Trek-trekan", Solo Rusuh

Solo, Kompas

Kota Solo, Jawa Tengah, dilanda kerusuhan massa, Minggu (13/12) dini hari, menyusul bentrok antara aparat keamanan dengan massa penonton trek-trekan (lomba adu kecepatan sepeda motor) yang berlangsung di Jl Urip Sumoharjo. Sekitar 1.000 orang mengamuk antara pukul 01.00 sampai 03.00 WIB. Mereka merusak dan membakar sejumlah bangunan, rambu lalu lintas dan boks telepon sepanjang Jl Urip Sumoharjo dan Jl Slamet Riyadi.

Dalam peristiwa ini, polisi telah menangkap 66 orang yang

diduga sebagai pelaku kerusuhan. Enam warga masuk rumah sakit, dan empat anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta mengalami cedera. Polisi juga menyita 32 sepeda motor yang diduga digunakan untuk lomba trek-trekan dan milik penonton yang tertinggal.

Bangunan yang menjadi sasaran perusakan antara lain Markas Kepolisian Wilayah (Polwil) Surakarta dan rumah dinas jabatan Kapolwil setempat (keduanya di Jl Slamet Riyadi). Enam bank, pasar swalayan,

(Bersambung ke hlm 11 kol 8-9)

KERUSUHAN DI SOLO.

Jakarta, Kompas

Bangsa Indonesia tidak mempolitisasi ideologi, mayoritas bangsa me Pancasila sebagai kenyat dup, menerima penu Pancasila secara nasion sebagai kenyataan, dan mempersoalkan Jagi agama. Agama merijiki tersendiri sebagai ke nioralistik yang berlaku b ma agama dan pengif untuk memperoleh hi yang dapat dipakai unt ma umat beragama.

Demikian Ketua Umu ngurus Besar Nahdlatul (PBNU) KH Abdurr Wahid dalam forum dial sional bertema Masa Indonesia yang diadaka Masyarakat Indonesia B Jakarta, Minggu (13/12). dalam acara itu antar Ketua DPR Hari Sabarr tua DPA AA Baramuli, PDI Perjuangan Prof D yati Hartono, pakar filsa Dr Franz Magnis-Susce Dr Mudji Sutrisno, dan ekonomi Prof Dr Si Swasono.

Dialog yang digelar us nyataan Gus Dur, pa akrab KH Abdurrahman makin malam makin terutama karena adanya lakan peserta, terutama siswa, terhadap para bicara, seperti Hari Sabar Baramuli.

Hukum 8

Menurut Gus Dur, se an, pikiran untuk kempa

Pariv

PARIWISATA Bali bernapas lega kembali. tentang masuknya Bali k wilayah yang terkena tra tion (peringatan mel kunjungan wisata) yang luarikan Pemerintah Jeps nyata tidak benar.

Sebagaimana dibe Kompas (Kamis, 26/11) Robot, Ketua Asosiasi Indonesia DKI Jakarta, laskan bahwa Pemewint tralia dan AS telah mer kan travel ban (larangan kukan kunjungan wisa mentara Jepang menge travel caution bagi wa garanya yang ingin ber ke Indonesia. Larangan ringatan itu dikeluark nyusul terjadinya Trag manggi 13 November l dan Australia masih komendasikan warpan kunjung ke Bali, namun melarangnya.

Kalangan wisata Bal ketir. Jepang bagi Bal pakan penyumbang wi kedua terbesar sesudah tralia. Pada 1996 jur 163.824 wisatawan, pa mencapai 240.245 oran 1993 dan 1994, Jepang satu dengan 173.863 or 211.100 orang. Pangsan periode 1993-1997 anta persen.

Perasaan khawatir i tambah besar menginga ter wisatawan Jepang, ngat sensitif terhadap keamanan dan kesehat reka juga amat patuh t kebijakan pemerintah.



Lepaskan Tembakan

Peringatan

Antarain be-
"Pimpinan Gol-
kita panggil un-
kelompok ber-
adalah satgas
simatupang,
ritakan, dalam
tor Dewan Pim-
(DPD) Partai
karta, Senin la-
satgas Golkar
kan seragam hi-
perti pendekar,
dengan meng-
in golok. Mere-
lemukan karena
ari kantor DPD
ayu, dan benda
1 satu anggota
sempat melem-
ya ke arah mas-
5/5)
menjelaskan,
in menjatuhkan
pada Partai Gol-
bukti bersalah.

Alasannya, Golkar bersama ke-
47 partai lainnya sudah menda-
pat peringatan keras atas ber-
bagai pelanggaran yang terjadi
dalam putaran pertama.
Ia menambahkan, seorang
anggota Panwasda, H Abi Ich-
wanudin, dirampok sejumlah
pria berbaju hitam-hitam mirip
satgas Golkar di sekitar kantor
DPD Golkar beberapa saat sete-
lah terjadinya insiden. Ich-
wanudin yang tengah mencatat
peristiwa yang terjadi di DPD
Golkar itu, diambil jam tangan
Seiko-nya dan uang Rp 350.000.

Picu kerusuhan

Panwaslu Pusat, menurut
Lubis, menilai penggunaan
senjata tajam oleh satgas Gol-
kar dapat memicu dan meng-
undang pihak lain untuk men-
ciptakan kerusuhan. "Senjata

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-7)

Medan, Kompas

Aparat Brigad Mobil (Bri-
mob) Kepolisian Daerah Suma-
tera Utara bantrol dengan ma-
sa yang terdiri petani dan maha-
siswa di kantor Direksi PT Per-
kebunan Nusantara (PT PN) II,
Tanjungmorawa, Kabupaten
Deliserdang, Selasa (25/5). Sedi-
kitnya 22 orang terluka akibat
tertembak atau dipukul popor
senjata laras panjang, sementa-
ra dua petugas terkena lemparan
batu.

Sebelumnya, massa berunjuk-
rasa ke kantor Gubernur Sumut,
di Jl Diponegoro, Medan, untuk
menuntut pengembalian tanah
milik petani seluas 17.000 hek-
tar yang kini jadi areal hak guna
usaha (HGU) PT PN II di Lang-
kat, Deliserdang dan Asahan.
Karena tak ditanggapi, massa

menuju Tanjungmorawa guna
mengadukan masalah serupa ke
Direksi PT PN II, sehingga pecah
bantrol dengan aparat Bri-
mob yang bermaksud membub-
arkan mereka.

Sementara itu, insiden ber-
senjata juga kembali pecah di
kawasan Desa Cot Krueh, Kabu-
upaten Aceh Utara (Aceh). Se-
lusa, menyebabkan empat kor-
ban tewas; terdiri dua anggota
polisi, satu wanita dokter dan
satu paramedis dari Puskesmas
Peudada. Semua korban tewas
terkena terjangan peluru.

Tembakan beruntun ini, me-
nurut Pusat Penerangan Han-
kam/TNI dalam siaran persnya
Selasa malam, berasal dari sen-
jata laras panjang AK-47 yang
dilepaskan Gerakan Pengacau
Liar Hasan Tiro (GPLHT). Disce-

butkan, tujuh polisi termasuk
Kepala Kepolisian Sektor Peu-
dada, Pelda (Pol) Nuhana, serta
Komandan Peleton Pasukan Pe-
nindak Rusuh Massal (PPRM)
Letda (Pol) Hendrik Budi meng-
alami cedera berat akibat temb-
bakan, demikian pula tiga staf
Puskesmas Peudada.

Gagal bertemu dirut

Bentrokan di Tanjungmorawa
diawali gagalnya pertemuan
antara Direktur Utama PT PN II,
Edward Sitorus dengan rom-
bongan massa yang mencoba
menemuinya. Konon Sitorus tak
bersedia menemui rombongan. Ia
hanya mendelegasikan kepada
Kepala Bagian Umum Pemuda.
Namun massa tak sudi diterima

(Bersambung ke hlm 11 kol 8-9)

TNI Akui Turut Bertanggung Jawab atas Dosa-dosa Orba

Jakarta, Kompas

Asisten Perencanaan Umum
Panglima TNI Mayjen Agus Wi-
rahadikusumah mengakui ABRI
ikut bertanggung jawab atas
dosa-dosa yang dilakukan pada
masa Orde Baru. Agus memberi-
kan jaminan bahwa sejak di-
pimpin Jenderal Wiranto, TNI
melancarkan reformasi internal
dan total secara serius, dan me-
minta rakyat mendukung proses
reformasi itu.

"Reformasi internal TNI bu-
kanlah sekadar pernyataan poli-
tik, namun dilakukan secara
sungguh-sungguh. Saya juga
berharap pemerintah melaku-
kan pula perubahan-perubahan
sesuai reformasi secara cepat
dan menyeluruh," kata mantan
Komandan Sesko TNI itu.

Agus tampil sebagai pembi-
cara Seminar Nasional "Mencari
Format Hubungan Sipil-Militer
Indonesia" yang diadakan
Jurusan Politik FISIP UI di De-
pok, Selasa (25/5). Tampil seba-



Agus Wirahadikusumah

bagai pembahas adalah pengamat
politik Eep Saefulloh Fatah (UI)
dan Mochtar Mas'ood (UGM).

Selama diskusi, banyak perta-
nyaan dilayangkan kepada Agus
mengenai kesungguhan TNI me-
reformasi dirinya setelah Soe-

Tak ingin "Orbaba"

TNI, menurut dia, harus me-
nafsirkan kembali dirinya dan
keluar dari bayang-bayang ma-
sa lalu yang menyulitkan dan
inilah pekerjaan rumah yang
terberat, tidak mudah dan bu-
tuh waktu.

"Yang jelas, kita tidak ingin
Indonesia pasca Orde Baru ada-
(Bersambung ke hlm 11 kol 1-3)

dan Soehandjono

g Muda Tindak
(JAM Pidum).
lan sebagai JAM
isi oleh MA Rah-
jata selanjutnya
staf ahli Jaksa

Soehandjono di-
n Hasyim Jacob
M Pengawasan
yim Jacob Saleh
ernah menjadi
aan Tinggi Sula-
ang pernah me-
surat Perintah
enyelidikan atas
a Nurdin Halid.
ntinya Gagoeck
emeriksaan atas
lid diteruskan ke
Namun, begitu

berkas Nurdin dilimpahkan ke
pengadilan, Jaksa Agung AM
Ghalib mempenstunkan Ga-
goeck. Sedang jabatan JAM Was
dipercayakan kepada Syah-
mardan Lubis, kini Kepala Ke-
jaksanaan Tinggi DKI Jakarta.
Posisi Kajati DKI, lanjut Soe-
handoyo, dipercayakan kepada
Lukman Bachmid, kini inspek-
tur di JAM Was.

Harus dijelaskan

Menanggapi pergantian men-
dadak di lingkungan Kejaksaan
Agung, praktisi hukum Abdul
Hakim Garuda Nusantara dan
Ketua II Serikat Pengacara In-
donesia (SPI) Benny K Harman.

(Bersambung ke hlm 11 kol 4-6)

ons: Penuh Pesta

perti tahun lalu,
elasan kali mere-
elumnya.
pun berpesta,
mudanya. Klak-
bunyikan, kem-
ulakan, botol-bo-
libuka. Masyara-
di Plaza Catalu-
Barcelona yang
n turis asing.
atalunya makin
anak muda ma-
tiang listrik dan
t, yang paling
ling top. Yang di
k-sorak.
ah-kuning Spa-

nyol dan merah-biru tua Barce-
lona terus dikibar-kibarkan. *Va
Barca!*

PESTA berikutnya sedang
dalam "proses". Rabu (26/5)
malam pasti akan meledak lagi
sebuah pesta: orang Inggris
atau orang Jerman. Malam itu,
pertandingan paling bergengsi
di kalangan klub Eropa, Piala
Champions, akan digelar. Siapa
yang akan berpesta, pendukung
Manchester United dari Inggris
atau Bayern Muenchen dari
Jerman?

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-3)

CATATAN SEPAK BOLA SINDHUNATA

Penantian Akhir di Barcelona

"SEPULUH pahlawan, satu
idiot." Begitu *The Sun* menjudi-
duli beritanya, yang melaporkan
kekalahan Inggris oleh Argenti-
na pada perdelapan final Piala
Dunia Perancis 1998. Idiot yang
dimaksudkannya adalah David
Beckham. Memang Beckham tel-
ah membuat kekonoyolan besar:
ia "menendang" Diego Simeone.
Wasit mengusirnya. Inggris ter-
paksa bermain hanya dengan se-
puluh "pahlawan" mereka, ka-
rena kekonoyolan seorang "idiot"
itu. Akhirnya, Inggris tersisih.

Publik Inggris sulit memaaf-
kan Beckham. Sebuah "tabloid"
menyajikan *montage* foto yang
menggambarkan Beckham ter-
ayun-ayun di tiang gantungan.
Beckham memang lebih mirip
seorang *popstar* daripada pe-
main bola. Parasnya seperti
Johnny Depp, pandangannya
nyaris sayu seperti Leonardo di
Caprio. Ia tampak kurang keras

sebagai pemain bola. Ini pun di-
jadikan alasan untuk makin
menghujatnya. Maka ada yang
menulis, Beckham itu kewanita-
wanitaan. Jika ia lelaki, ia tidak
menjegal dari belakang pemain
Argentina itu. Jika ia lelaki se-
jati, ia malah tidak akan mem-
buat atau membalas apa-apa sa-
ma sekali.

"Jangan membuat ia hancur
sama sekali," begitu pinta pa-
carnya Victoria Adam kepada
publik Inggris. Di Jalan Manns-
field Kota London, di depan ge-
reja baptis, ada papan yang
mengingatikan, "Tuhan meng-
ampuni siapa saja, juga David
Beckham."

Hanya sedikit yang membeli
Beckham. Kebanyakan meng-
anggapnya sebagai pendosa be-
sar. Sulit dibayangkan, bahwa ia
akan dapat bangkit dari *shock*
yang diteritinya karena hujat-
an-hujatan itu.

TERNYATA Beckham dapat
bangkit dalam waktu singkat.
"Perang psikis" melawan penon-
ton yang mencemoohkannya di-
hadapinya dengan tenang. Beck-
ham memang hebat, bukan ha-
nya karena umpan lambung dan
gol-golnya, tetapi lebih-lebih ke-
rena ketahanan mentalnya.
"Umurnya baru 24, tetapi ia tel-
ah mendekati kematangan ka-
riernya. Ia tidak punya interes
lain, ia hanya ingin bermain bo-
la, tak ada hal yang dapat mem-
buyarkan konsentrasinya," puji
Alex Ferguson bangga.

Saat Beckham dihujat massa,
Ferguson mendampingi Beck-
ham dengan penuh perhatian.
Maklum, Fergusonlah yang
membesarkan Beckham bersama
Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary
Neville, dan Nicky Butt. Ter-
hadap para pemain ini, Ferguson
(Bersambung ke hlm 11 kol 1-3)



Muladi...

direncanakan mulai Januari mendatang. Prof Muladi berpendapat, "Saya kira akan tertunda." Dengan adanya penundaan itu apakah pemerintah selama ini tidak tahu raih itu perlu didahului dengan UU7 Muladi tak menjawabnya secara langsung. "Sebagai suatu perencanaan, pendaftaran boleh saja," katanya.

Ajukan anggaran Seperti diberitakan kemarin, Menhankam/Pangab Wiranto mengatakan mulai Januari 1999 sudah dibentuk raih dengan perekrutan awal 40.000 anggota. Mereka digaji di atas UMK setempat selain dipersenjatai sejenis pertolongan dan memiliki legalitas hukum.

Dephankam sudah mengajukan dana sebesar Rp 2,5 miliar yang sebagian besar dialokasikan untuk raih. Pengajuan anggaran itu diungkapkan Menkeu Bambang Subianto menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR, Senin (14/12).

Dephankam sudah mengajukan dana sebesar itu dalam APBDN 1998-1999. Dana itu, menurut proposal dipakai untuk kader bela negara yang berlatih. Alokasi dana tersebut sebagian sudah diberikan oleh Menkeu Bambang Subianto, khusus untuk Dephankam telah disalurkan pada semester pertama tahun anggaran 1998-1999 sebesar Rp 640 juta. "Namun kekurangannya, sebesar 75 persen akan diminta pada semester kedua," kata Bambang. Semester kedua diperkirakan Januari 1999.

Sementara pengamat ABRI Hasan Habib mengatakan semestinya Pangab dalam membentuk raih memanfaatkan mekanisme standar. "Bukan saja lowongan," kata Hasan.

Menurutnya ada latar belakang pembentukan raih itu yang tak diungkapkan secara jelas oleh Menhankam/Pangab. Tak heran timbul pro dan kontra. Hasan juga berpendapat dengan Muladi, untuk membentuk raih harus ada undang-undang khusus. "Kalau tidak, bisa agak keruan nanti."

Bela cadangan Pakar hukum kawakan yang juga Ketua DPP PDI Prof Dr Dimiyati Hartono menilai pembentukan raih pada saat negara sedang krisis tidak bakal menyelesaikan persoalan. Menurutnya sejuta raih tetap tidak berguna karena rakyat telanjur tidak percaya dengan polisi maupun pemerintah.

"Saya tidak yakin kalau me-

Sumbangan dari halaman 1 reka bisa menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali persoalan pokok di tubuh pemerintahan bisa diselesaikan," tandas Dimiyati, Senin (14/12).

Kalau benar pemerintah akan merekrut 40.000 personil raih secara mendadak, sulit untuk membentuk orang-orang profesional dan berdisiplin tinggi.

Senada Dimiyati, Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi menilai pembentukan raih menunjukkan pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam penyelesaian masalah.

"Hendaknya pemerintah jangan memaknai 'kacamata kuda' untuk menatap persoalan dari sudut pandangnya sendiri, sudah waktunya mereka bercermin dan introspeksi diri," tandas Hendardi.

Menurut Hendardi pembentukan raih tidak relevan dengan masalah bela negara, kecerdasan umum maupun pengamanan pemilu. Karena program tersebut hanya akan memperumit masalah, sehingga patut ditolak mentah-mentah.

Pembentukan raih, kata Hendardi, adalah bentuk penyelesaian masalah khas Orde Baru, yaitu melalui politik kekerasan, impresi (seolah-olah) atau memberikan janji yang ditunai dengan janji baru dan bukan solusi konkret. "Pemerintah mengansumai dirinya pada pihak yang merasa paling benar," tambah Hendardi.

Sedang Gubernur Jatim H Imam Utomo mendukung dibentuknya raih di Jatim dengan menggunakan nama Bela Cadangan (Balacad) seperti dilakukan di Korom Malang. "Jadi tak ada masalah sebab, tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Raih itu sesuai UU No 20 Thn 1982," ujar Imam Utomo ketika ditemui di Lamongan, Senin (14/12).

Menurut Imam, sampai saat ini yang sudah terasus bala cadangan atau rakyat berlatih itu di Kodam Bukit Barisan dan Kodam Siliwangi. Bagi Kodam lain baru sekarang ini dimulai.

Gubernur menepis adanya anggapan Balacad ini justru akan menimbulkan masalah baru. "Siapa bilang, itu kan praduga Anda saja. Dugaan seperti itu tidak benar. Mereka dibentuk untuk mengamankan negara, kok malah dituding membuat masalah di tanah air," jelas Imam Utomo. (ars/ong/tya/st7)

PP Muhammadiyah Jakarta, Senin, 14/12. (ars/ong)

Nilawati...

Ahn Jae Jung (Korsel), Taufik Hidayat melawan Dong Jiong (Cina), yang dikalahkannya di Brunai terbuka, Mis Audina melawan Lee Jo Hyun (Korsel), dan Trikus/Minari Timur ditantang Liu Yong/Ge Fei (Cina).

Ricky Subagya/Rexy Mainaky ditantang Khunakorn Sudhachit/Kitpon Kukul dari Thailand, Chandra Wijaya/Tony Gunawan menantang unggulan kedua Zhang Wei/Zhang Jun dari Cina.

Pada ganda putri, Indarti Isolina/Carmelita melawan unggulan pertama Ge Fei/Ge Jun dari Cina, dan Elyza/Dayana Lomba bertemu dengan Kim Shin Young/Yim Kyung Jin dari Korsel. Pasangan campuran Trikus/Minari ditantang Liu Yong/Ge Fei dari Cina.

Pemain tunggal putri Cindana dan ganda putra Candra Wijaya/Tony Gunawan dan pasangan sadakan Budi Santoso/Meiluwati kandas.

Cindana dikalahkan Sujitra Eakmongkolpalearn dari Thailand 11-9, 11-5, Candra/Tony kalah dari Lee Dong Soo/Yoo Yong Sung (Korsel) 15-11, 15-13, dan Budi/Meiluwati Chan Chong Ming/Joanne Swee Ling (Malaysia) 15-10, 15-5.

Pada cabang panahan, Nurfitriyana dan Lusya Elizabeth akan tampil dalam babak eliminasi, yang biasa disebut *olympic round*. Peluang Nurfitriyana lebih baik dibanding dengan Lusya, karena atlet senior yang menempati urutan ke-20 itu akan bersaing dengan peringkat ke-13 Misa Teubouchi dari Jepang.

Elizabeth sebagai peringkat ke-31 akan bersaing dengan urutan kedua Lee Eun Kyung dari Korsel.

Pada cabang sepak takraw tim putri Indonesia, yang sudah tidak punya peluang lagi ke semifinal, akan menghadapi pertandingan penyisihan terakhir melawan Kamboja. Tim putra sudah tersingkir setelah kalah dari Malaysia dan Korea Selatan.

Pasangan Yayuk Basuki/Wynne Prakusya akan menghadapi pertandingan perempat-final melawan Li Fang/Chen Li dari Cina.

Kalah Sementara itu, Pelari Supriati Sutono, yang dianggap KONI paling berpeluang menyumbangkan medali di antara atlet atletik lain, kemarin hanya menempati urutan kelima lari 10 km. Ia mencatat waktu 32 menit 52,46 detik, di bawah targetnya,

ridih dalam pertempuran seru di Phnom Penh. (ag/ap/ant)

Sumbangan dari halaman 1

32:50,00. Medali emas nomor itu diraih Yuko Kawakami dari Jepang (32:01,25), disusul Zheng Guixia dari Cina (32:18,81), dan perunggu untuk Chiemi Takahashi juga dari Jepang (32:22,68). Ia akan kembali bertanding pada nomor 5.000 meter, Jumat (18/12).

Tim panahan putra dan putri lolos ke babak kedua "olympic round", meskipun peluang mereka maju ke babak berikutnya sangat kecil, karena harus bersaing dengan peringkat pertama Korea Selatan.

Pada nomor perorangan, atlet Indonesia yang lolos ke babak kedua adalah Nurfitriyana dan Lusya Elizabeth (putri), Hendra Setiawan, Wahyu Hidayat dan Yulianto (putra). Namun peluang yang cukup besar hanya dimiliki Nurfitriyana, karena pelatih Daniel Lumalesil.

Tim sepaktakraw putra-putri dipastikan tersingkir, setelah mengalami kekalahan kedua. Tim putra dikalahkan Thailand 13-15, 15-2, 6-4, dan putra menyerah pada Malaysia 15-2, 15-4. Tim bolavoli putra akhirnya menempati peringkat keenam, setelah dikalahkan Thailand 17-16, 15-6, 15-8 pada perebutan tempat kelima. Semula target tim Indonesia hanya masuk delapan besar. (*)

Perolehan medali

Senin (14/12):

1. Cina	84	58	41
2. Korsel	43	25	35
3. Jepang	34	38	47
4. Taiwan	15	10	23
5. Kazakhstan	14	19	21
6. Thailand	13	19	24
7. Korut	5	11	6
8. Iran	4	8	8
9. Malaysia	3	8	5
10. Kuwait	3	3	2
11. Hong Kong	3	2	6
12. Singapura	2	3	8
13. Pakistan	2	2	3
14. Indonesia	2	1	6
15. Mongolia	2	0	5
16. Sri Lanka	2	0	1
17. Uzbekistan	1	12	9
18. India	1	4	10
19. Vietnam	1	2	4
20. Qatar	1	2	0
21. Turkmenistan	1	0	0
22. Myanmar	0	4	3
23. Filipina	0	3	7
24. Kyrgyzstan	0	3	2
25. Jordan	0	3	1
26. Nepal	0	1	2
27. Syria	0	1	1
28. UEA	0	0	1

YONGAN

anda lulusan N sederajat untuk k & disalurkan menjadi

K Playgroup K Tadika Puri

Membuka Baru Program : senif 6 bulan Di satu (1) tahun siswa ribuan lulusan

J. Nggep Jaya Ten 580055 J. Bang 5 Telp. 5674130 J. m IV 62 Telp. 3810483; ndok Indah Chandra 9 Ks-01 Telp. 785418; sok Chandra Indah, J. J. Proklamasi 71 Telp. 800ARJO : J. Tena II Sarinata GOR Sidoarjo MT. MALANG : J. Sen-Box C 4-E No. 27 Perum Telp. 716788; J. Muna 8 32 JEMBER : J. Gasol Telp. 427039 BALI : J. angan 15, Denpasar Telp. umahan Puri Nusa II 88 Telp. 772429

TSU

PRIA

aluhan pria dan ni, mengobati paten 100%,

g 15 lines) 13, 8490262, 79

lungan, Titin

100 WIB

8XIX/1996 100.000.000,-

HARI NI MALANG

HARI NI MALANG

HARI NI GALAXY 4 (MORING)

HARI NI GALAXY 4 (MORING)

HARI NI MALANG